

Prof. Dr. H. Fachruddin Azmi, MA.

# KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

MEMBERDAYAKAN PERADABAN









**Prof. Dr. H. Fachruddin Azmi, MA.**

# **KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM MEMBERDAYAKAN PERADABAN**



Diterbitkan oleh:  
**CV. MANHAJI Medan**  
2016



**KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM  
MEMBERDAYAKAN PERADABAN**

Penulis :  
Prof. Dr. H. Fachruddin Azmi, MA.

Copyright © 2016  
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
All Rights Reserved

Penata Letak :  
Johan Iskandar, S.Si

Perancang Sampul :  
Muhammad Hakiki

Diterbitkan:  
**CV. Manhaji** Medan  
e-mail: cvmanhaji@yahoo.com  
Cetakan Pertama : Mei 2016

ISBN: 978-602-6918-15-4





## KATA PENGANTAR

Pendidikan Islam telah berlangsung dalam kurun waktu yang panjang. Secara natural pendidikan Islam telah ada sejak awal peradaban manusia di muka bumi. Dalam bentuk yang sangat sederhana, proses pendidikan Islam dilaksanakan dengan cara “menurunkan” atau mewariskan kebiasaan dan tata cara hidup generasi tua kepada generasi muda. Dalam perkembangan selanjutnya, proses pendidikan Islam tersebut melebar dan merambah ke berbagai institusi masyarakat, sebelum akhirnya manusia mendirikan madrasah atau sekolah sebagai institusi formal, dimana generasi muda dididik dengan berbagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai atau sikap mental yang dibutuhkan bagi kehidupan mereka di masa depan.

Meskipun praktis pendidikan Islam telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama, namun bagaimana orang mempersepsi, mengkonsepsi, melaksanakan, dan menilai hasil-hasilnya ternyata bervariasi sesuai dengan tataran perkembangan peradaban dan alam pikiran suatu masyarakat. Dengan demikian, pendidikan itu dapat dipersepsi, dikonsepsi, dilaksanakan dan dinilai hasil-hasilnya secara terbatas dan sederhana dan dapat pula secara luas dan komprehensif.

Dalam upaya menstudi dan menilai secara kritis praktis pendidikan Islam yang telah berlangsung lama tersebut berbagai disiplin ilmu telah dikembangkan para ahli untuk menelaah secara kritis dasar-dasar antologis, epistemologis, dan aksiologis berbagai ide, gagasan, pemikiran dan praktik-praktik pendidikan Islam yang telah berlangsung dalam masyarakat Muslim, para ahli mengembangkan suatu disiplin studi yang disebut Filsafat Pendidikan Islam.

Untuk menelaah bagaimana masyarakat Muslim menyusun program, membangun dan mengembangkan institusi, dan meyelanggarakan proses



pendidikan dari waktu ke waktu, masa ke masa, era ke era, para ahli mengembangkan disiplin ilmu Sejarah Pendidikan Islam. Kemudian, untuk menelaah masyarakat Muslim menata perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi-program dan proses - pendidikan, dikembangkanlah disiplin ilmu Administrasi atau Manajemen Pendidikan. Dalam disiplin ilmu terakhir ini para ahli mengembangkan pula suatu studi khusus yang berfokus pada kajian kritis untuk mendapatkan pengetahuan tentang kebijakan-kebijakan berkenaan dengan program dan praktek pendidikan Islam. Studi ini kemudian berkembang dan diintrodusir sebagai Analisis Kebijakan Pendidikan Islam.

Secara umum, Analisis Kebijakan Pendidikan Islam dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditunjukkan untuk menciptakan, menilai secara kritis dan mengkomunikasikan pengetahuan ilmiah berkenaan dengan berbagai kebijakan menyangkut program dan proses pendidikan Islam sepanjang perjalanan historisnya. Dalam menciptakan pengetahuan tentang program dan proses kebijakan pendidikan Islam tersebut, analisis kebijakan pendidikan Islam meneliti sebab, akibat dan kinerja kebijakan dan program tentang pendidikan Islam. Untuk itu, analisis kebijakan menggunakan metodologi, yakni sistem standar, aturan, dan prosedur untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan pendidikan Islam. Pada gilirannya, aktivitas intelektual ini bermuara ke arah penciptaan pengetahuan baru yang pertimbangan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pilihan atas berbagai alternatif kebijakan pendidikan Islam ke masa depan misalnya alternatif kebijakan pendidikan Islam dapat meningkatkan mutu, perluasan akses, pemberdayaan. Masyarakat dan peradaban Muslim dan lain-lain pada tataran ini, analisis kebijakan pendidikan Islam diharapkan mampu menjadi landasan normatif kreatif dan inovatif bagi penyusunan kebijakan-kebijakan baru pendidikan Islam di masa depan.

Bila ditinjau dari dimensi historis, Islam pernah mencaapai puncak kejaannya dalam peradaban dan ilmu pengetahuan. Proses pencapaian itu merupakan kontribusi terbaik yang telah dipersembahkan pendidikan Islam.

Kebijakan masyarakat beriman, bebas buta aksara (illiteracy, dan berbudaya belajar), (learning society), yang telah dirintis dan dilaksanakan nabi Muhammad Saw terus dilanjutkan umat Islam sampai era kekhalifan Abbasiyah dan Amawiyah II di Andalusia. Kebijakan



tersebut pada gilirannya mengatarkan umat Islam pada keberhasilan dalam mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan, memproduksi sarjana dan cedikawan, serta memajukan kebudayaan dan peradaban Islam ke puncak kejayaannya.

Namun Fakta historis kemudian memperlihatkan bahwa setelah era Romantisme Abbasiyah dan Umayyah II – umat Islam berada pada masa disintegrasi dan kemunduran. Mayoritas Negara-negara Islam atau wilayah dimana umat Islam merupakan populasi mayoritas pernah dijajah atau dikuasai Barat pada era itu, praktis seluruh aktivitas intelektual dan pendidikan mengalami masa-masa kemundurannya. Sampai awal abad 20, Praktis tidak ada kreativitas dan dinamisme dalam pendidikan Islam, yang ada hanyalah sebuah penerusan yang pasif dari praktik-praktik tradisional yang dipandang napan. Mengapa dinamisme pendidikan Islam masa klasik tersebut tidak berkelanjutan secara progresif linear? Pertanyaan ini tentu memerlukan jawaban kritis yang dengan analisa yang mendalam dan komprehensif.

Ketika virus kebangkitan Islam mulai merambah ke berbagai Negara dan wilayah Muslim, Umat Islam mulai menyadari keberadaannya dan berupaya untuk bangkit serta membangun kembali peradabannya. Dalam prose situ, pendidikan Islam ditempatkan sebagai salah satu kekuatan elan vital untuk mendukung kebangkitan kembali ummat Islam dan memajukan peradabannya.

Ummat Islam mulai menyadari, dalam kondisi seperti ini, yang dibutuhkan adalah menemukan kembali factor-faktor kunci kekuatan pendidikan Islam, kemudian menat dan mengembangkannya kembali sebagai salah satu instrument bagi memberdayakan umat dan peradaban Islam. Disinilah kajian Analisis Kebijakan Pendidikan Islam menemukan signifikansi dan urgensinya.

Dalam perjalanan historisnya, sejak masa awal hingga modern kontemporer, telah terumuskan dan dipraktikkan berbagai kebijakan pembaharuan pendidikan Islam. Dalam tataran ini, terdapat pola kebijakan adaptif, dualistis adaptif integratif, dan moderatif. Semua pola kebijaksanaan tersebut bermuara pada upaya perubahan-perubahan positif secara kualitatif.

Pada gilirannya, optimalisasi upaya pembaharuan diarahkan pada pemberdayaan umat Islam. Buku yang berada di tangan pembaca ini mencoba menelusuri berbagai kebijakan pendidikan Islam sejak masa awal, masa klasik, sampai masa Indonesia kontemporer. Kerangka pikir

modernisasi yang mengembangkan pendidikan sebagai suatu sistem yang dialektis dan interdependensi dengan sistem budaya, politik ekonomi, sosial, dan sistem lainnya digunakan untuk membahas berbagai aspek kebijakan pendidikan Islam sepanjang perjalanan historisnya, dari masa Nabi, masa klasik dan Indonesia kontemporer. Dengan memanfaatkan sejumlah sumber tertulis, metode pengkajian kebijakan menggunakan metode analisis, sistematis historis dan sistemik historis. Pembahasan dalam buku ini mencakup analisis kebijakan pendidikan Islam lewat aspek budaya, pranata sosial budaya dan kelembagaan pendidikan Islam, kebijakan pembelajaran masyarakat seperti gerakan tulis-baca (*iletracy, compulsory education*) dan *objektivikasi* nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan pelayanan pendidikan Islam multikultural, pendidikan inklusif dan Islamisasi ilmu pengetahuan. Selain itu, buku ini juga memaparkan tentang polarisasi pemberdayaan pendidikan Islam ke masa depan.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi salah satu referensi untuk mengisi “kekosongan” sehubungan dengan “langkanya” literature atau sumber bahan berkenaan dengan studi atau kajian tentang Analisis Kebijakan Pendidikan Islam. Kehadiran buku ini diharapkan mampu membantu semua pihak khususnya para mahasiswa, pendidik, dan peminat pendidikan Islam dalam mempelajari dan memahami kajian tentang Analisis Kebijakan Pendidikan Islam.

Medan,

*Penulis*





## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	<b>[ v ]</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>[ ix ]</b>
<b>Daftar Tabel</b>	<b>[ xi ]</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	<b>[ 3 ]</b>
A. Latar Belakang Masalah	[ 3 ]
B. Metode Pengkajian Kebijakan	[ 8 ]
C. Landasan Teoritik	[ 11 ]
D. Strategi Pembahasan dan Teknik Analisis	[ 15 ]
E. Sistematika	[ 16 ]
<b>BAB II: KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM LEWAT           ASPEK BUDAYA</b>	<b>[ 21 ]</b>
A. Kebijakan Membina Masyarakat Beriman dan Berbudaya Pelajar	[ 22 ]
<b>BAB III: KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM           PRANATA SOSIAL BUDAYA</b>	<b>[ 43 ]</b>
A. Kebijakan Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Masjid-Masjid Khan, Masjid Jami' dan Timbulnya Madrasah	[ 43 ]
B. Modifikasi Kuttub ke Maktab dan Timbulnya Maktabah	[ 49 ]
C. Majlis Ilmu, Bimaristan dan Observatorium	[ 52 ]

**BAB IV : KEBIJAKAN PEMBELAJARAN MASYARAKAT [ 59 ]**

- A. Gerakan Baca Tulis dalam Pendidikan [ 59 ]
- B. Muatan Islami pada Kebudayaan [ 64 ]
- C. Muatan Islami pada Budaya-Budaya Lokal [ 69 ]
- D. Integritas Diniyah - Ilmiah dan Amaliah [ 74 ]

**BAB V : PELAYANAN PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL [ 79 ]**

- A. Penempatan Pendidikan [ 79 ]
- B. Pelayanan Pendidikan Perspektif Muliti Kultural [ 82 ]

**BAB VI : KONSTRUKSI KEBIJAKAN PENDIDIKAN**

**ISLAM LEWAT ASPEK BUDAYA [ 91 ]**

- A. Kebijakan Pendidikan pada Masa Pembentukan [ 92 ]
- B. Kebijakan Pendidikan pada Masa Peralihan [ 96 ]
- C. Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Kemajuan Awal [ 98 ]
- D. Kebijakan Pendidikan Masa Kemajuan Tengah [ 98 ]

**BAB VII : POLARISASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN**

**PENDIDIKAN ISLAM KE MASA DEPAN [ 105 ]**

- A. Implementasi Pembaharuan Pendidikan Islam [ 105 ]
- B. Beberapa Pola Kebijakan Pembaharuan Pendidikan Islam [ 106 ]
- C. Kebijakan Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia [ 110 ]

**BAB VII : PENUTUP [ 121 ]**

- A. Kesimpulan [ 121 ]
- B. Beberapa Pandangan Kedepan [ 122 ]

**INDEKS [ 125 ]**

**DAFTAR PUSTAKA [ 129 ]**





## DAFTAR TABEL

Tabel I : Kebijakan Pendidikan Islam Masa Pemberntukan	[ 94 ]
Tabel II : Proses Keberdayaan Pendidikan Islam Masa Peralihan (661-750)	[ 97 ]
Tabel III : Proses Keberdayaan Pendidikan Islam Masa Kemajuan (750-1250)	[ 99 ]

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

**S**ejak awal Nabi Muhammad SAW menyampaikan Islam agama ini telah berkembang keseluruh belahan dunia, sampai saat ini jumlah umat Islam lebih dari satu Milyard jiwa.<sup>1</sup> Mereka tersebar di empat puluh lima negara Asia Afrika dan di negara-negara Eropah, bekas Uni Soviet, Amerika dan Australia. Sebahagian besar terkonsentrasi di wilayah negara-negara Afrika Utara, Asia Barat (Timur Tengah), Asia Barat Daya dan beberapa negara Asia Tenggara. Negara yang jumlah penduduknya memeluk agama Islam sangat banyak terdapat di Indonesia, Pakistan, Bangladesh dan India.<sup>2</sup> Demikian juga di Cina ternyata ada 10% penduduknya dari jumlah 1 Milyard jiwa itu adalah kaum muslimin. Selebihnya berada di negara-negara lain dalam jumlah yang relatif kecil.

Masyarakat Islam diberbagai tempat itu menghadapi permasalahan yang berbeda namun secara umum permasalahan itu dapat dikelompokkan pada permasalahan bidang budaya, agama, ekonomi, politik dan pendidikan. Buku ini mengulas berbagai bentuk kebijakan pendidikan Islam yang dilaksanakan masyarakat, lembaga/institusi formal maupun

---

<sup>1</sup> Ismail R. Faruqi. *Islamisation of Knowledge: General Principle and Work Plan*, (Washington D.C., International Institute of Islamic Thought, 1982). edisi bahasa Indonesia, *Islamisasi Ilmu Pengetahuan* (Bandung: Pustaka, 1981), p. 2

<sup>2</sup> Jhon L. Esposito, (Ed), *Islam in Asia: Religion, Politics and Society*, (New York: Oxford University Press, 1987), p. 11

non formal sebagai pilihan cerdas mengatasi berbagai permasalahan itu untuk membangun peradaban. Bagaimana ber Islam dalam masyarakat yang beragam etnis dengan beragam budaya tentulah memerlukan langkah-langkah konkrit dalam bentuk kebijakan pendidikan. Penetapan suatu kebijakan bukanlah hal yang mudah. Kebijakan adalah rekayasa social yang memiliki dampak yang luas bagi kehidupan. Karenanya suatu kebijakan dapat mengacu kepada keberhasilan masa lalu yang merupakan wujud dari eksistensi suatu kebijakan yang diambil pada masanya. Seperti apa yang dilakukan Rasulullah yang terkompilasi pada gagasan, pemikiran, pendapat dan tindakan beliau yang diaplikasikan dalam kehidupan. Apa yang dilakukan Rasulullah sebagai kebijakan pendidikan untuk membangun peradaban, dapat diterapkan secara kondisional pada daerah dan waktu lain. Pada tataran lain kebijakan itu dapat pula menjadi landasan kreatif dan inovatif menyusun kebijakan yang baru. Selain itu kebijakan yang bernilai universal bersifat kondisional dapat diambil pemaknaan dan sebagai pembandingan dan konstruksi pengambilan kebijakan yang diperlukan. Di samping itu berbagai kebijakan yang pernah dilakukan dalam pridesasi sejarah Islam terutama masa kemajuan dapat pula dipergunakan sebagai acuan dan sumber penetapan beberapa kebijakan pendidikan untuk penguatan peradaban tersebut.

Bila dilihat dari aspek budaya masyarakat Islam terdiri dari berbagai etnis suku bangsa dengan beragam budaya. Di kalangan masyarakat Muslim biasanya sedikit atau banyak unsur-unsur keislaman tampak mewarnai budaya itu. Keadaan itu sebagai hasil proses enkulturasi yang lama dan intensif. Masalah yang dihadapi umumnya adalah pengaruh budaya-budaya dunia yang meluas bersama era globalisasi, orientasi Ideologis dan norma-norma nasional yang dikembangkan suburkan oleh negara nasional, upaya menghidupkan budaya asli (Nativisme) dalam rangka kepentingan pembangunan pariwisata<sup>3</sup> serta merebaknya budaya hedonisme dan permesivisme. Di samping budaya yang dipaksakan pada masyarakat Muslim minoritas, masalah pluralitas agama serta adanya kecenderungan sekularisasi.

Bila ditinjau dari sejarahnya, Islam pernah mencapai kemajuan yang gemilang dalam peradaban dan ilmu pengetahuan selama abad V - XI atau

---

<sup>3</sup> Lihat Deliar Noer, "Masa Depan Ummat Islam tantangan dan sarana Menghadapinya" dalam Dewam Raharjo, *Reformasi Politik*, (Jakarta: Intermasa, 1997), p. 234



disebut priode klasik (650-1250). Harun Nasution menyebutkan abad itu dengan Keemasan Islam<sup>4</sup> itu bermula dari abad VII dan berakhir abad XIII M, dibagi kepada dua bahagian yaitu; a) masa kemajuan (650 - 1000M), b) masa disintegrasi (1000 - 1250). Pada priode klasik ini Islam berkembang sangat cepat tercatat hanya 23 tahun seluruh jazirah Arabia menjadi Islam dan seluruh sistem kehidupan lama mengalami perubahan. Seratus tahun (661 - 750) kemudian Islam meluas meliputi Asia, Afrika dan Asia kecil serta Andalusia. Kemajuan itu diikuti dengan kemajuan berbagai disiplin ilmu Islam yang berkembang dengan pesat. Beberapa pengetahuan praktis dari Yunani dan Persia Kuno diambil diterjemahkan dikembangkan walau dalam tahap masih terbatas. Dalam masa itu pula hampir seluruh zimmī melakukan konversi agama menjadi Islam. Pada masa kemajuan masa Abbasiyah (750 - 1250) perkembangan kemajuan Islam mencapai puncak berbagai ilmu pengetahuan dan filsafat warisan kuno Persia, Cina, India, Mesir dan Yunani diterjemahkan secara menyeluruh ke dalam bahasa Arab. Penterjemahan ini telah memulai era baru yang menghantarkan dunia Islam memasuki tahap kebesaran dan kemegahannya dalam bidang ilmu pengelahuan dan filsafat<sup>5</sup>. Baghdad, Cairo, Cordoba dan kota lainnya telah menjadi pusat peradaban dunia. Masjid, Majlis ilmu, Perpustakaan, toko buku, rumah sakit, observatorium, pabrik-pabrik berdiri dimana-mana, penuh dengan aktivitas ilmiah. Berbagai ilmu ternama berikut penemuan mereka dalam berbagai disiplin ilmu agama dan ilmu pengetahuan dan filsafat Islam lahir pada priode ini.

Pada masa disintegrasi suatu model lembaga pendidikan modern diberi nama Madrasah didirikan oleh Nizam al Mulk perdana menteri bani Seljuk yang mengambil alih kekuasaan khalifah Abbasiyah. Selanjutnya setelah mengalami masa kemunduran yang parah daerah Islam terpecah-

<sup>4</sup> Harun Nasution, "Tinjauan Filosofis Tentang Pembentukan Kebudayaan Islam", dalam Abd. Basir Solissa Dkk, (eds), *Al-Qur'an dan Pembinaan Budaya, Dialog dan Transformasi*, (Yogyakarta: LESFI, 1993), p.19. Secara keseluruhan Harun membagi priodesasi sejarah Islam kepada tiga bagian: I. Priode Klasik (650-1250) terdiri dari masa kemajuan 650-1000, masa disintegrasi 1000-1250, II. Priode Pertengahan (1250-1800); masa kemunduran 1250-1500; masa kerajaan besar 1500-1800; fase kemajuan 1500-1700 dan fase kemunduran 1700-1800 dan III. Priode Modern 1800-sekarang. Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Beberapa Aspek*, (Jakarta: UIP, 1985), p.56.

<sup>5</sup> Khurbutli membagi ilmu yang berkembang dalam dunia Islam kepada (1) *Dirasat al Diniyah* (2) *Dirasat al Adabiyah* (3) *Dirasat al Aqliyah* dan (4) *Dirasat al-Alamiyah*. Husni Al Khurbutly, *Al Hadharat al Arabiyah al-Islamiyah*, (Kairo: Maktabah Al Khasanji, tt), p. 246.

pecah. Setelah itu umat Islam mengalami kemunduran. Baru mulai bangkit kembali setelah mengalami penjajahan yang panjang. Pada awal abad XX satu persatu negeri Muslim memperoleh kemerdekaan.

Menghadapi kondisi itu pendidikan menjadi sistem yang diharapkan mampu mengatasi masalah. Dalam kondisi itu diperlukan kemampuan analisis secara objektif sehingga mampu menemukan faktor-faktor kunci keberhasilan dan juga kegagalan yang dari itulah dapat menentukan kebijakan pendidikan Islam memberdayakan peradaban. Berbagai gagasan pembaharuan dilakukan mulai dari gerakan Wahabi<sup>6</sup>, gerakan Sayyid Ahmad Khan, Sayyid Ameer Ali, Nenik Kemal, Jamaluddin Al Afghani, Muhammad Abduh,<sup>7</sup> Muhammad Iqbal dan banyak lagi lainnya baik yang bercorak purifikasi dan dilanjutkan kepada yang bersifat modernisasi. Baik melalui jalur pembaharuan pemikiran dan yang diikuti dengan kebijakan pendidikan yang tampilannya dalam bentuk adopsi budaya barat, adaptasi (asimilasi dan akomodasi), dualisme dan integrasi (dalam bentuk upaya islamisasi ilmu pengetahuan), maupun gerakan politik telah dilancarkan namun dunia umat Islam pada saat ini masih berada di anak tangga bangsa-bangsa terbawah,<sup>8</sup> terbelakang dalam segi budaya, ekonomi, politik dan juga intelektualitas.

Masalah yang paling mendasar mengapa kemajuan pendidikan Islam pada periode klasik itu tidak berkelanjutan secara *progressif linear* dan mengapa kebijakan yang telah dilangsungkan belum menjawab

<sup>6</sup> Gerakan Wahabi disebut juga *Puritanisme*, hakikat gerakan ini ingin mengkonstruksi spiritualitas dan moralitas atas dasar kemurnian awal Islam, Fazlur Rahman menyebut gerakan ini dengan istilah *rivalisme* atau *fundamentalisme*, Lihat Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation and Intellectual tradition*. (Chicago; The University of Chicago, 1986), p. 136.

<sup>7</sup> Fazlur Rahman menyatakan bahagian integral dari semangat dan pemahaman para pembaharu ilmiah adalah (1) bahwa suburnya perkembangan sains dan semangat ilmiah dari abad IX hingga abad X dikalangan Muslim adalah buah dari tuntunan Al-Quran agar manusia mengkaji alam senesta hasil karya Tuhan yang diciptakan baginya, (2) bahwa abad pertengahan yang akhir semangat penyelidikan ilmiah telah merosot dan karenanya masyarakat Muslim lalu mengalami kemacetan dan kemerosotan, (3) bahwa Barat telah menggalakkan kajian ilmiah yang sebahagian besar telah dipinjamnya dari kaum Muslimin dan karena itu mereka memperoleh kemakmuran dan bahkan menjajah Muslim, (4) bahwa karena itu kaum Muslimin mempelajari kembali sains barat yang telah berkembang akan berarti menemukan kembali masa lalu mereka dan memenuhi kembali perintah Al-Quran terabaikan, lihat Fazlur Rahma, *Islam and Modernity*, *ibid*, p.8-9

<sup>8</sup> Ismail Al-faruqi. *Op-cit*, p.1.



permasalahan. Menjawab masalah ini tampak perlu ada arah yang jelas dan aplikabel untuk pemberdayaan Pendidikan Islam ke masa depan.

Untuk itu yang paling memungkinkan adalah melakukan telaah historis sistematis kebijakan pendidikan Islam, yaitu meneliti keberadaan pendidikan Islam sebagai kompilasi kebijakan pendidikan Islam yang telah teruji dalam proses kesejarahan terutama pada priode kemajuan klasik.

Sebagai suatu sistem, pendidikan interdependensi dengan sistem budaya. Hal-hal yang mendukung kebijakan pendidikan Islam yang ditemukan pada masa klasik tersebut merupakan keberadaan pendidikan dari berbagai aspek. Hal yang mendukung keberadaan itulah diharapkan dapat menjadi bahan pembanding bagi rekonstruksi kebijakan pendidikan Islam ke dapan.

Dengan menelusuri berbagai keberadaan pendldikan Islam sebagai wujud kebijakan pendidikan memberdayakan peradaban akan dapat dikemukakan setidaknya tiga persoalan pokok yaitu :

1. Kebijakan Pendidikan Islam pada masa klasik dalam aspek budaya.
2. Faktor pendukung keberadaan pendidikan Islam pada masa tersebut sebagai eksese dari kebijakan yang ada.
3. Bagaimanakah kebijakan Pendidikan Islam masa klasik itu dapat dipakai sebagai pembanding guna rekonstruksi pemberdayaan kemasa depan terutama untuk menjawab permasalahan umat Islam dewasa ini.

Telaah kebijakan pendidikan melalui presfeklif sejarah tentu tidak mudah, disini diperlukan beberapa langkah utama antara lain:

1. Mencermati Pendidikan Islam dan masa ke masa pada priodesasi sejarah yang dalam hal ini difokuskan pada masa kemajuan klasik dan menemukan pada saat mana Pendidikan Islam mendapat keberadaan lewat aspek budaya, pada masa kesejarahannya itu.
2. Menemukan hal-hal yang menjadi pendukung keberadaan Pendidikan Islam dalam interaksinya dengan kondisi budaya, yang berlangsung pada priode klasik tersebut, sebagai bahan pembanding merekonstruksi pemberdayaan pendidikan Islam masa depan
3. Di samping itu pembahasan ini akan memilikl manfaat untuk bahan mengadakan study lanjut tentang usaha Pemberdayaan Pendidikan Islam jika kebijakan yang ada pada mass lalu tersebut dapat ditransfer



menjadi pembanding atau entry point mengkonstruksi atau pun mengkritisi atau mengrevisi berbagai kebijakan pendidikan Islam kedepan.

## B. Metode Pengkajian Kebijakan

Untuk melakukan pengkajian kebijakan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode antara lain:

### a. Metode analisis,

Pengkajian kebijakan dapat dengan menggunakan Metode analisis, seperti analisis kebutuhan, analisis kelayakan, analisis SWOT, analisis skenario building. Pengkajian kebijakan dengan menggunakan metode analisis ini lebih kepada menyusun dan membuat kebijakan yang diperlukan untuk kedepan.

### b. Metode sistemik.

Pengkajian kebijakan dengan metode sistemik dilaksanakan dengan menempatkan core atau subjek kebijakan dalam hubungan determinat atau koordinat atau koheren bersama dengan sub sistem lainnya atau sub internal sistem. Telaah kebijakan dengan model ini lebih mengarah pada pengkajian kebijakan dari segi kritisasi ataupun melakukan rekonstruksi kebijakan yang ada atau mereview kebijakan untuk kepentingan kedepan.

### c. Metode pengkajian historis;

Sumber utama pengkajian kebijakan dengan menggunakan metode ini adalah data historis tentang sejarah pendidikan Islam yang terdapat pada berbagai literatur sejarah pendidikan Islam yang mengetengahkan berbagai trend kebijakan yang dilakukan pada masanya.

### d. Metoda gabungan sistemik historis ,

Telaah kebijakan dengan metode ini akan lebih komprehensif untuk mengkreasi suatu kebijakan yang komprehensif kedepan. Dengan pengkajian ini dapat dimungkinkan terbukanya wawasan para pengambil kebijakan dan menumbuhkan kearifan untuk merumuskan kebijakan yang lebih adaptable, kompletable, dan reasonable.

Buku aplikable ini disusun dengan dua pendekatan tersebut yaitu telaah sistem budaya dan telaah historis. Sumber data kebijakan pendidikan diambil data sejarah yang ditulis pada buku sejarah pendidikan Islam diantaranya buku *History of Muslim Education* (Beirut, Libanon: Dar al Kashaf Publishing Printing Distributing House. 1954), buku ini merupakan disertasi Ahmad Syalabi yang atas saran guru besar sejarah di *Universitas Cambridge AJ Arberry* yang juga promotornya telah diterbitkan dalam bahasa Arab berjudul *Tarikh al-Tarbiyah al-Islamiyah*. Pada edisi berbahasa Arab ini bahagian yang tadi ditulis singkat diperluas penjelasan dan pembahasannya. Buku ini mengulas berbagai unsur pendidikan Islam dari awal Islam sampai dengan abad XII. Penulisan buku ini menggunakan sumber dari studi lapangan tempet-tempat dan inskripsi historis, buku tentang penyelenggaraan pendidikan masa klasik Islam yang sebahagian tidak dijumpai lagi kecuali pada tempat tertentu yang kebetulan dlketemukan dalam penelitian di perpustakaan-perpustakaan di Timur Tengah, serta beberapa negara Eropah.

Kemudian buku *Higher Learning in Islam, The Classical Priod AD 700 - 1300*. Karya Charles Michael Stanton yang menyoroti sejarah pendidikan Islam dari segi institusi pendidikan tinggi dan proses penyelenggaraannya, pengaruh Helenisme, prespektif Islam tentang ilmu dan prestasi ilmuwan, peran lembaga informal pendidikan tinggi dan transmisi pendidikan tinggi ka Eropah. Sumber yang dipergunakan sama dengan Syalabi dan beberapa mengutip dari Syalabi. Selanjutnya karya Muhammad Munir Mursi, *Tarbiyah al-Islamiyah Usuluha wa Tatawwaruha fi al-Bilad al-'Arabiyyah* (Kairo: Alam Kutub, 1977) mengungkap dasar-dasar dan perkembangan Pendidikan Islam masa klasik dan dilanjutkan masa modern dan pendidikan di beberapa negara Arab. Tulisan Aminah Ahmad Hasan, *Nazaryyah al-Tarbiyah fi al-Qurani wa Tatbiqatuha* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1985), buku ini khusus menjelaskan pendidikan menurut Al-Our'an dan penyelenggaraannya pada masa Rasul. Sa'ad Mursi Ahmad, *Tarikh al- Tarbiyah wa al-Ta'lim*, (Mesir: Alam al-Kutub, 1974). Salanjutnya karya George Makdisi, *The Rise of Colleges Institution of Learning in Islam in The West* (Edinburgh: 1981), memuat berbagai institusi pendidikan Islam dan sistem penyelenggaraannya. Selanjutnya karya Richard W Bullet. *The Patrician of Nishapur, A Study in Medieval Islamic Social History* (Cambridge: 1972) dan beberapa institusi pendidikan Islam, dalam *The Encyclopedia of Islam* (Leiden: E.J. Brill), tentang *waqaf* dalam Jhon L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia*



of the Modern Islamic World (New York: Oxford University Press, 1995). Suatu buku berharga tulisan Fazlur Rahman guru besar *Islamic Studies* di Universitas Chicago. Buku ini mengulas tentang pendidikan dalam perspektif sejarah dengan al-Our'an sebagai kriteria penilaian. Buku ini semula berjudul *Islamic Education and Modernity*, diterbitkan menjadi *Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition*.

Buku Fazlur Rahman ini banyak menyentuh unsur penting penyelenggaraan masa awal dan pertengahan serta menyoroti pembaharuan Pendidikan yang dilakukan di beberapa negara. Sungguhpun buku ini tidak mengkhususkan tinjauan dan aspek budaya, ekonomi, politik, agama, namun berbagai analisis telah mengikutkan tinjauan itu. Kemudian buku Al-Tarbiyah al-Islamiyah (Kairo: *Dar al-Qaumiyyah li al Ilba'ah wa al-Nasyr*. 1964) tulisan Muhammad Atiyah al-Abrasyi, guru besar di *Dar al-Ulum Universitas Kairo*. Seterusnya beberapa karya tentang sejarah seperti *Science and Civilization In Islam* (Cambridge, 1987) karya Seyyed Hossein Nasr yang mengungkapkan tentang konsep ilmu pengetahuan dan peradaban serta hasil temuan ilmuan Islam dalam berbagai bidang. Tulisan Ahmad Syalabi, Sejarah kebudayaan islam tiga jilid, mengungkapkan sejarah kebudayaan Islam sejak priode awal sampai akhir masa Abbasiyah dengan telaah sosial politik dan budaya. *Studies In Islamic History* karya Amir Hasan Shiddiqi selain mengungkap sejarah Islam sepintas dalam buku ini diulas juga tentang sistem ekonomi politik, peradilan dan beberapa pandangan Islam tentang isu utama yang berkembang dan pandangan Islam terhadap isu tersebut.

Sumber perpustakaanlainnya adalah karya Ira Marvin lapidus, berjudul *History of Islamic Societies* (Cambridge, 1991) dan *Muslim Cities in The Laltter Middle Ages* (Cambridge, 1967) yang mengungkap telaah sejarah melalui kajian ekonomi, sosial dan politik. Serta buku tulisan E. Ashtor yang ditulisnya di Zurich, berjudul *Economic Hlstory of The Near East in The Middle Ages* (london: Collins st. James's Place. 1976) Ashlor menggunakan sumber dari berbagai literatur Arab populer dan yang tidak dipublikasi, tersembunyi di perpustakaan London dan Oxford, sejumlah dokumen Yahud-Arab dan sejumlah besar dokumen dalam arsip Venesia dan beberapa kota di Italia yang pernah menjadi jalur perdagangan dengan Timur dekat abad pertengahan dan dokuman lain yang tidak terpublikasi karena tanpa penulis yang jelas.

Tulisan sejarah Islam yang memuat secara implisit kehidupan masyarakat Islam seperti *Tarikh al-Islarm al-Siyasi wa al-Din* lima jllid.



(Mesh': Maktabah al-Nahdhah. 1976) karya Hasan Ibrahim Hasan. Buku *Fajr al-Islam, Dhuha al-Islam; zuhr al-Islam* karya Ahmad Amin serta *Al-Hadharah al-Arabiyah al-Islamiyyah*, karya Ali Hasany at-Khurtuby. Karya P.K Hitti, *History of The Arabs* (Loncon: Macmilan. 1955) Karya Sayid Ameer All. *A Short History of The Saracen serta The Venture of Islam* (Chicago: 1974), 2 jilid Karya Marshal. Hudgsor serta *The Islamic Dynasties* tulisan C.E.Bosworth. Untuk kerangka analisis ditelaah pula buku *Education and National Development a Comprative Perspective* yang disusun oleh Ingemar Fagerlind guru besar *Stockholm University* dan *Lawrence J Saha* dari *Australian National University*.

Buku ini mengulas tentang berbagai konsep teori perubahan sosial. dimensi pengembangan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. tenaga kerja modernisasi pendidikan lainnya seperti karya F. Harbison and CA Myers, *Education and Manpower and Growth Strategies of Human Reseources Development* (London: Mc Graw Hill. 1964), M.D Shipman, *Education and Modernization*. (Faber : 1972) dan buku-buku pengantar teori antropologi budaya. ekonomi dan politik serta beberapa konsep politik dari Plato dan Aristoteles dipakai untuk kerangka pangantar analisis. Membahas data sejarah tersebut yang dipergunakan metode penelitian kualitatif-phenomenologi dengan berusaha menangkap dan mengungkapkan pemaknaan dari data historis yang ada dengan tata pikir historis -Interdependen dan interpretatif - konstruktif serta interdependen - multi linier.<sup>9</sup>

### C. Landasan Teoritik

Dalam telaah phenomenologi teori dipergunakan sebagai kerangka analisis. Dengan cara memaknai kecenderungan data tanpa menggiring pada konsep atau teori tersebut sehingga pemaknaan yang diperoleh menjadi memiliki konfirmabilitas, dependabilitas dan transferabilitas.

Teori yang dipergunakan sebagai kerangka analisis dalam telaah ini adalah bergerak dari teori Modernisasi yang mengembangkan konsep pendidikan sebagai suatu sistem yang dialektis. Seluruh komponen sistem pendidikan interdependensi dengan sistem lainya (budaya, politik, ekonomi, sosial dan semacamnya).<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), p. 68, 128.

<sup>10</sup> Lihat Noeng Mohadjir, *Peencanaan dan Kebfakan Pembangunan Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta. Rake Sarasin. 1993). p. 129

Pendidikan akan berfungsi penuh dalam keterikatan dengan aspek kehidupan lainnya. Antara aspek itu menurut Adolphe E Meyer saling merefleksikan.<sup>11</sup> Dengan konsep itu maka perencanaan atau pelaksanaan pendidikan secara dialektis sebagai subjek dan objek perubahan.<sup>12</sup> Hubungan sub sistem itu saling interaktif dengan pendidikan sebagai pusatnya seperti terlihat pada figure di bawah ini :

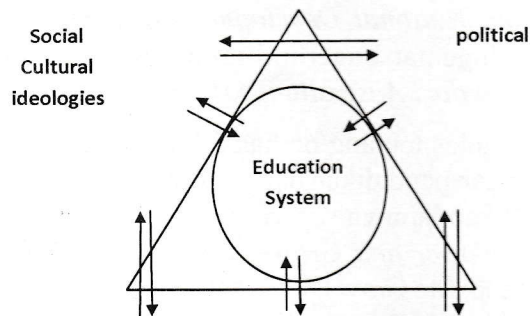


Figure 1: dialectic model of education and development

Jika dalam telaah memasukkan agama sebagai suatu sub sistem tersendiri maka hubungan dialektik itu sebagai berikut:

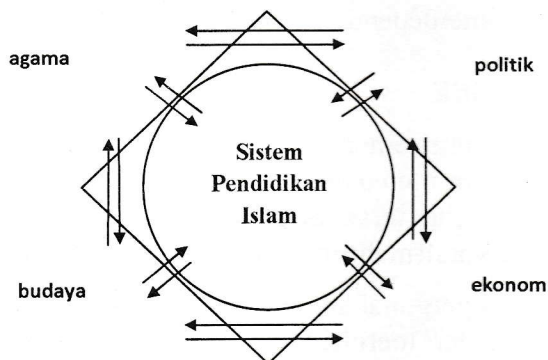


Figure 2: model dialektis dimensi Pengembangan pendidikan Islam

<sup>11</sup> Imam Barnadib. *Kearah Prespektif Baru Pendidikan* (Jakarta: Depdikbud. Ditkti. PPLPTK. 1988). Lihat juga Imam Barnadib. *Dasar-Dasar Kependidikan, Memahami Makna dan Prespektif Beberapa Teori Pendidikan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998). p. 80

<sup>12</sup> Ingemar Fagerlind, *Education and National Development a Comparative Perspective*, (Oxford: Fergamon Press, 1983), p. 197



Sebagai suatu sistem, “pendidikan” terdiri dari komponen sistem; wawasan, proses, materi dan lembaga kependidikan yang terpadu berkekeluargaan (sinergis). Keterpaduan komponen itu menjadi suatu sistem pendidikan yang berperan secara optimal menjalankan perannya. Ada tiga peran utama pendidikan tanpa kecuali pendidikan Islam yaitu (a) sosialisasi integrasi anak didik ke dalam nilai kelompok atau moral yang dianut, (b) mempersiapkan untuk memiliki kecakapan/kemampuan sosial ekonomi dengan membekali kualifikasi-kualifikasi pekerjaan dan profesi yang membuat mereka mampu memainkan peran sosial ekonomi dalam masyarakat, (c) tumbuhnya kelompok elite yang nantinya memberikan sumbangan bagi keberlangsungan dan kelanjutan pembangunan.<sup>13</sup> Sejalan dengan itu, Noeng Muhadjir mengemukakan fungsi pendidikan: menumbuhkan kreatifitas subjek didik, menjaga lestariannya nilai-nilai insaniyah dan ilahiyah, dan membina tenaga kerja produktif.<sup>14</sup>

Ahli pendidikan Muslim Ibnu Maskawih menyatakan fungsi pendidikan adalah: memanusiakan manusia agar tetap pada kebenaran (*al-khairat*) dan dapat menghindari kejahatan (*al-syurur*) dan tidak jatuh ke martabat hina (*al-hayawaniah*), memasyarakatkan sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan kebersamaan *makalul insani* (human perfection).<sup>15</sup> Munir Mursi menyatakan Pendidikan Islam adalah “proses pembinaan manusia mengabdikan dan taat kepada Allah agar taqwa, memakmurkan bumi untuk kepentingan memperkokoh kemaslahatan manusia dengan menguasai berbagai ilmu, dan memperkuat persatuan Islam.<sup>16</sup> Aminah Ahmad mengatakan “mengembangkan manusia ke arah kesempurnaan-keutuhan baik kepribadian maupun kemampuan menyelesaikan urusan dunia dan akhirat dan agar berakhlak mulia”.<sup>17</sup>

Para ahli berkesimpulan pendidikan mempunyai peran besar dan menjadi pembuka pintu modernisasi.<sup>18</sup> Anderson misalnya menyatakan

<sup>13</sup> MD. Shipman, *Education and Modernization*, (London: Faber, 1972), p. 33-35.

<sup>14</sup> Noeng Muhadjir, *Pendidikan dan Perubahan Sosial, Suatu Teori Pendidikan*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1993), p. 35.

<sup>15</sup> Ibnu Maskawih, *Tahzib al-Akhlaq wa Tahthil al-A'raq*, cet.I (Cairo: Al-KHairyah, tt), p.5-13.

<sup>16</sup> Muhammad Munir Mursi, *Tarbiyah al-Islamiah Usuluha wa Tatawwaruha fi al-Bilad al-'Arabiyyah*, (Kairo: Dar al-Kutub, 1977), p. 20

<sup>17</sup> Aminah Ahmad Hasan, *Nazariyyah al-Tarbiyah fi al-Qurani wa Tatbiqatuha*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1985), p. 272

<sup>18</sup> Harbison and CA. Myers, *Education Manpower and Growth Strategies of Human Resources Development*, (Mc. Graw hill, 1964), p.181



pembangunan banyak tergantung kepada bagaimana pendidikan diorganisasikan dan dimanfaatkan untuk membantu integrasi sosial budaya dan politik.<sup>19</sup> Ajaran Islam secara tuntas menyatakan pendidikan sebagai landasan utama bagi peningkatan harkat martabat (derajat) manusia dan kemanusiaannya.<sup>20</sup> Peran Pendidikan yang strategis itu sering tidak muncul sehingga pendidikan lebih sebagai objek perubahan ketimbang subjek. Keadaan ini menumbuhkan berbagai teori pembaharuan pendidikan mulai dari Rivitalisasi Budaya sampai Modernisasi dengan konsep Pembangunan Sumber Daya Manusia (Human Capital) sampai bentuk liberasi yang dikumandangkan Ivan Illich, dan lainnya.

Dalam dunia pendidikan Islam pembaharuan juga dilancarkan terus menerus sejak awal abad XIX. Upaya pembaharuan itu dapat dikategorikan kepada yang bercorak purifikasi dan dilanjutkan kepada yang modernisasi. Tempilan kebijakan dari upaya pembaharuan pendidikan itu adalah: (1) Pemurnian; a) berupaya menolak semua yang berasal dari luar Islam terutama Barat dan menyerukan kembali kepada Al-Qur'an dan menentang semua bentuk khurafat. b) mempertahankan pola tradisional yang partial dan tektual dan menolak semua bentuk perubahan. (2) Pembaharuan: a) mengadopsi semua model Barat dan membuang semua unsur Islami dan nilai tradisional, b) adaptasi dapat dibagi kepada (1b) ekomodasi yaitu dengan cara memasukkan pelajaran umum dalam kurikulum sekolah agama, dan (2b) memasukkan mata pelajaran agama di sekolah umum dan mata pelajaran umum di sekolah agama.<sup>21</sup> (3) Pembangunan tampilan kebijakannya adalah (a) integrasi ilmu pengetahuan (Islamisasi Ilmu Pengetahuan) (b) rekonstruksi ilmu pengetahuan yang Islami dan (c) pola lanjut (dekonstruksi) suatu upaya pembongkaran dari konsep yang ada. Usaha tersebut tampilan kebijakannya lebih pada lingkup pembaharuan secara revolusioner.

Pada era 1990-an di USA dan beberapa Negara industry memandang perlu *planned change* dengan model pemberdayaan (*Empowerment*). Dalam bahasa Inggris *empower* diartikan *give to authority*.<sup>22</sup> *Empowerment*

<sup>19</sup> Lihat Don Adams, *Education and Modernization in Asia*, (London: Addison Wesley Onwriting, 1970), p. 8 dan Philips H. Comb. *The World Educational Crisis, A System Analysis*, (London: IUP, 1968), p. 8-9

<sup>20</sup> QS. *Al-Mujadilah*, ayat 11.

<sup>21</sup> Lihat Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad 21*, (Jakarta: Al-Husna, 1984), p. 68

<sup>22</sup> A.S. Hornby cs, *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (London: Oxford University Press, 1950), p. 395.

atau pemberdayaan dipakai sebagai istilah dalam kebijakan organisasi management. Bila pemberdayaan tertuju pada pribadi maka berarti proses membangkitkan motivasi daya dari dalam (*intrinsic*) seseorang untuk mampu melaksanakan tugas,<sup>23</sup> dan secara organisasi pemberdayaan berarti agar suatu system berdaya memiliki kesamarakan, kemampuan daya adaptasi dan berkembang dalam hubungannya dengan lingkungan yang berubah,<sup>24</sup> jadi ada suatu keberadaan yang *intrinsic* pada sistem itu untuk memiliki kemajuan, kemampuan adaptasi dan perubahan perkembangan berkelanjutan yang tinggi. Dengan konsep itu ditelusuri kebijakan Pendidikan Islam masa klasik sebagai sistem yang interdependen dengan sistem sosial lainnya, dengan memaknai deskripsi sistematis historis secara interpretative kontekstual dan historis interdependen.

Dalam sejarah telaah berlangsung kebijakan pembaharuan Pendidikan Islam mulai dari pola adoptif, dualistic, adaptif dan integrative. Semua dapat dicirikan sebagai upaya perubahan kualitatif. Hal itu perlu ditingkatkan menjadi kebijakan usaha pemeranan berkualitas (pemberdayaan). Usaha optimasi pembaharuan menjadi pemberdayaan, secara teoritis merupakan suatu gerak perubahan berkelanjutan<sup>25</sup> yang memerlukan arah yang jelas berupa gambaran keberadaan yang akan dicapai sebagai wacana pembandingan yang aplikabel. Keberhasilan dan kesamarakan pendidikan Islam ada priode klasik dapat menjadi wacana pembandingan itu.

Hal-hal yang mendukung kebijakan Pendidikan Islam masa kemajuan klasik itu melalui telaah sistematis historis selanjutnya dapat direfleksikan bagi usaha pemberdayaan ke depan dengan tidak mengenyampingkan kompleksitas situasi kondisi yang berkembang pada masanya.

#### D. Strategi Pembahasan dan Teknik Analisis

Pembahasan didahului dengan mendiskripsikan semua informasi kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Islam dari zaman ke zaman. Pendiskripsian dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan dengan Pendidikan Islam antara satu masa dengan masa yang lainnya dengan

<sup>23</sup> Stephen P. Robins, *Organizational Behavior Concept Controversies and Application*, Inc., 1993), p. 682

<sup>24</sup> *Ibid*, p. 668

<sup>25</sup> Gerak perubahan menurut pandangan teori optimistic "model linear" adalah gerak maju tanpa henti. Lihat Ingemar Fagerlind, at, all, *op-cit*, p.147



mempertimbangkan situasi kondisi historis yang ada secara interdependen dengan menempatkan ayat Al-Our'an sebagai penimbangannya.<sup>26</sup> Pendeskripsian sistematis dilakukan melalui aspek budaya. Hal ini dimaksudkan agar tinjauannya tidak menjadi bias historis.

Setelah itu dilakukan upaya melihat prospektif kebijakan pendidikan tersebut dengan berusaha menangkap dan mengungkapkan pemaknaan dari data historis yang ada dengan interpretatif konstruktif. Berbagai faktor penyebab keberdayaan pendidikan Islam dilatari kondisi budaya dimaknai dengan memperhatikan interaksi yang berlangsung berdasar kontek priode sejarahnya pada saat masa Pendidikan Islam mendapatkan keberdayaannya. Esensi keberdayaan itu dijadikan indikasi pemberdayaan. Hasil analisa itu dirumuskan sebagai indikator-indikator kebijakan pemberdayaan pendidikan Islam. Untuk mendapatkan bagaimana paradigma pemberdayaan Pendidikan Islam ke masa depan lebih dahulu dilakukan studi implikasi pemberdayaan pendidikan secara reflektif kontekstual dengan indikator dari tiap aspek dengan memperhatikan dan mempertimbangkan faktor historis dan perkembangan situasi kondisi yang ada sekarang. Selanjutnya dikonstruksikan aplikasi Pemberdayaan Pendidikan Islam ke masa depan sebagai suatu gagasan prospektif.

### E. Sistematika

Buku ini disusun secara berurutan bab demi bab dengan diawali, bab pertama sebagai bab Pendahuluan, pada Bab ini diungkapkan latar belakang dan perumusan masalah, tujuan dan signifikansi studi, Metode penelitian dan pembahasan, serta sistematika penulisan.

Bab kedua Kebijakan Pendidikan Islam lewat aspek Budaya. Pada bab ini diungkap kondisi budaya masyarakat Islam secara berkesinambungan pada masa ummat Islam mengalami kemajuan. Mengungkapkan berbagai kebijakan yang diambil untuk berlangsungnya Proses terbinanya masyarakat beriman dan berbudaya belajar, kebijakan pembinaan komunitas muslim menjadi *learning society*, pembinaan masyarakat madani (*civil society*) dan kebijakan tentang pengembangan sistem budaya, pengembangan penalaran, penelitian dan musyawarah sebagai basis masyarakat intelektual. Pada bab ketiga dikemukakan kebijakan pranata sosial budaya meliputi kebijakan pengembangan kelembagaan

<sup>26</sup> *Ibid*, p. 176



pendidikan Islam, uraian tentang tumbuhnya Mesjid Khan dan Medrasah, Modifikasi Kuttah-Maktab dan Maktabah dan Perkembangan Majelis Taklim Majelis ilmu dan Observatorium. Selanjutnya bab keempat kebijakan tentang Aktivitas Pembelajaran Masyarakat mengungkap tentang kebijakan *illitracy* (gerakan tulis baca) dan (*compolsory education*) pembelajaran di negeri Muslim, kebijakan tentang transinternalisasi, transekternalisasi dan objektivitas Muatan Islami pada budaya Arab dan pada budaya negeri-negeri Islam. Kebijakan Islamisasi Ilmu Pengetahuan (Integritas diniyah ilmiah dan amaliyah).

Pada bab kelima mengulas seputar kebijakan pendidikan multikultural. selanjutnya pada bab keenam disertakan beberapa konstruksi kebijakan pendidikan Islam.

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM LEWAT ASPEK BUDAYA**



## BAB II

### KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM LEWAT ASPEK BUDAYA

**D**alam perkembangannya, Islam telah dianut berbagai suku bangsa. Keberhasilan itu erat hubungannya dengan keberadaan pendidikan Islam pada masa lalu terutama dalam hubungan dengan aspek budaya. Kurshid Ahmad menyatakan secara umum pendidikan banyak ditentukan atau bersumber dari budaya yang melatarinya.<sup>1</sup>

Dalam pengertian sosiologi budaya adalah sebagai totalitas dari pengetahuan, kepercayaan kesenian, moral, undang-undang, adat istiadat dan kapasitas tertentu dan kebiasaan yang dicapai oleh manusia sebagai anggota masyarakat.<sup>2</sup> Budaya itu sendiri dapat dibagi kepada dua bentuk material atau budaya konkrit dan immaterial atau budaya abstrak.<sup>3</sup>

Dalam mencandrai gejala budaya JJ Honingmann secara leblh spesifik menyatakan wujud budaya itu (a) *Ideas*; (b) *aktivities*; (c) *artifacts*, berangkat dari rumusan itu Koencaraningrat merumuskan wujud budaya sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Kursyid Ahmad, *Basic Principle of Islamic Education*, (Lahore:1978), p. 3

<sup>2</sup> EB Taylor, *Primitive Culture*, (London: Jhon Murray, 1871), p. 21. Lihat pula Ian Robertson, budaya adalah seluruh bahagian-bahagian yang dihasilkan oleh kehidupan masyarakat, Ian Robertson, *Sociology*, (New York: Worth Publisher, Inc, 1981),p. 159.

<sup>3</sup> Material, roda, pakaian, sekolah, pabrik, kota, buku, kendaraan, totem, Immaterial: bahasa, paham, kepercayaan, undang-undang, adat istiadat, mitos, pola keluarga, sistem politik, Ian Robertson, *Ibid*,p. 159.



1. Sebagai kompleks dan ide-ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya.
2. Sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Wujud pertama oleh para sosiolog dan antropolog disebut *cultural system* (sistem budaya) dan kedua disebut *social system* (sistem sosial) dan ketiga *physical system* (budaya fisik)<sup>4</sup> atau oleh Kuntowijoyo disebut dengan simbol budaya<sup>5</sup> maka untuk mengetahui kebijakan Pendidikan Islam lewat aspek budaya pada masa lalu dapat ditelusuri melalui wujud budaya dimaksud: yaitu mulai dari proses pembentukan masyarakat yang berbudaya belajar (kultural sistem), lembaga-lembaga Pendidikan (fisik budaya) dan aktivitas pembelajaran (sosial sistem).

#### A. Kebijakan Membina Masyarakat Beriman dan Berbudaya Belajar

Kegiatan pendidikan Islam sudah mulai sejak Rasul menyampaikan ajaran Islam di Mekah pada tahun 610 M. Tepatnya sejak Rasul menerima wahyu pertama yang memerintahkan manusia untuk belajar dan beriman kepada Allah yang Maha pencipta.<sup>6</sup> Ajaran itu disampaikan Rasul secara genius dan kreatif, mengajak masyarakat merubah sistem budaya dan sistem sosialnya dari *polytheistik* kepada *monotheistik*, dari taklid kepada belajar serta mengembangkan kemampuan membaca secara tersurat-wahyu maupun kompedium ilmu pengetahuan manusia-dan yang tersirat-hubungan manusia dengan sang penciptanya-untuk meningkatkan kualitas kebenaran dan tingkat keimanan. Aktivitas itu terus berlangsung sampai terbentuk masyarakat Islam yang beriman dan berbudaya belajar. Ada tiga pola utama kebijakan Pendidikan Islam dalam mengembangkan masyarakat beriman dan belajar yaitu kebijakan membina masyarakat belajar (*learning society*), kebijakan pembinaan *civil society*, kebijakan pengembangan penalaran, penelitian dan konsorsium ilmiah.

<sup>4</sup> Koentjaraningrat, *Pengetahuan Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1980), p. 186-187.

<sup>5</sup> Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1990), p. 5.

<sup>6</sup> QS. *Al-Alaq*, ayat, 1-5

## 1. Kebijakan Membina Masyarakat Muslim Sebagai *Learning Society*

Wahyu pertama yang diterima Rasul bukan saja dalam arti sempit berarti; membaca dan menulis tetapi juga menjangkau wawasan yang luas meliputi perombakan total kebudayaan manusia yang dekaden yang tergambar dalam kehidupan masyarakat Arab pra Islam yang *polytheistic*, *eksploratif* terhadap kaum lemah, permainan kotor dalam perdagangan, dan ketiadaan tanggung jawab umum dalam masyarakat. Kondisi yang akut itu diperintahkan untuk diganti dengan budaya Islami yang menampilkan gagasan tentang Tuhan Yang Mahaesa yang kepada Nya manusia bertanggung jawab dan usaha usaha untuk menghilangkan ketimpangan sosial ekonomi yang mencolok.<sup>7</sup> Ajaran itu mendapat tantangan yang keras dari kalangan Arab Pra Islam. Karenanya transformasi nilai itu mulai dengan melakukan komunikasi orang per orang dimulai dari keluarga terdekat. Cara ini sebagai bentuk pengajaran awal yang dipandang paling sesuai dengan kondisi pada masa itu. Meski demikian cara ini terus dipakai untuk mendukung dan mengintensifkan pendidikan Islam yang dilangsungkan secara formal<sup>8</sup> dan belakangan berkembang menjadi metode sorogan<sup>9</sup> dan dalam pendidikan keluarga yang diselenggarakan dibawah tanggung jawab kedua orang tua.<sup>10</sup>

Aktivitas pendidikan mulai dilakukan secara massal dengan mengambil tempat di rumah al-Arqam dan menyebarkan informasi melalui jaringan perdagangan setelah Rasul menerima perintah untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran secara terbuka dan masal.<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Kondisi umum masyarakat itu tergambar dalam surat awal al-Quran yang diturunkan di Mekah, lihat Syafii Maarif, "Pendahuluan" dalam Fazlur Rahman, *Islam dan Madrenitas, Tentang Transformasi Intelektual*, (Bandung: Pustaka, 1985), p. 3

<sup>8</sup> Seperti yang dilakukan para penyiar Islam di berbagai wilayah termasuk para pedagang Muslim dan ulama yang menyiarkan Islam di kepulauan Nusantara pada abad I-VII H.

<sup>9</sup> Seperti yang dilakukan para penyiar Islam di Pesantren-Pesantren di Indonesia. Dilangsungkan dengan cara satu persatu guru menghadap guru untuk menerima penjelasan ataupun memperdengarkan bacaannya ataupun hafalannya. Serta dalam pentashihan bacaan atau hafalan al-Qur'an.

<sup>10</sup> Rasul bersabda: Setiap anak lahir dalam keadaan fithrah (suci cendrung bermain) maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan mereka yahudi atau Majusi atau Nashrani". (HR. Bukhari Muslim)

<sup>11</sup> QS. Al-Mudatsir 1-3, lihat Ahmad Syalabi, *History of Muslim Education*, (Libanon: dar al-Khashshaf Publishing Printing, Distributing House, 1954), 30. Lihat juga, al-Tabari, *Tarikh al Umam wa al Mulk*, seri III, p. 2335.



Aktiitas utama Rasul adalah mengajarkan wahyu yang terfokus pada aspek keimanan dan keIslaman. ayat ayat yang diterima Rasul melalui perantaraan Jibril dibacakan dan diminta untuk dicatat/ ditulis sahabat yang ditunjuk sebagai juru tulis sedangkan yang lain diminta untuk menghafal dan mengulang ulang membacanya serta melafalnya sebagai bacaan sholat. pada saat berikutnya Rasul juga mentashih bacaan dan hafalan kaum Muslimin dan membetulkan jika ada hafalan ataupun bacaan yang keliru. Rasul juga memberikan keterangan tentang maksud ayat yang tidak dipahami atau yang mempunyai makna tersirat yang medan semantiknya berbeda dengan budaya serta pengetahuan mereka.<sup>12</sup>

Perintah melafalkan dan menghafalkan ayat ayat suci al-Qur'an ini menjadi aktivitas sehari-hari juga sangat disenangi dan membanggakan karena hal itu sesuai dengan kebiasaan mereka yang senang dan biasa menghafal serta mensenandungkan syair syair yang juga berisi pesan-pesan moral dan puji pujian serta kebanggaan suku. Tampaknya hal ini berdampak luas bagi masyarakat baru ini, dalam pencerahan wawasan dan dalam pola bersikap, berfikir, bertindak, bermasyarakat dan beribadah, yang pada gilirannya membebaskan mereka dari belenggu kebodohan, keangkuhan, kesombongan, kemusyrikan yang selama ini menjadi ciri kehidupan mereka. Kualitas inilah yang membuat masyarakat Islam berbeda sama sekali dengan masyarakat Arab pra Islam.

Aktivitas belajar bagi kaum Muslimin selain menjadi kebutuhan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kualitas iman serta dinyatakan sebagai kewajiban dan ibadah fardu bagi setiap Muslimin dan Muslimat.

Ayat Makiyyah maupun Madaniyyah diturunkan secara berangsur- angsur. Hal ini memberikan peluang yang cukup untuk berlangsungnya proses transformasi, transinternalisasi, dan transekrternalisasi nilai-nilai Islami dalam masyarakat. Kondisi itu makin mantab dengan adanya pembahasan yang intensif dan kontinu bersama Rasulullah dalam memahami makna esensial dan universal ayat serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi

<sup>12</sup> Lihat Syed Naquib Al-Attas, *The Concept of Education in Islam* (Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia, 1980), p. 21.



ini memantapkan pembentukan kepribadian yang *Ethical Quranic Ideas* (masyarakat yang berwawasan moral dan sistem sosial dan budaya Qurani yang utuh).

Pada periode Mekah semua sistem nilai Islam tampaknya telah mengakar dan mempribadi pada setiap individu Muslim dan telah pula dieksternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terbukti dengan kegigihan dan ketangguhan Muslimin dalam mengamalkannya dan ketika menghadapi tekanan fisik maupun psikis yang dilancarkan kafir Mekah. Rasul bersama 100 pengikutnya rela berhijra ke Abbesinia da pada saat yang lain pada jumlah yang lebih besar hijrah ke Taif serta tabah menderita dalam isolasi dan embargo musyrikin dipinggiran kota Mekah.<sup>13</sup> Pada tahun 662 M Rasul membuat suatu keputusan penting menerima tawaran hijrah ke Yastrib. Keputusan itu berangkat dari kesadaran Rasul bahwa Islam tidak untuk kalangan terbatas dan tertantu saja dan tidak bersifat subjektif dan normatif tetapi juga empiris objektif justru itu seluruh sistem nilai Islam harus diaktualisasikan dalam realitas sosial yang luas dan majemuk. Justru itu ditempat baru yng diberi nama Madinah<sup>14</sup> itu suatu era baru dimulai suatu masyarakat beriman dan berbudaya belajar (*learning society*) dalam arti seutuhnya dan senyatanya dalam skopa yang luas meliputi kehidupan berdampingan dengan yang non Muslim, secara intensif terus dibangun kebijakan transformasi, trans internalisasi, trans eksternalisasi dan objektivikasi nilai Islam dalam kehidupan berbudaya dan bermasyarakat.

Langkah utama untuk melaksanakan kebijakan itu adalah dalam bentuk menegakkan kewajiban belajar bagi lak-laki dan perempuan serta diikuti dengan kebijakan pembebasan buta aksara (*illetteracy*), kebijakan dan pengawasan mutu dan standarisasi proses pembelajaran serta kewajiban alih teknologi. Di bawah ini diuraikan inti dari masing-masing kebijakan dimaksud

<sup>13</sup> Lihat Syed Naquib Al-Attas, *The Concept of Education in Islam* (Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia, 1980), p. 21.

<sup>14</sup> Penduduk kota Yastrib atau Madinah setelah kepindahan Rasul terdiri dari komunitas Yahudi, komunitas penganut agama nenek moyang, kaum Nashrani dan masyarakat Islam yang terdiri dari kaum Anshar (asli penduduk Madinah) dari Muhajirin (kaum Muslimin yang berhujrah dari Mekah bersama Rasulullah).

a. Kewajiban belajar bagi pria dan wanita

Aktivitas pendidikan di Madinah makin semarak dan dipusatkan di masjid,<sup>15</sup> demikian juga seluruh kegiatan peribadatan, urusan kemasyarakatan, administrasi pemerintahan dan peradilan.<sup>16</sup> Rasul juga memerintahkan agar di bangun mesjid di setiap daerah Muslim. Kegiatan utama pengajaran di mesjid adalah pengkajian ayat-ayat al-Qur'an meliputi makna esensi, universal dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik ayat-ayat Makiyah yang terfokus pada aspek keimanan, nilai perbuatan dan tanggung jawab manusia; menyangkut berbuat baik serta jahat, pahala bagi yang beriman dan berbuat baik, ancaman bagi yang tidak percaya dan berbuat jahat, riwayat umat-umat terdahulu yang dapat dijadikan teladan<sup>17</sup> maupun ayat-ayat yang diturunkan di Madinah yang lebih menekankan aspek pengalaman dan kemasyarakatan menjadi bahan pembahasan yang serius. Sementara itu ayat-ayat yang mengungkapkan tentang riba tentang prinsip-prinsip kemanusiaan, perbaikan kaum miskin dan tertindas, hukum zakat yang belum teraplikasikan penerapannya dan diberlakukan sebagai hukum sipil yang harus di patuhi masyarakat. Juga menjadi bahagian pembahasan yang mendalam dalam majlis bersama Rasul.

Kondisi ini pula mendorong pembahasan pengajaran di mesjid menjadi makin meluas dan kebutuhan untuk internalisasi dan eksternalisasi serta objektivikasi ajaran Islam dalam realitas kehidupan makin meningkat hal ini menjadikan frekuensi aktivitas pendidikan makin tinggi. aktivitas itu sendiri dalam ajaran Islam merupakan ibadah dan sarana memperkuat iman dan meningkatkan harkat kualitas hidup.<sup>18</sup>

Aktivitas pendidikan itupun dinyatakan sebagai kewajiban tiap individu secara menyeluruh tanpa mengenal batas usia, jenis

<sup>15</sup> Makdisi menyatakan mesjid intitusi pertama dalam Pendidikan Islam, lihat Goerge Makdisi, *iThe Rise of Colleges*, (Edingurgh: Edinburgh University Press, 1981), p. 10.

<sup>16</sup> Sidi Gazalba, *Mesjid Sebagai Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka al\_husna, 1988), p. 151.

<sup>17</sup> Harun Nasution, *Islam Raional, Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1995), p. 26

<sup>18</sup> QS. Al Mujadalah, ayat 11.



kelamin, tempat belajar, objek maupun ruang lingkup. Rasul menyediakan waktu khusus untuk memberikan pengajaran kepada kaum wanita setiap hari Jum'at. Pendidikan juga diikuti oleh masyarakat Islam dari luar kota Madinah.<sup>19</sup> Materi pengajaran juga terbuka untuk pengetahuan yang bermanfaat untuk pengetahuan praktis dan juga membuka kesempatan untuk belajar keterampilan dari non muslim.

b. Kebijakan Masyarakat Mampu Tulis Baca.

Sesuai dengan ayat al-Qur'an yang pertama di turunkan yang memerintah membaca dan menulis maka Rasul telah mengupayakan agar seluruh umat mampu membaca dan menulis. Untuk meralisasi kebijakan ini maka diambil kebijakan agar setiap muslim yang bisa tulis baca mengajari mereka-mereka yang belum bisa tulis baca.

Rasul membebaskan kaum musyrik yang menjadi tawanan peran badar yang bisa tulis baca mengajar 10 orang Muslim. Pada kesempatan lain mendorong untuk belajar tulis baca pada kaum Nasrani Madinah yang memiliki keterampilan baca tulis. Bahkan Rasul memotivasi menuntut ilmu pengetahuan walau ke negeri Cina. Rasul juga memerintahkan untuk mempelajari bahasa Syira dan bahasa Ibrani.<sup>20</sup> Untuk pembinaan masyarakat Rasul jug mengutus sahabat menjadi guru diberbagai suku di luar Madinah.<sup>21</sup>

Pasca Rasul pembinaan masyarakat beriman dan berbudaya belajar tetap menjadi priorits. Para khalifah ar-Rasyidin mengutamakan kegiatan tersebut dengan memerintahkan pendirian mesjid diseluruh negri yang berpenduduk Muslim dan mendirikan baitul mal untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pengajaran ini. Para sahabat menjadi tulang punggung utama pembinaan ini. Mereka bertindak sebagai ulama-ulama yag secara intensif memberikan pengajaran bagi kaum Muslimin dimanapun berada. Diantara yang telah ditunjuk Rasul sebagai

<sup>19</sup> H.H. Bilgrami, *Konsep Universitas Islam*, terjemahan Mahnun Husein (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), p. 19

<sup>20</sup> Munir Mursi, *Tarbiyah al-Islamiah wal Tatawwuruha*, ( Kairo: Dar al-Kutub, 1977), p. 77.

<sup>21</sup> *Ibid*, p 75..

guru dan pemimpin daerah seperti Amr Bin Ash (Mesir), Said Bin Abi Waqash (Kuffah) Abu Musa (Bashrah) mereka melaksanakan dengan sepenuh hati pembinaan masyarakat. Dalam hal ini kompedium pengalaman bersama Rasul dan pendidikan intensif yang mereka terima serta sosok kepribadian Rasul menjadi acuan mereka. Kemampuan maksimal menangkap esensi dan nilai universal ayat serta kreativitas untuk mengaplikasikan dalam realitas kehidupan dimana saja menjadi kunci yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan Islam. Sejarah membuktikan sebahagian besar sahabat-sahabat tersebut mejadi guru besar dalam berbagai didiplin ilmu terutama dalam bidang aqidah hukum Islam/figh, tafsir, hadits, muamalah/sosial dan akhlak. Basrah, Koufah, Madinah, Makah, Damaskud, Mesir menjadi pusat pusat pendidikan Islam yg penting. Pada masa Umayyah (661-750) wilayah Islam meluas menjangkau Andalusia, Afrika, Persia, India, perbatasan Cina dan pengaruhnya sampai ke kepulauan nusantara. Masyarakat Muslim menjadi multi etnis dan multi kultural. Dari forum halaqah yang dipimpin para sahabat itulah ajaran Islam mendapat momentum penyebaran ke seluruh wilayah Islam dan forum itu kemudian melahirkan out put yang banyak diantaranya menjadi guru besar sekapasitas gurunya dan bahkan melebihi. Hampir seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam kegiatan pengajaran pusat pusat pendidikan yang ada. Kaum muda yang mengkhususkan diri menuntut ilmu intensif untuk semua bidang pengetahuan. Para penuntut ilmu itu mengebara dengan bebas dari satu mesjid atau satu guru kepada guru disatu kota ke kota lainnya untuk mendalami berbagai cabang ilmu. Agaknya pola pembinaan Rasul harus mennjadi model dalam pengajaran di halaqah-halaqah tersebut. Kajian kajian berbagai cabang ilmu makin meluas dan mendalam sejajar dengan makin beragam masyarakat pemeluk agama Islam dengan latar belakang budaya yang beraneka ragam.

c. Kebijakan Pengawasan Mutu dan Standarisasi Pembelajaran

Pada abad berikutnya model pentashihan mengalami perkembangan. Khususnya dalam study al-Qur'an dan Hadist tampaknya metode yang dikembangkan rasul untuk sementara melakukan *check and recheck* serta validasi materi yang diajarkan terus dilaksanakan. Berkenan dengan hukum Islam



dan pembelajaran lainnya proses pentashihan digunakan dengan menggunakan ta'liqah (Sylaby). Penggunaan ta'liqah ini mulai bersamaan dengan berdirinya mesjid akademi (mesjid khan/ mesjid yang di lengkapi dengan asrama bagi penuntut ilmu dan para guru/ ulama yang mengajar). Ta'liqah disusun masing-masing syekh berdasarkan catatannya selama belajar, bacaannya serta kesimpulan pribadi dari topik terkait Mahasiswa menyalinnya ketika didiktekan dan banyak pula yang menambahi dengan catatan ide-ide diskusi kelas atau penelitian sendiri, sehingga merupakan refleksi pribadi tentang materi kuliah yang disampaikan syekh<sup>22</sup> Ta'liqah juga dilengkapi persoalan-persalan utama yang menjadi perdebatan pada masanya serta jawaban dari ilmuwan-ilmuwan terkenal terhadap persoalan tersebut.<sup>23</sup> Ta'liqah itu sama fungsinya dengan ta'qilah syaikh/guru dan sangat berharga sebagai rujukan mengajar atau dalam memberikan pandangan dan menjawab pertanyaan serta sebagai sumber untuk acara debat lisan dalam menguji kevalidan tesisnya.

d. Kebijakan Pelaksanaan Penterjemahan dan Alih Teknologi.

Budaya belajar masyarakat makin meningkat kualitasnya ketika bersentuhan dengan budaya-budaya masyarakat yang pernah maju dalam bidang ilmu pengetahuan seperti bangsa Mesir, Persia, yang pernah berkenalan dengan warisan filsafat Greek. Kehausan masyarakat Islam pada ilmu untuk memperkuat keimanan dan meningkatkan kualitas hidup seperti yang diajarkan Islam mendorong para ilmuwan Islam untuk mendalami ajaran Islam dan mengupayakan nilai esensi dan universalitas wahyu agar dapat diaktualisasikan dan memberi konstribusi bagi budaya-budaya yang ada. Dipihak lain budaya tersebut setelah tercerahkan dapat memperkuat dan memperluas wawasan keilmuan dan keimanan Islam meningkatkan kualitas amal shaleh. Untuk maksud itu dengan kemampuan tulis baca yang telah memasyarakat maka gerakan penterjemahan dimulai. Berbagai ilmu warisan budaya kuno (Yunani, Persia, India, Mesir, dan Cina) diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kegiatan penterjemahan ini bagi ummat Islam memberikan masukan guna mendapatkan

<sup>22</sup> Michael Stanton, *op-cit*, p. 44.

<sup>23</sup> George Makdisi, *op-cit*, p. 126.

jawaban dari himbauan al-Qur'an untuk melakukan penelitian, pemikiran mendalam dengan penalaran secara sistematis dan kreatif serta memperhatikan alam semesta. Berbagai metodologi berpikir dan filsafat membuat ayat-ayat al-Qur'an dan mendorong lahirnya penemuan-penemuan dalam disiplin ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan. Demikian juga bekerja teknik pengobatan dan pengolahan bahan kimia serta peleburan logam dan pembuatan kertas telah di pelajari dengan menggunakan ahlinya telah pula di kembangkan di wilayah-wilayah kekuasaan Islam. Kebijakan ini sejak masa Rasul telah diarahkan untuk dapat dikembangkan. Hal inilah menyebabkan kualitas masyarakat Islam sebagai *learning society* berubah menjadi *intellectual society* sehingga masyarakat Islam mendapat kemajuan di segala bidang mulai abad VII-XI.

## 2. Pembinaan Masyarakat Madani dan Pengembangan Budaya Belajar

Hubungan dengan kaum musyirikin pada periode Mekah sangat tegang. Tekanan dalam berbagai bentuk terus menerus dilancarkan bahkan diantara kaum Muslimin banyak yang disiksa dan diteror. Musyirikin Mekah pernah juga mengajak kompromi satu hari menyembah berhala dan sehari berikutnya bersama-sama menyembah Allah secara bergantian.<sup>24</sup> Kompromi ini dengan tegas ditolak Rasul seperti termaktub pada surat Al-Kafirun. Islam mempunyai siakp adanya kebebasan berbeda keyakinan tanpa ada pemaksaan kehendak. Dengan kondisi itu Muslimin mendapat pengalaman langsung untuk menangkap dan mengamalkan makna ayat itu untuk hidup berdampingan secara terhormat dalam perbedaan. Pengalaman hijrah ke berbagi tempat<sup>25</sup> juga menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang kemanusiaan dan perlunya suatu pemahaman tentang kemanusiaan dan perlunya suatu negara yang melindungi warga secara hukum dan berkeadilan dimana setiap orang bebas menjalankan agamanya dan dihormati hak hak pribadi tanpa ada tekanan. Keberadaan dalam Kebersamaan seperi tergambar pada surat al kafirun di atas.

Rasul dan umat Islam menyadari bahwa Islam dikembangkan bukan untuk suatu kekuasaan otoriter tetapi sebagai ikatan batin

<sup>24</sup> Ibnu Hisyam, *Shirah an-Nabawiyah*, vol I, p. 239

<sup>25</sup> Ibnu Hisyam, *Ibid*, vol. I, p. 356-360.



yang normatif tetapi juga empiris (*Rahmatan lil alamin*), yang harus diwujudkan dalam realitas sosial yang luas dan majemuk. Inilah yang menjadi latar Rasul memutuskan hijrah ke Yastrib pada tahun 622 M.<sup>26</sup>

a. Objektifikasi Nilai ajaran Islam

Di Madinah rasul membina kahidupan yang rukun sesama Muslim dengan non Muslim. Setiap individu di tempatkan mengatur dirinya dan bersama sama membina masyarakat dengan bimbingan akhlaq dan hukum. Setiap orang sejajar dan sederajat<sup>27</sup> tanpa ada membedakan ras, suku maupun agama. Islam ditempat sebagi acuan norma dan hukum yang mengatur manusia memenuhi kebutuhan hidup dengan kebebasan dan kesadaran sendiri.

Untuk mengayomi non Musim Rasul melakukan objektivikasi nilai ajaran Islam sehingga esensi dan universalitas ayat dapat diterima sebagai acuan norma dan hukum bagi non Muslim tanpa harus menjadi Islam. Ikatan itu menempatkan semua untuk bertanggung jawab dan saling membantu dalam memulihkan dan menjaga ketertiban dan keamanan serta bela negara. Sebagai pemimpin Rasul menyelesaikan secara adil semua perkara yang timbul dan diajukan kepadanya.

Setiap Muslim menyadari ayat-ayat Madaniyah yang ditujukan kepada masyarakat mukmin berbeda dengan Makiyah di alamatkan kepada manusia tidak berarti adanya diskriminatif. Ayat Madaniyah justru menunjukkan peran Muslim untuk mewujudkan masyarakat madani yang pluralitas dalam semangat kemanusiaan yang universal. Sekaligus menunjukkan tanggung jawab setiap Muslim untuk mewujudkannya. Perubahan kondisi dan peran ini menjadikan pembahasan pengajaran di Mesjid makin meluas tututan internalisasi dan eksternalisasi serta objektifikasi makin besar sehingga pendidikan benar benar dirasakan menjadi kebutuhan utama.

Setiap Muslim berlomba mengakses seutuhnya ajaran Islam demikian pula non Muslim berkepentingan untuk mengakses hal

<sup>26</sup> Ibnu Hisyam, *Ibid*, vol.II, p. 37-38.

<sup>27</sup> QS. Al-Anfal, 5-8, QS. Al Jujurat, 13.

itu agar dapat eksis dalam masyarakat madani yang egliter itu. Dipihak lain dalam bidang kemasyarakatan terutama keilmuan dan peradaban. Secara jelas dalam ayat-ayat yang turun di Madinah dijelaskan bahwa tidak semua orang yang berilmu dengan baik tidak berilmu. Yang berilmu itulah yang akan mengerti dan patuh kepada Allah. Ukuran aplikasi ilmu adalah yang bermanfaat bagi kemashlahatan hidup. Kekayaan bukan harta benda tetapi himpunan amal saleh yang dirasakan banyak orang manfaatnya. ukuran kemuliaan bukan pada pangkat keturunan tetapi pada kapasitas maksimal ketaqwaannya<sup>28</sup> (integritas iman, ilmu amal yang ikhsan) menumbuhkan semangat berprestasi.

b. Monitoring Evaluasi dan Perlindungan

Masyarakat madaniah dengan cirinya tersebut juga dikembangkan selanjutnya oleh Abu Bakar, Umar dan Khulafaur Rasyidun lainnya. Ketika wilayah Islam telah meluas ke Irak, Persia, Siria, Mesir, Umar bin Khattab membentuk majelis Ifta' dan mengangkat hakim di tiap daerah serta mengorganisasi lembaga Hisbah<sup>29</sup> semacam lembaga pengawasan dan perlindungan sosial. Tugasnya meliputi pembinaan akhlak, pencegahan kejahatan ekonomi. Dalam menjalankan tugas lembaga ini mempunyai hak periksa semua alat yang dipakai untuk keperluan umum, menggugat dan menuntut berbagai pelanggaran. Mengarahkan dan mengawasi lalu lintas dan keamanan rumah ibadah dan menyelidiki indikasi kecurangan ataupun penipuan. Status lembaga hisbah juga memeriksa perkara antara qadhi dan muzhalim (pengadilan pejabat yang zalim). Suatu hal yang merusak para pendeta dan guru non Muslim tidak dikenakan jizyah atau pajak jiwa. Tampaknya sejarah mencatat, perlindungan ini berlangsung pada tiap dekade dan dinasti pemerintahan Islam pada masa keemasan Abbasiyah dan bahkan pada masa kerajaan-kerajaan kecil.

Pada masa Umayyah pemerintahan bercorak monarchi dan cenderung Arabisme, pembinaan masyarakat madani

<sup>28</sup> QS. Hujurat, ayat 13.

<sup>29</sup> Al-Khurbutli, *op-cit*, p. 49. Lihat Ira Marvin Lapidus, *Muslim Cities Letter Middle Age*, (Cambridge, 1987), p. 8.



tidak mendapat perhatian sepenuhnya kecuali dalam bidang hukum. Perlakuan diskriminatif tampak tumbuh dalam hal yang berhubungan dengan pemerintahan dan militer. Kaum Mawali tidak diperkenankan turut dalam jabatan penting. Dalam militer ditempatkan dalam pasukan berjalan kaki. Kehidupan yang menghargai kemanusiaan berkembang di bawah pembinaan para ulama. Sehingga lapangan pendidikan non Muslim Arab tetap mendapatkan kesempatan yang sama bahkan lebih menonjol dari Arab sendiri.

### c. Kebijakan inklusifisme

Pada masa Abbasiyah meski corak pemerintahan masih sama bercorak monarki namun pembinaan masyarakat madani mendapat prioritas setiap warga termasuk mawali diberi kesempatan yang sama dalam segala bidang. Non Muslim pun diberi kesempatan untuk turut dalam pemerintahan. Suasana keterbukaan ini menyemarakkan kehidupan ilmu pengetahuan dan peradaban. Non Muslim secara terbuka dapat pula menyampaikan serangan ataupun sanggahannya terhadap ajaran agama Islam berdasarkan pandangannya, demikian pula mawali dapat memahami ajaran Islam berdasarkan cara memahami menurut agama sebelum Islam. Kondisi yang mengarah liberal seperti ini telah menumbuhkan pembahasan yang intens dan mendorong pengajaran dan pembahasan agama makin marak dan berkualitas. Bukan saja untuk mempertahankan dari serangan non Muslim tetapi untuk mendapatkan makna esensi dan universal dan sesungguhnya dari ajaran Islam.

Keterbukaan mendorong usaha penterjemahan makin maju dan menyemarakkan bursa buku serta industri perdagangan dan perbukuan. Kiprah intelektual Muslim dan kajian pembahasan pendidikan Islam pun makin meluas tidak saja berporos pada ilmu-ilmu diniah tetapi meluas mencakup berbagai disiplin ilmu (sejarah, ilmu bumi, obat-obatan, kedokteran, astronomi, matematika, kimia, dan filsafat).<sup>30</sup> Baik sarjana Muslim maupun non Muslim bersama-sama dalam komunitas ilmiah mengembangkan ilmu pengetahuan tanpa perbedaan. Hampir seluruh ulama dan sarjana Muslim pada masa itu bersifat generalis.

<sup>30</sup> Amir Hasan Siddiq, *Op-cit*, p. 64-84. Lihat juga Khurbutli, *op-cit*, p. 246.

Kondisi berubah ketika abad X semangat egalitarian dihambat dan adanya perlakuan diskriminatif dalam pemahaman yang melemahkan masyarakat madani dan budaya belajar.

### 3. Pengembangan Penalaran dan Musyawarah-basis Pembinaan Masyarakat Intelektual

Sejak awal Rasul telah memberikan fondasi yang kokoh untuk mempersubur keyakinan iman, Islam dan budaya belajar dengan memberikan kebebasan penalaran dalam memahami, menafsirkan dan mengaktualisasikan ajaran Islam. Sesuai ayat-ayat al-Qur'an yang membuka selebar-lebarnya proses penalaran dan penelitian serta pembuktian dengan cara ekspresimen maupun observasi. Dalam pola pengajaran Rasul juga selalu membuka kesempatan dialog dan tanya jawab serta memotivasi tumbuhnya kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional atau kepekaan nurani masyarakat dalam memahami ayat serta makna dan pesan global/ weltanschauung yang dikandung ayat.

#### a. Pengembangan Intelektualitas dan Kodifikasi Sumber Nilai

Pengembangan kecerdasan intelektual dan emosional itu diarahkan pula kepada para sahabatnya yang diberikan tugas mengembangkan ajaran Islam ke berbagai daerah. Sebagaimana pengarahannya beliau ketika memberangkatkan Amr bin Ash dan pada ketika lainnya Muaz untuk menjalankan tugas sebagai kepala daerah. Rasul bertanya dengan apa kamu menetapkan hukum Amr menjawab dengan kitabullah. Jika tidak dijumpai? Dengan sunnah Rasul. Jika tidak dijumpai? Dengan penalaran. Rasul puas dengan jawaban melakukan penalaran itu. Dialog ini selalu diangkat untuk menyatakan sistematisasi sumber hukum. Sebenarnya dialog ini bermakna lebih jauh dari itu. Bahwa kebebasan penalaran itu memungkinkan aktualisasi nilai-nilai Islam menjadi berdaya membangun iklim masyarakat yang beriman dimanapun dan pada masa apapun. Dengan ijtihad nilai esensial dan universal ajaran Islam dapat dikembangkan dan mendapatkan dinamikanya.<sup>31</sup> Dengan hidupnya ijtihad ini pada periode selanjutnya melahirkan kebijakan-kebijakan penting yang menambah energi perkembangan agama Islam menjadi agama

<sup>31</sup> Muhammad Iqbal, *Reconstruction of Islamic Thought*, (Lahore, 1960), p. 8.



dunia serta menghantarkan ummat Islam ke puncak kejayaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan berbagai aspek kehidupan lainnya sampai pintu ijtihad dinyatakan tertutup pada abad XI.<sup>32</sup> Selama kurun waktu yang panjang itu Fazlur menyatakan : “begitu wahyu yang mutlak normatif seperti al-Qur’an menjadi mapan, bangsa Arab dengan sendirinya enggan menyimpang dari makna harfiahnya. Hal ini memperkuat penjelasan tentang derajat integritas teks al-Qur’an yang menakjubkan selama berabad-abad itu. Tidak ada keraguan bahwa ulama-ulama dan pemimpin-pemimpin Islam melaksanakan kebebasan dan menunjukkan keaslian yang besar dalam menafsirkan al-Qur’an termasuk prinsip ijtihad (penalaran pribadi) dan qiyas (penalaran analogis) atas teks tertentu al-Qur’an dan berargumentasi atas dasarnya untuk kesamaan-kesamaan pokok tertentu dalam kandungan teks tersebut.<sup>33</sup> Hudgson juga mengungkapkan nilai strategis ijtihad tersebut dalam rangka memahami ijtihad dalam pengertiannya yang luas sebagai penelitian bebas, menurut kerangka aturan yang mapan tentang pengambilan hukum dan norma moral Islam tentang apa yang paling baik disini dan sekarang.<sup>34</sup> Penggunaan ijtihad telah menghasilkan berbagai inovasi dalam kehidupan ummat Islam dan juga dalam pembentukan budaya belajar yang Islami. Beberapa praktek pelaksanaan ijtihad dilaksanakan sendiri oleh Rasul seperti membangun masjid, memerintahkan pencatatan al-Qur’an, memerintah belajar menulis dan membaca dengan menggunakan guru yang non Muslim atau yang belum Muslim serta banyak hal lainnya lagi.

Pada masa khalifah Abu Bakar dikarenakan banyak hufaz gugur dalam perjuangan penyebaran agama dan mempertahankan agama dari serangan musuh timbul kecemasan akan punahnya sahabat yang mendengar lafal ayat-ayat langsung dari Rasulullah. Maka Umar mengajukan usul berdasarkan ijtihadnya untuk segera mengumpulkan semua catatan ayat al-Qur’an dimasa Rasul menjadi satu. Usul ini diterima dan diangkatlah team pengumpul

<sup>32</sup> Harun Nasution, *op-cit*, p. 49.

<sup>33</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: Chicago University, 1982), p. 18.

<sup>34</sup> Marshal G. Hudgson, *The Venture of Islam*, (Chicago: University of Chicago Press, 1974), vol. III, p. 274-276.

ayat-ayat al-Qur'an menjadi satu kesatuan. Selanjutnya pada masa Usman bin Affan (23/644-35/656) kebijakan itu diteruskan dengan memerintahkan menulis ulang dan membukukannya dalam satu kitab yang disebut mushaf al-Qur'an dan dibuat beberapa salinannya untuk dikirimkan kesetiap ibu kota daerah. Selanjutnya disalin pula untuk disebarkan kesetiap masjid. Perintah menulis al-Qur'an pada masa Rasul itu selanjutnya ternyata menjadi sangat penting artinya. Daerah yang luas dengan pemeluknya dari berbagai bangsa dengan adanya mushaf bukan saja pentashihah bacaan dan hafalan dapat diluruskan dengan merujuk ke mushaf tetapi lebih dari itu mushaf pun dapat dipakai untuk menguji keorisinalitasan ayat-ayat yg diajarkan atau dipelajari diberbagai tempat. Tidaklah mengherankan jika ilmu yang paling awal berkembang didunia Islam adalah ulumul al-Qur'an baik cara membaca, menuis, tafsirnya, hukum-hukum yang dikandungnya serta nilai-nilai universal yang dapat dipedomani darinya. Pada tahun 400 H telah pula berdiri Dar al-Qur'an (pusat pendidikan al-Qur'an) di Damaskus<sup>35</sup> yang khusus mengembangkan study tentang al-Qur'an dengan berbagai cabang ilmunya. Pada abad ke VII masyarakat Islam makin meluas mencakup berbagai bangsa mulai dari Afrika, Iran/ Persia, Mesir, Balkan, Asia Tengah, Spanyol sampai perbatasan sungai Indus dan dataran Cina.

Daerah yang luas dengan aneka suku bangsa yang memeluk Islam memerlukan panduan tentang pelaksanaan ibadah serta sikap hidup di samping kitab suci al-Qur'an. Kecendrungan untuk mempelajari hadist makin kuat setelah terjadi pula beberapa pemalsuan hadist untuk kepentingan berbagai kelompok aliran yang tumbuh seiring dengan kontak budaya dengan non Arab. Kebutuhan akan adanya kodefikasi Hadist Rasul makin mendesak agar ada rujukan resmi untuk memilih hadist yang shahih dan hadist yang palsu. Untuk kepentingan itulah Umar bin Abdul Aziz<sup>36</sup> meminta Muhammad bin Shihab al-Zuhri untuk mengumpulkan hadist hadist Rasul.

<sup>35</sup> George Makdisi, *Rise of College, Institution of Learning in Islam and The West*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981), p. 10.

<sup>36</sup> Umar bin Abdul Aziz adalah Khalifah Bani Umayyah ke VII (99/717 = 101/720) perintah pengkodefikasian hadist hadist Rasul ini dilaksanakan pada tahun 100/718.



Upaya ini berhasil membukukan hadis dan menjadi awal bangkitnya disiplin ilmu hadis dan penggerak semangat ilmiah mengadakan penelitian yang mendalam serta lahirnya teknik uji faliditas data dan etika penulisan dengan membuat rujukan dalam setiap komentar ilmiah. Kritik sumber ini kemudian melahirkan ilmu dirayat al-hadits, Musthalah al-Hadits, Rijalul al-Hadits, Jarh wa Ta'dil. Buah perkembangan ini telah berkembang subur pusat pengajaran hadits disebut dengan Dar al-Hadits. Di Ribat, sufi diajarkan melalui pelajaran hadits. Pada abad VI/VII diajarkan pengetahuan gabungan antara study shufi dan hukum Islam.<sup>37</sup> Salah satu yang terkenal di Damaskus adalah *Dar al-Hadits Al-Asyrafiah*. Dengan adanya kodifikasi hadits ini study tentang fiqh makin semarak dan makin berkembangnya mazhab-mazhab. Karena itu Dar al-Hadits banyak terkait dengan mazhab-mazhab tersebut.

Keimanan Islam yang dibangun melalui pengajaran di Mesjid dengan Majelis Ta'lim dan Balaqah,<sup>38</sup> dan cara tadarus, diskusi membahas makna teks dan kontekstualisasi ayat dengan kondisi sosial ekonomi pada masanya, kemudian melahirkan majlis ilmu seperti majlis hukum, majlis al-Waaz, Majelis Tadris, Majelis Fatwa, Majelis Fatwa al Nazar.<sup>39</sup> Pada masa dinasti Abbasiyah majlis-majlis itu berkembang menjadi pusat pengkajian ilmu pengetahuan.

b. Penelitian untuk penguatan keimanan dan kualitas ibadah

Keimanan Islam yang bebas dari unsur mitologis dan sakramentalis memberikan kebebasan untuk mengadakan

<sup>37</sup> George Makdisi, *op-cit*, p. 10.

<sup>38</sup> Beberapa diantaranya khalaqah disebut juga dengan madrasah seperti di Mesjid Umayyah (Damaskus) terdapat 6 Madrasah, lihat G. Makdisi, "Madrasah" dalam C.E Bosworth, at. All, (eds), *The Encyclopedia of Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 1986), p. 1126.

<sup>39</sup> Majelis ilmu adalah merupakan wadah yang mendiskusikan masalah agama dan juga ilmu pengetahuan serta sering pula membahas tentang masalah kedokteran/pengobatan seperti Majelis ilmu yang dipimpin oleh Muwaffaq al din Abd Aziz al Sulaimi (w.604/1207) seorang konsultan hokum dan fisikawan di Damaskus. Majelis Wa'at adalah pertemuan membahas ilmu pengetahuan populer, majlisTadris, membahas ilmu hokum, seperti yang diasuh Abu Said al Hasan bin Abdullah al-Sirafi (w.368/978) Majelis Fatwa: pertemuan yang membahas ketetapan hokum dan keputusan pengadilan. Selain itu ada pula Majelis sastra yang dinamakan majlis adab. Majelis al-Syu'ara, lihat George Makdisi, *op-cit*, p. 11-12.

penelitian terhadap jagat raya dan hazanah semua budaya masa lalu dari berbagai bangsa bangsa (Yunani, Persia, Rumawi, Mesir, Cina, India). Kesemuanya sangat berguna untuk memperkuat keimanan dan memperluas wawasan umat Islam dalam rangka mengemban amanah sebagai khalifah dimuka bumi dan sebagai umat teladan. Muhammad Abduh menyatakan kegiatan ilmu pengetahuan termasuk pencaharian/penelitian dalam pembuktian alam adalah bahagian dari keimanan.<sup>40</sup>

Keterkaitan yang erat antara ilmu dan iman dalam Islam membuat pembentukan masyarakat beriman dan aktivitas pendidikan sebagai sesuatu yang tak terpisahkan. Justru itu pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam kehidupan masyarakat Islam.

#### c. Pengembangan Sistem Musyawarah dan Kebebasan Berpendapat

Disamping pengembangan penalaran Rasul juga mengembangkan prinsip musyawarah dalam setiap memecahkan persoalan kehidupan. Dalam musyawarah berbagai penalaran individual dipertemukan sehingga mendapatkan kualitas maksimalnya. Tentunya musyawarah tidak dapat berjalan dengan lancar bila tidak ada penghormatan dan penghargaan pada kebebasan berpendapat. Untuk itu Rasul menyatakan pendapat yang yang benar dua pahala jika keliru satu pahala hal itu menunjukkan penghargaan pada kebebasan berpendapat.

Prinsip musyawarah ini pernah dilembagakan Khalifah Umar mekanismenya dalam bentuk lembaga Ifta' yang terdiri dari para ulama fuqaha dan hakim. Majlis ilmu pada hakikatnya merupakan lembaga musyawarah bagi berbagai kalangan ilmu dalam membahas pendapat dan penemuan serta kajian kajian terhadap berbagai persoalan yang ditekuni. Karena itu tidak jarang dalam majlis ilmu diadakan debat untuk menguji keabsahan pendapat dan untuk menemukan pendapat yang paling dapat diterima dan memenuhi keabsahan ilmiah dan diniyah.

Dunia Islam mengalami kemunduran dengan dihentikannya mekanisme musyawarah dan kebebasan mengemukakan pendapat dalam berbagai aspek kehidupan baik dalam aspek kehidupan

<sup>40</sup> Muhammad Abduh, *Ilmu dan Peradaban*, (Bandung: CV. Dipnegoro, 1982), p. 32.



bernegara dan aspek hukum serta aspek ilmu pengetahuan. Kemunduran tersebut makin parah ketika pendidikan bersifat eksklusif dan mengembangkan pemilahan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Kondisi ini sebahagian besar disebabkan ada terhentinya mekanisme musyawarah dan kebebasan berpendapat pada priode berikutnya lebih sebagai antiseden dan kebijakan pada masa khalifah Makmun yang pro mu'tazilah. Ketika kekuasaan beralih ke tangan khalifah yang berseberangan dengan mu'tazilah maka kebijakan yang sama dilakukan dengan menyatakan aliran yang muktabar adalah ahlussunnah dan mu'tazilah. Ajaran yang dilarang politisasi pendidikan ini terus berlangsung dan dilakukan oleh para penguasa berbagai dinasti masa berikutnya seperti pada masa pemerintahan di Mesir dan pemerintahan Usmaniyah serta pemerintahan kerajaan Islam lainnya. Perpecahan politik dan berkembangnya paham-paham yang sempit yang berkonspirasi dengan kepentingan penguasa mewarnai pemerintah Islam pada masa tersebut. Kondisi ini pada dasarnya sudah melalui pada masa pemerintahan al-Makmun yang mendeklarasikan mu'tazilah sebagai mazhab pemerintah dan memberlakukan mihnah (peraturan cekal bagi yang menentang paham mu'tazilah) Kondisi kemunduran Pendidikan Islam makin parah dengan melemahnya pusat pusat kekuasaan Islam sehingga keadaan menjadi kacau yang berakhir dengan jatuhnya Baghdad atas serangan Mongol pada 1258. Pengaruh perkembangan tasawuf merupakan faktor lainnya yang memberikan urunan pada kemunduran tersebut. Kemunduran itu semakin parah setelah pintu ijtihad dinyatakan tertutup. Sejak itu Pendidikan Islam dan dunia Islam kehilangan keberdayaannya. Ummat Islam diberbagai daerah mengalami kemerosotan dan satu persatu daerah daerah Islam jatuh kedalam kekuasaan bangsa bangsa Barat yang telah mendapatkan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Walaupun demikian budaya belajar masih hidup dikalangan ummat Islam meskipun lingkup yang sangat terbatas pada pengetahuan agama yang bersifat parsial pada masalah ibadah mahdah saja. Sampai pada awal abad XIX dan baru mulai terdapat tanda -tanda adanya kesadaran dan keinginan untuk memperbaiki keadaan yang parah itu. Beberapa upaya reformasi pun dilakukan para tokoh Islam. Namun masih belum menunjukkan keberhasilannya.

### **BAB III**

## **KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PRANATA SOSIAL BUDAYA**





### BAB III

## KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PRANATA SOSIAL BUDAYA

#### A. Kebijakan Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Mesjid- Mesjid Khan - Mesjid Jami' dan Timbulnya Madrasah

**L**embaga pendidikan seperti Al-Dar semasa di Mekkah kemudian semasa di Madinah dipusatkan di Mesjid terus berfungsi sesuai dengan perkembangan situasi kondisi dan masanya. Seiring dengan meluasnya daerah dan makin banyak jumlah ummat Islam, Rasul menganjurkan untuk mendirikan Mesjid diberbagai daerah. Selanjutnya pada masa Khalifah Umar bin Khatab (13/634-23/644) Umar memerintahkan para gubernur; Amru Bin Ash (gubernur Mesir), Abu Musa (gubernur Bashrah), Said bin Abi Waqas (gubernur Kufah) untuk mendirikan Mesjid dan menganjurkan agar setiap suku mendirikan Mesjid.<sup>1</sup> Dengan demikian pusat pusat belajar semakin banyak. Selanjutnya pertambahan jumlah Mesjid makin meningkat pesat terutama pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah serta dinasti Fatimiyah di Mesir. Peningkatan Mesjid itu bukan saja dari segi kuantitas tetapi juga kualitasnya. Beberapa Mesjid berkembang menjadi mesjid jami' terutama di kota-kota besar seperti Baghdad, Koufah, Damaskus, Bashrah, dan Kairo serta berbagai kota di Persia, Afrika dan Spanyol serta daerah Asia Tengah. Tiga diantara Mesjid Mesjid jami'

---

<sup>1</sup> Ahmad Syalaby, *History of Muslim Education*, (Beirut: Dar al Kashsaf, 1984), p. 48. Lihat Sayyed Hoessein Nasr, *Science and Civilization in Islam*, (New York: Agama Plume Bok From New American Libbrary, 1970), p. 65.

itu sangat menonjol yaitu Mesjid jami' Baghdad, Jami' Damaskus, dan Jami' Kairo. Di Baghdad pada abad XI diantara ratusan mesjid hanya ada 6 mesjid Jami'.<sup>2</sup> Dalam perkembangan kemudian Jami' Kairo bahkan menjadi Universitas Al-Azhar.<sup>3</sup>

Pada abad ke VI H kesadaran masyarakat tentang pendidikan makin meningkat, dan telah menjadi kebutuhan utama. Serjana yang handal produk sistem pendidikan Islam yang memiliki dedikasi tinggi bagi pengembangan keahlian makin banyak. Mereka menumpahkan perhatian pada pendidikan di mesjid-mesjid. Hampir setiap ulama/sarjana memimpin halaqah yang sering pula disebut Madrasah. Di Mesjid Umaiyah Damaskus ada 6 Madrasah, yang namanya mengacu nama ulama yang mengajar.<sup>4</sup> Ulama/ sarjana juga menyediakan rumahnya untuk pembahasan ilmu.

Ulama yang terkenal memiliki murid yang banyak yang datang dari berbagai daerah. Mereka melakukan perjalanan dari Mesjid desa atau kota ke kota lain untuk belajar kepada ulama-ulama terkenal dengan disiplin ilmu tertentu. Lalu lintas para ilmuan muda ini telah menjadi tradisi dari waktu ke waktu makin pesat dan makin banyak jumlahnya. Kondisi ini agaknya yang menjadi pendorong tumbuhnya tempat-tempat khusus menampung mereka seperti yang diprakarsai oleh Badr Ibn Hasanawiyah (w.1015) membangun asrama di kompleks Mesjid. Mesjid berasrama ini merupakan bentuk lembaga baru dalam dunia pendidikan Islam. Dengan adanya Mesjid berasrama ini (Mesjid-Khan/mesjid akademi) kegiatan keilmuan menjadi makin ramai baik penuntut ilmu maupun para guru berdatangan dari berbagai daerah. Menurut catatan yang ditulis Stanton ada 3000 buah Mesjid Khan (mesjid akademi)<sup>5</sup> jumlah ini suatu jumlah yang sangat besar menurut ukuran masanya.

<sup>2</sup> George Makdisi, *op-cit*, p. 13

<sup>3</sup> Mesjid Jami' Al-Azhar di Kairo didirikan pada tahun 360 H oleh Zauhar Al-Shiqli dan pada tahun 378 H beliau menentukan Jami' Al-Azhar khusus untuk memberikan pelajaran dan penyelidikan ilmiah. Sejak itu sampai dewasa ini Al-Azhar telah menjadi Universitas yang terpenting di dunia Islam. Lihat Ahmad Syalaby, *op-cit*, p. 49

<sup>4</sup> Makdisi, "Madrasah" dalam Bosworth at. All (eds), *The Encyclopedia of Islam*, vol. V, New Edition (London: E.J.Brill, 1986), p. 1126.

<sup>5</sup> Stanton mengutip dari George Makdisi On The Origin and Development of The College in Islam and The West, dalam Khalil Semaan (eds) *Islam in The medieval West* (Albany Suny Press, 198), p. 32-33. Lihat Stanton, *op-cit*, p. 37. Lihat juga Makdisi, *op-cit*, p. 32.



Sebagai institusi baru Mesjid Khan member dampak yang besar bagi kemajuan dunia ilmu pengetahuan. Penyediaan tempat tinggal yang menyatu murid dan guru dalam satu kompleks menjadi tradisi Pendidikan tinggi yang mendorong iklim yang makin kondusif untuk kemajuan ilmu pengetahuan terutama dengan terbentuknya komunitas ilmiah. Pengelolaan Mesjid Khan ini didukung sepenuhnya dari dana wakaf termasuk untuk guru peralatan dan juga beasiswa. Peranan Mesjid Khan sebagai lembaga pendidikan tinggi masyarakat mencapai puncak kemajuannya, mesjid-mesjid itu benar-benar menjadi universitas terbuka untuk pengkajian berbagai bidang ilmu pengetahuan.<sup>6</sup>

Dinasti Umayyah di Andalus juga berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dengan pesat. Mesjid Al-Qurthubah difungsikan sebagai universitas berkembang menjadi universitas yang terkemuka menyaingi Al-Azhar di Mesir dan Nizhamiyah di Baghdad.<sup>7</sup> Mesjid sebagai pusat pendidikan dimasa pemerintahan Abdurrahman III (912/300-961/350) tercatat ada 700 buah. Ciri khas mesjid di Andalusia seperti Mesjid-Mesjid di daerah Islam lain seluruhnya mengembangkan pendidikan Islam dan dilengkapi dengan perpustakaan.

Menjelang abad ke V H/XII M terjadi perkembangan baru sebagai konsekuensi makin padatnya kegiatan ilmiah sehingga Mesjid tidak mampu lagi menampung kegiatan ilmiah itu. Fungsi Mesjid sebagai pusat penyelenggaraan ibadah menjadi terganggu. Nizhamul Muluk memprakarsai untuk memisahkan Madrasah dari Mesjid. Sehingga merupakan kampus yang lengkap dan didukung dengan dana wakaf yang kuat. Menurut catatan di Baghdad ada 35 Madrasah dengan gedung yang megah dan indah. Sebelumnya ada juga model Madrasah di Naisyapur namun dari segi administrasi dan kurikulum madrasah itu belum dapat disamakan dengan Madrasah pada abad V H.<sup>8</sup> Bentuk madrasah ini menurut Makdisi

<sup>6</sup> Ahmad Syalaby mencatat beberapa Mesjid yang mengembangkan disiplin ilmu seperti: Ilmu Kalam pada halaqah Hasan Basri di Mesjid Bashrah; Kesusastraan: Majelis Naftawaihi di Mesjid Al Anbariyin, Mesjid Jami' Qurtubah di Spanyol, Mesjid Kufah, Mesjid Bashrah; Ilmu Arud di Masjid Bashrah dan Mesjid Jami' Al-Tulum (Mesir) menggelar disiplin ilmu Tafsir, Hadist, Fiqh, Qirasy, Kedokteran dan Ilmu Hisan. Syalabi, *op-cit*, p. 53.

<sup>7</sup> P.K.Hitti, *History of The Arabs*, (London: Mac Millan, 1955), p. 112.

<sup>8</sup> Richard W. Bulliet mengungkapkan ada beberapa puluh Madrasah diantaranya Miyah Diya dan Madrasah al-Hasan Ali Al-Sibghi dan 39 Madrasah lainnya, *A Study in Medieval Islamic* ( Cambridge: Harvard university Press, 1972), p. 249-255.

merupakan tahap ketiga dari perkembangan kelembagaan pendidikan dalam Islam.<sup>9</sup> George Makdisi menyatakan Madrasah Nizhamiyah, kemudian memberi inspirasi lahirnya *college* di Eropa pada abad ke XIII.<sup>10</sup> Nizamul Mulk bukan yang pertama tetapi sangat berjasa membantu pertumbuhan Madrasah dan membuka era baru pendidikan Madrasah.<sup>11</sup> Beliau membantu pembangunan ratusan Madrasah yang mengajarkan fiqh Mazhab Syafi'i.<sup>12</sup> Adanya gerakan doktrinal ini menyebabkan para ahli memandang kehadiran Madrasah dalam beberapa pandangan :

- a. Sebagai produk aspirasi kelompok intelektual baru yang memiliki obsesi mengoptimalisasikan pendidikan dan dunia ilmu serta mengembangkan profesi keilmiahannya secara lebih sistematis dan terarah. Nekosteen melihatnya sebagai usaha untuk menyiapkan lahan bagi kaum intelektual baru, untuk menciptakan kehidupan yang layak melalui ilmu pengetahuan mereka.<sup>13</sup>
- b. Para penelitian menganalisa bahwa alih peran Mesjid ke Madrasah karena pewakaf lebih menitik beratkan penyerahan wakaf kepada Madrasah karena masjid pada umumnya dibawah yuridiksi khalifah, sulthan, Amir. Sedangkan madrasah dapat sepenuhnya dikontrol oleh pewakaf. Seperti Nizamul Mulk dengan membantu lembaga yang independen seperti Madrasah memastikan dia dapat mengatur kurikulum dan pengangkatan staff serta penggantian pimpinan lepas dari control khalifah.<sup>14</sup>

<sup>9</sup> The Madrasah is the product of three stage in the development of the college in Islam. The Mosque or Masjid, particularly in the designation as the non congregational mosque was the first stage and interaksi functioned in this as a instructional center. The second stage was the Masjid-Khan: complex in which the Khan or hostelly served as a lodging for out of town student. The third stage was the Madrasah proper in which in the function of both Masjid and Khan we re combined in an institution rased on a single wakf deed. Lihat: G. Makdisi, "Madrasah" dalam Bosworth, at. All. (eds), *The Encyclopedia of Islam*, Vol. V, New Edition, (Leiden: E.J. Brill, 1986), p. 1123.

<sup>10</sup> George Makdisi, *Rise of College, Institution of Learning in Islam and The West*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981), p. 232. Lihat juga Makdisi, *Rise of Colleges*, *op-cit*, p. 27.

<sup>11</sup> Lihat Makdisi, "Madrasah", *op-cit*, p. 1126.

<sup>12</sup> Michael Stanton, *op-cit*, p. 38.

<sup>13</sup> Mehdi Nekososteen, *Kontribusi Islam Atas Dunia Intelektual Barat, Deskripsi Analisa Abad Keemasan Islam*, Terjemahan Joko S. Kahar, dkk, ( Surabaya: Risalah Gusti, 1996), p. 66.

<sup>14</sup> Michael Stanton, *op-cit*, p. 38.



- c. Madrasah dipandang anti klimaks dari Mihnah yang dilancarkan oleh kaum Mu'tazilah berkolaborasi dengan khalifah Abbasiyah masa Al-Makmun. Ketika kekuasaan Abbasiyah dibawah control Bani Seljuk maka untuk memotong pengaruh dan kekuasaan Khalifah pada rakyat, maka diperlukan memperkuat aliran yang selama ini tertindas (yaitu paham As'ariyah). Sehingga dengan adanya lembaga Madrasah yang independent ini dapat mensosialisasikan pandangan Ash'ariyah secara massal.

Hal yang sama dijumpai juga dengan kasus Masjid Jami' di kairo oleh Dinasti Fatimiyah dijadikan pusat pembinaan dan penyiaran ajaran Syiah. Baru pada pemerintahan Bani Ayub fungsi Mesjid Jami' Kairo diarahkan menjadi penguruan tinggi beraliran sunni. Yang jelas keberadaan Madrasah sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mandiri lepas dari control pemerintah pada dasarnya dimiliki suatu konsekwensi logis dari perkembangan budaya-belajar dari masyarakat Islam itu sendiri, sekaligus peningkatan dari pelayanan belajar di mesjid yang selalu disebut juga dengan nama Madrasah selama ini perbedaan keduanya sangat tipis.<sup>15</sup>

Kepedulian berbagi kalangan serta tingginya partisipasi dan tanggung jawab masyarakat pada pendidikan adalah sumber potensi utama lahirnya madrasah. Terbukti pada masa berikutnya kalangan bangsawan, hartawan berlomba mendirikan madrasah dengan menyediakan dana wakaf pribadi mereka. Kebanyakan dari Madrasah itu menekankan pelajaran fiqh bahkan fiqh mazhab tertentu saja. Baru pada permulaan abad VII H Khalifah AL-Mustanshiriyah mendirikan Madrasah Al-Mustanshiriyah yang member fasilitas yang sama untuk pengajaran fiqh empat mazhab.<sup>16</sup> Selajutnya muncul pula Madrasah-Madrasah spesialisasi ilmu lainnya. Seperti pada tahun 604 H, Abdul Malik al-Muazhzhah Syarif al-Din (Dinasti Ayyubiyah di Mesir) membangun madrasah khusus Bahasa Arab. Dalam abad ke VII H itu juga di Damaskus berdiri Madrasah-Madrasah yang mengajarkan kedokteran seperti Madrasah Al-Dahlawiyah, Al-Dunsiriyah, al-Labudiyah. Ada juga khusus al-Qur'an dan Hadits yang menggunakan nama Dar al-Qur'an dan Dar al-Hadits. Seperti Madrasah Dar al-Qur'an Dilaniyah (674H). Dar al-shabuniyah (866 H). Dar al-Hadits al-ariyah di Damsyik wakaf Nuruddin Mahmud (569H). Madrasah Al-Hadist ini juga berkembang pada masa Turki Usmani abad XIV (57). Model Madrasah

<sup>15</sup> Makdisi, "Madrasah", *op-cit*, p. 1126.

<sup>16</sup> Makdisi, *Ibid*, p. 1127.

ini kemudian terus berkembang di seluruh negeri-negeri Muslim seperti di India, Pakistan, dan Indonesia.

Di Indonesia lembaga pendidikan bentuk Madrasah muncul pada awal abad ke XX bersamaan dengan gerakan pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia. Berdirinya Madrasah di Indonesia ini oleh Pijper disimpulkan madrasah lembaga baru pendidikan Islam yang memiliki ciri-ciri mempunyai perpustakaan yang tergabung dalam bangunan yang sama, menggunakan manuskrip bagi mahasiswa, memberikan beasiswa. Stanton menyatakan keberadaan madrasah mirip dengan college. Pola ini adalah asal muasal asrama dan penyediaan tempat tinggal bagi ilmunan-ilmuan miskin di universitas universitas-praktek yang pada abad pertengahan Barat, berurat berakar kuat di Paris, Oxford dan Cambridge.<sup>17</sup> Tampaknya di Andalus model Madrasah tidak terkenal mungkin salah satu faktornya karena di daerah ini kebanyakan masyarakat Muslim bermazhab Maliki yang berpendapat bahwa yang berwakaf tidak berhak mencampuri urusan pendidikan, mengangkat Mudarris atau untuk mengangkat diri sendiri sebagai pengelola.<sup>18</sup> Sehingga peran swasta kurang dan peranan membangun perguruan tinggi lebih banyak berada pada khalifah seperti perguruan tinggi di Granada, Sevilla, dan Cordoba. Keikut serataan para hartawan tidak seperti daerah Abbasiyah, Fatimiyah ataupun masa Ayyubiyah di Mesir. Meskipun Madrasah muncul sebagai lembaga pendidikan tinggi di berbagai daerah namun sepanjang abad XI dan XII, Mesjid-Mesjid Khan masih tetap merupakan lembaga tinggi yang dominan.

Pada akhir abad XI dengan berdirinya Madrasah Mustansiriyah yang dikemukakan terdahulu telah terjadi suatu transisi baru dalam perkembangan kelembagaan pendidikan tinggi Islam. Lembaga-lembaga pendidikan yang kecil dipimpin oleh seorang Syaikh di beberapa kota telah tumbuh menjadi lembaga pendidikan tinggi yang besar dan lebih kompleks. Madrasah-Madrasah yang didukung dana wakaf yang besar cenderung mencakup pengajaran lebih dari satu mazhab. Kecenderungan untuk menjadi lembaga pendidikan bidang hukum pada madrasah-madrasah masa itu sangat menonjol. Meskipun pada masa berikutnya tumbuh madrasah-madrasah khusus namun penekanan itu masih mewarnai proses pendidikan di dalamnya.

<sup>17</sup> Michael Stanton, *op-cit*, p. 39.

<sup>18</sup> *Ibid*.



Suatu hal yang menarik menurut Stanton: kecuali al-Ghazzali, ilmuwan ilmuwan pada zaman itu mengembangkan kariernya di lembaga lembaga non formal tidak di Mesjid-Khan ataupun Madrasah.<sup>19</sup> Sampai sejauh itu Madrasah dan Mesjid serta Mesjid -Khan dengan Model Khalaqah dan Majlid Ta'limnya memfokuskan pengajaran pada ilmu agama dan al-Qur'an pada porosnya. Disiplin-disiplin yang perlu untuk memahami dan menjelaskan makna al-Qur'an tumbuh sebagai inti pelajaran yakni hadits lalu Tafsir. Disamping itu logika dan gramatika di ajarkan melatar belakangi disiplin hadits dan tafsir selain juga tergantung pada pengetahuan sejarah, geografi serta kesadaran umum tentang sistem pemerintahan dan sistem sosial. Ilmu-ilmu agama tidak mungkin diajarkan secara terpisah dan karenanya semakin banyak ulama mempertimbangkan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu dalam menafsirkan al-Qur'an dan hadits.<sup>20</sup> Kesadaran itu tampak jelas pada madrasah Mustanshiriyyah yang didirikan di Baghdad pada tahun 1234. Bayard Dodge menyatakan di Madrasah ini mahasiswa diberikan mata pelajaran tidak hanya bahasa, hukum, dan ilmu agama tetapi juga ilmu hitung, dan cabang cabangnya, ilmu survey pertanahan, sejarah, sastra, kesehatan, pemeliharaan hewan, ilmu tumbuh-tumbuhan dan fase-fase sejarah alam.

Disamping itu diberikan pula kursus kursus pengobatan dibawah bimbingan seseorang ahli faal tubuh.<sup>21</sup> Bayard juga mengutip catatan tentang jumlah madrasah-madrasah pada abad XIV, ada 10 madrasah di Afrika Utara, sejumlah madrasah di Persia, Afganistan dan Asia Tengah. Zyahdah menulis dalam *Encyclopedia of Islam* pada abad pertengahan ada 73 madrasah di Damaskus, 41 di Yerussalem, 40 di Baghdad, 14 di Aleppo, 13 di Tripoli, 9 di al-Mausil (Mosul), 74 di Cairo, ditambah sejumlah yang tidak terhitung diberbagai kota lainnya.<sup>22</sup> Model madrasah kemudian berkembang diberbagai daerah Islam pada abad-abad selanjutnya.

## B. Modifikasi Kuttab ke Maktab dan tumbuhnya Maktabah

Dari hari ke hari kegiatan belajar menulis dan membaca makin marak, kondisi ini menumbuhkan institusi tempat belajar menulis dan membaca

<sup>19</sup> *Ibid.*, p. 42.

<sup>20</sup> *Ibid.*, p. 43.

<sup>21</sup> Bayard Dodge, *Muslim Education in Medieval Times*, (Washington, D.C.: The Middle East Institut, 1962), p. 23.

<sup>22</sup> Bayard Dodge, *Ibid.*

yang pada masa Rasul disebut Kuttab. Kegiatan ini diselenggarakan di rumah para guru ataupun tempat khusus seperti halaman Mesjid ataupun dilapangan. Kutab berlangsung terus diikuti oleh seluruh anak Muslim, kemudian mengalami modifikasi perluasan materi bukan sekedar kegiatan tulis baca saja tetapi juga untuk belajar membaca al-Quran. Modifikasi ini diperkirakan mulai setelah jumlah hufaz yang pandai menulis dan membaca semakin banyak. Stanton memperkirakan setelah salinan al-Quran tersebar luas.<sup>23</sup> Selanjutnya ketika daerah kekuasaan Islam semakin meluas Kuttab disebut juga Maktab berfungsi sebagai pendidikan dasar yang memberikan pelajaran membaca, menulis, aritmatika dan al-Quran sebagai pelajaran inti lainnya adalah bahasa Arab. Dengan adanya al-Quran tertulis pelajaran bahasa Arab lebih dipentingkan dalam pendidikan dasar.<sup>24</sup>

Pengajaran menulis dilakukan dengan menggerakkan jari menuliskan pelajaran mereka diatas pasir dan kemudian lempengan dari tanah liat menjadi populer sampai dengan masuknya kertas dari Timur pada abad ke VIII maka mereka dapat menyimpan catatan mereka dalam bentuk manuskrip. Karena tradisi oral yang panjang maka pendidikan pun mendorong siswa untuk menghafal al-Quran dan sebanyak mungkin pelajaran lainnya.<sup>25</sup>

Berdasarkan catatan Ibnu Khaldun tampaknya penekanan materi pengajaran disesuaikan dengan kebutuhan menurut pertimbangan ulama/guru setempat. Ibnu Khaldun mencatat adanya perbedaan penekanan materi pengajaran kuttub itu : (a) sangat menekan tulis baca baru diprioritaskan pada pelajaran ontografi (mengenal) bentuk kata dalam hubungannya dengan bunyi bacaan seperti kutab kutab di Maghribi; (b) menekankan pada kemampuan menulis dan membaca puisi dan bahasa Arab al-Quran tidak diutamakan seperti Kutab di Andalus; (c) menekankan bacaan (*qiraat*) dan kaligrafi, hadist dan peraturan masalah agama, Kuttab-kuttab di Afrika Utara.<sup>26</sup>

Makin banyaknya yang mampu tulis baca dan mengikuti pengajaran, mendorong masyarakat untuk mengetahui berbagai macam

<sup>23</sup> Berdasarkan perkiraan Stanton ini, maka modifikasi Kuttab baru terjadi setelah Khalifah Usman menyebarkan salinan Mushaf al-Qur'an ke tiap daerah yaitu pada tahun 644 M, lihat Stanton, *op-cit*, p. 15.

<sup>24</sup> Stanton, *op-cit*, p. 17.

<sup>25</sup> Stanton, *Ibid*.

<sup>26</sup> Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, *op-cit*, p. 397-399. Lihat Ahmad Syalagi, *op-cit*, p. 23.



ilmu pengetahuan yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Arab dan bahkan dengan ditemukan cara membuat kertas pada abad ke VII berbagai manuskrip dapat dibeli di toko-toko buku. Dengan tersedianya potensi-potensi ini menyebabkan makin banyak pula para hartawan memiliki buku dalam jumlah yang besar. Kecintaan pada ilmu pengetahuan yang telah membudaya mendorong mereka untuk membuat tempat buku yang disebut dengan Dar al Kubra atau Maktabah (perpustakaan). Memiliki buku bagi mereka suatu kebanggaan.

Para ilmuwan dan bangsawan juga membuat Maktabah(perpustakaan) pribadi yang dibuka untuk umum. Dengan fasilitas seperti itu masyarakat Islam bukan saja merupakan masyarakat belajar (*learning society*) tetapi juga telah beralih menjadi masyarakat ilmiah (*intellectual society*). Maktabah-maktabah yang besar dan lengkap dibangun di Baghdad didirikan baitul hikmah sedangkan di Cairo berdiri pula Darul Hikmah di Andalus berdiri perpustakaan al-Hikam.

Demikian pula diberbagai kota-kota besar Islam berdiri pula Maktabah-Maktabah yang berisi kitab-kitab dalam jumlah besar. Perpustakaan Hakam milik al-Hakam yang memerintah di Andalusia (961-976) tidak kurang dari 400.000 buku.<sup>27</sup> Buku itu dikumpulkan bertahun-tahun diantaranya dengan memberi hadiah kepada penulis naskah misalnya Abu al-Faraj al Ashfihani (897-966M) dihadiahi 1000 Dinar atas naskah 20 jilid karya sastra.<sup>28</sup> Di Cordoba saja menurut Sumer P.K. Hitti ada 70 buah perpustakaan dan toko buku yang tak terhitung jumlahnya.<sup>29</sup> Pada periode berikutnya hampir semua Madrasah memiliki perpustakaan sedangkan di Andalus semua Mesjid memiliki perpustakaan.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Stanley Lane Pole, *The Moors in Spain*, (Beirut: Khayate, 1967), p. 155.

<sup>28</sup> Lihat, Muhyiddin al Kayyat, *Durus al-Tarikh al-Islamy*, jilid III, (Beirut: Dar al Fikri, tt.), p. 51-52.

<sup>29</sup> P.K.Hitti, *op-cit*, p. 168-169.

<sup>30</sup> Syalabi mengklasterkan perpustakaan itu ke dalam tiga kelompok, (a) Pesantren Umum seperti: Baitul Hikmah di Baghdad, Al-Haidaiyah di AnNajaf, Ibnu Sawwar di Bashrah, Sabur (dar al-Ilmu) dari Baghdad. Perpustakaan kitab-kitab wakaf di Mesjid Al Zait, Darul Hikmah di Cairo, Perpustakaan di seklah-seklah, (b) Perpustakaan Seni Umum seperti Oeroustakaan Nashir li Dillah, Mustha'shim billah, perpustakaan Khalifah-khalifah Fatimiyah, (c) Perpustakaan Pribadi seperti Al-Fat al Chaqari, Ibnu Ishaq, al Muwaffaq, lihat Syalabi, *op-cit*, p. 95-111.

### C. Majlis ilmu, Bimaristan dan Observatorium

Lembaga pendidikan formal pada masa kemajuan Islam adalah mesjid, mesjid jami, mesjid Khan. Pendidikan di lembaga ini lebih terfokus pada ilmu Naqliyah. Beberapa metode berfikir telah dipergunakan dalam pengajarannya. Sedangkan ilmu-ilmu Aqliyah ditekuni diberbagai majlis ilmu yang berdiri di Bagdad dan juga di kota-kota lainnya. Majlis-majlis ilmu ini didirikan oleh kalangan ilmuwan, saudagar, bangsawan, gubernur, yang umumnya saling berusaha mendapatkan pengakuan dengan tampilnya para ilmuwan dengan kecanggihan pembahasan yang dilakukan dalam majlis mereka. Mereka yang diundang menghadiri mewakili cendekiawan, ahli astronomi, matematika, filosof, teolog, pemimpin agama, pejabat serta politisi sangat berminat mengikuti kegiatan majlis yang terunggul terutama undangan dari gubernur atau khalifah.<sup>31</sup> Ilmu-ilmu yang dibahas selain untuk menguji kebenaran, keabsahannya menurut Islam juga pada majlis itu terjadi proses integrasi dan transformasi nilai dalam kerangka Islam. Sehingga yang paling sesuai dan diterima keabsahannya oleh semua kalangan itulah yang dikembangkan. Pada masa kemajuan awal ini umumnya para ilmuwan memiliki pengetahuan yang generalis.

Minat yang tinggi pada ilmu sebenarnya telah ada sejak masa Rasul. Pada masa Umayyah telah juga ada usaha penterjemahan beberapa bidang ilmu namun frekuensinya makin besar setelah masa Abbasiyah. Penterjemahan masa Khalifah Bani Umayyah mengandalkan komunitas ilmuwan Syria terutama dalam ilmu kedokteran.<sup>32</sup>

Sejak tahun 638 H, ilmu pengetahuan yang diterjemahkan oleh ilmuwan Kristen Nestoria yang mahir berbahasa Syria. Kemudian Khalid putera Yazid anak kedua Khalifah Umayyah (680-683), tertarik pada astronomi dan kemudian memerintahkan mentasrif (menterjemahkan) astronomi yang berbahasa Yunani dan Syiria ke dalam bahasa Arab.<sup>33</sup> Bahkan kegemarannya meluas ilmu kimia juga diminta untuk diterjemahkan. Usaha ini selain untuk keperluan praktis juga berawal dari perasaan ingin mengenal perangkat ilmu pengetahuan bangsa yang pernah maju yang daerahnya masuk teritorial Islam serta mempertajam

<sup>31</sup> Michael Stanton, *op-cit*, p. 126.

<sup>32</sup> Karena praktek pengobatan dengan pendekatan natural yang rasional (bias dipelajari dengan aqal) lebih sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan setiap penyakit ada obatnya dan menolak cara pengobatan yang mengandung syirik.

<sup>33</sup> *Ibid*, p. 64.



perangkat intelektual guna mempertahankan keimanan Islam yang baru menghadapi agama-agama lain yang para pemeluknya sudah terlatih dengan filsafat dan dialektika Yunani.<sup>34</sup> Selain itu faktor paling mendasar adalah dorongan murni ajaran Islam yang secara terus menerus memotivasi ummat Islam untuk mengetahui seluk beluk alam semesta dan perintah memanfaatkan, melestarikan sebaik-baiknya alam tempat hidup manusia untuk kemashlahatan manusia. Seluruh aktifitas keilmuan adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Maha Pencipta.

Ajaran ini mendorong para ilmuwan Islam untuk mendirikan majlis ilmu untuk mengkaji secara mendalam semua manuskrip dari berbagai bangsa tersebut. Seperti apa yang dilakukan Muwaffaq al-Din Abd al-Aziz Al-Sulami (w. 604/1207) seorang konsultan hukum, ahli fisika di Damaskus memimpin langsung Majlis Ilmu dirumahnya untuk study obat-obatan,<sup>35</sup> dan juga melakukan mubahasah, penelitian serta pendidikan dan pelatihan.

Pusat kegiatan ilmiah (Majlis Ilmi) ini dapat di rumah, toko kitab-toko kitab, perpustakaan, rumah sakit, atau di observatorium. Selain kegiatan yang dikemukakan di atas di Majlis Ilmi juga dilakukan kegiatan meneliti dan menskema perputaran benda-benda langit.

Ada juga Majlis Ta'lim yang terorganisasi ke dalam sistem, yang terstruktur mencari ataupun mendapat bantuan dari khalifah, Amir ataupun Gubernur.<sup>36</sup> Majlis-majlis ilmi ini juga sebagai pemasok ide atau saran pada patronasinya dalam berbagai masalah yang diperlukan. Majlis ilmu yang didirikan khalifah adalah suatu Majlis Ilmu yang paling bergengsi, dilengkapi dengan perpustakaan yang terlengkap dan juga observatorium yang terbesar. Seperti Majlis Ilmi di Istana Khalifah Harun Al-Rasyid berkembang menjadi pusat study ilmu pengetahuan yang terkenal dengan nama Dar Al-Hikmah. Melalui Dar al-Hikmah beribu-ribu buku diterbitkan dan diterjemahkan.

Disamping itu khalifah mengadakan Majlis khusus yang disebut Majlis Sastra yang terikat dengan adat istiadat dan tata krama kerajaan.

<sup>34</sup> *Ibid.* p. 122.

<sup>35</sup> George Makdisi, *Rise of College*, *op-cit*, p. 11.

<sup>36</sup> Bentuk ini baik di Baghdad maupun di Damaskus cukup berkembang, pada masa kemudian bahkan terkenal sebagai kebanggaan kalangan penguasa dan kelompok bangsawan derajat dan popularitas serta prestise seseorang akan terangkat bersama dengan adanya Majlis ta'lim, perpustakaan pribadi ataupun karya keilmuan yang dibinanya. Lihat Ahmad Syalaby, *op-cit*, p. 78. Lihat juga Stanton, *op-cit*, p. 143..

Majlis ini dihadiri oleh kalangan ilmunan yang sangat tinggi prestasi dan prestisius. Mereka berdiskusi membahas berbagai persoalan yang diajukan khalifah baik persoalan agama maupun pemerintahan. Fungsi lain dari Majlis ini juga memberikan masukan kepada khalifah dalam menjalankan pemerintahan dan umumnya selalu bersifat tak langsung. Karena selain kepala pemerintahan khalifah juga sebagai imam yang selalu diminta keputusannya tentang berbagai persoalan agama.

Hampir seluruh ilmunan Islam memimpin majlis Ilmi ataupun halaqahnya masing-masing. Melalui Majlis itulah karya-karya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd tersebar luas ke seluruh penjuru wilayah pemerintahan Islam.<sup>37</sup> Rumah sakit (Bimaristan) dan juga observatorium juga tempat diselenggarakannya Majlis Ilmu ini. Dari Majlis ilmu ini dihasilkan pula ilmunan-ilmuan muda yang diberi ijazah oleh Syaikh sebagai tanda ia telah mampu mengajarkan kitab tertentu yang berkenaan dengan disiplin ilmu tertentu. Untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya ataupun memperluas wawasan dapat saja ilmunan muda itu mengikuti halaqah lainnya dalam disiplin ilmunannya pula. Sehingga terjadi jaringan mobilitas penuntut ilmu maupun para ilmunan ke berbagai pusat-pusat pengajaran ilmu pengetahuan yang ada di wilayah Islam, terbentang dari Madinah, Makah, Damaskus, Koufah, Bagdad, Persia dan pusat study di Laut Tengah dan kota-kota di Andalus.

Pada Majlis Ilmu itu ilmu non Islami terus menerus diperbincangkan dan diperdebatkan untuk menguji kebenarannya dan kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Tesis-tesis ilmu pengetahuan yang benar-benar telah terimplisitkan nilai moral Islami itulah yang diterima dan dikembangkan. Justru itu pada masa klasik tidaklah suatu yang luar biasa seorang ilmunan Islam adalah pakar hukum, ahli tafsir, ahli hadits, tetapi juga ahli fisika, astronomi, kedokteran dan berbagai cabang ilmu lainnya.

Minat yang tinggi terhadap bidang kedokteran yang ditunjukkan oleh Khalifah Yazid dan juga para ulama Islam sebagai cabang ilmu pengetahuan yang dapat mendukung membebaskan manusia dari sikap kemusyrikan atau keyakinan kepada ada daya magis yang menguasai manusia yang menimbulkan penyakit yang jelas bertentangan dengan keyakinan Islam sebagaimana ditunjukkan Rasul pada masa hidupnya<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Stanton, *op-cit*, p. 125.

<sup>38</sup> H.H. Bilgrami, *op-cit*, p. 18.



telah mendorong perkembangan ilmu kedokteran di dunia Islam dan semangat untuk mendirikan pusat-pusat penyelidikan dan pengobatan. Para ilmuwan kemudian mendirikan Bimaristan (rumah sakit). Diantaranya ada yang bermula dari Majlis Ilmi dan ada pula atas prakasa ilmuwan dan juga atas dukungan Khalifah. Bimaristan dilangsungkan juga majlis ilmu dan juga sistem pelatihan untuk dokter muda. Salah satu Majlis Ilmu yang terbesar adalah Majlis Ilmu yang dilangsungkan di Istana Abbasiyah, dilengkapi pula dengan perpustakaan dan juga observatorium.

Meskipun kegiatan majlis ilmu dan juga Bimaristan serta observatorium oleh sementara ahli dipandang sebagai lembaga pendidikan non formal yang tidak memfokuskan pengkajian pada ilmu-ilmu agama. Namun bila melihat para ilmuwan masa itu juga menguasai bidang kajian agama. Adanya tradisi ilmiah yang tidak memisahkan kajian itu serta keyakinan masyarakat ilmiah bahwa seluruh kajian adalah untuk memperkuat keimanan itu memperluas kemampuan mengaktualisasikan ajaran Islam baik dalam meningkatkan kualitas ibadah maupun amal shaleh. Sesungguhnya keduanya menjadi terintegrasi secara padu.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PEMBELAJARAN MASYARAKAT**





## BAB IV

### KEBIJAKAN

### PEMBELAJARAN MASYARAKAT

#### A. Gerakan Tulis Baca dalam Pendidikan

**B**udaya Arab pra Islam adalah budaya lisan karena itu seluruh khazanah informasi yang pernah di terima agar dapat di ungkapkan dengan baik menghendaki daya ingatan yang jelas dan setia. Pada masa itu dikalangan masyarakat Arab menulis dipandang rendah, hal ini menjadikan masyarakat Arab terkenal sangat kuat hafalan dan daya ingatannya. Ketika mereka menjadi muslim kompedium keterangan Rasul-wahyu dan penjelasan tentang wahyu, jawaban Rasul atas pertanyaan yang di ajukan kepadanya, keputusan Rasul terhadap berbagai kasus yang timbul seluruhnya di hafal dengan baik ayat perayat maupun maknanya.<sup>1</sup>

Namun ayat-ayat al-Qur'an yang pertama diterima Rasul secara jelas dan tegas memerintahkan untuk membaca dan menguasai keterampilan tulis menulis sebagai dinyatakan dalam firman surat al-alaaq 1-5. Ayat ini bukan saja suatu kewajiban membaca, tetapi juga merupakan perombakan terhadap kemapanan tradisi dan sekaligus tonggak sejarah yang baru dalam kehidupan manusia. Aplikasi pertama dari ayat ini diwujudkan Rasul dalam perintah dalam menulis semua ayat-ayat yang diwahyukan. Beberapa sahabat Rasulullah yang pandai menulis bertindak sebagai juru

---

<sup>1</sup> Fazlur Rahman menyebutkan hal itu sebagai bagian dari proses internalisasi eksprensial, membedakan tahapan masaTabiin yang lebih dominan, dominasi intelektual. Lihat Fazlur Rahman, *op-cit*, p. 23

tulis.<sup>2</sup> Ayat-ayat itu ditulis diberbagai benda yang tidak mudah hilang/ rusak, seperti pada batu, tulang, pelepahan kurma dan sebagainya. Umumnya yang memiliki keterampilan tulis menulis itu adalah yang memiliki kepentingan dalam dunia perdagangan. Mereka belajar terutama di negeri Hajran dan beberapa negeri lainnya yang termasuk dalam jaringan perniagaan mereka.<sup>3</sup> Ahmad Syalabi mengutip Futuhul Buldan yang ditulis AL Balazduri bahwa orang yang mula-mula mengajar menulis sebagai mata pencaharian di Arab adalah seorang dari Wadil Qura.<sup>4</sup> Karena budaya Arab pra Islam adalah budaya lisan, kepandaian ini menjadi tidak populer sampai ketika Islam disiarkan orang Quraisy yang pandai tulis baca hanya berjumlah tujuh belas orang saja.<sup>5</sup>

### 1. Gerakan Tulis Baca dan Penggunaan Tenaga Non Muslim

Selain memerintahkan untuk menulis setiap ayat al-Qur'an Rasul juga memerintahkan agar belajar tulis-baca. Untuk mendukung program ini Rasul membuat kebijakan "memberikan kesempatan bebas bagi tawanan yang pandai menulis membaca sesudah mengajar tulis baca minimal sepuluh orang orang muslim". Dengan kebijakan ini jumlah orang muslim yang pandai membaca dan menulis menjadi meningkat. Selain itu menjadi kebijakan pertama dalam Islam untuk menggunakan alih teknologi dari non muslim. Pemakaian tenaga non muslim<sup>6</sup> berlanjut sampai jumlah hufaz al-Qur'an mampu tulis baca cukup banyak dan mampu mengganti fungsi itu.

Ketika budaya belajar telah berkembang pesat berkat keterampilan baca tulis dan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan kualitas pribadi/ masyarakat meningkat. Minat untuk mengetahui segala macam informasi tertulis makin besar demikian pula

<sup>2</sup> Tugas menulis wahyu ini diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, Usman bin Affan, Ubay bin Kaab dan Zaid bin Sabit.

<sup>3</sup> Diantara penduduk Mekah yang mula-mula belajar huruf Arab adalah Syufyan Ibnu Umayyah Ibnu Abdy Syam, Abu Qais Ibnu Abdi Manaf Ibnu Zuhra Ibnu Kilab. Lihat Ibnu Khaldun, *op-cit*, p. 293-294.

<sup>4</sup> Ahmad Syalabi, *op-cit*, p. 33.

<sup>5</sup> Mereka merupakan kalangan bangsawan dan pedagang Quraisy. Diantaranya kemungkinan ada yang masih menganut agama Ibrahim dan kalangan ahli kitab.

<sup>6</sup> Ahmad Syalabi menyatakan, sudah menjadi kebiasaan pada masa awal Islam belajar menulis membaca ini berguru kepada orang yang bukan Islam karena merekalah yang memiliki keterampilan ini. Lihat Ahmad Syalabi, *op-cit*, p. 35.



ketika persentuhan dengan budaya bangsa-bangsa yang wilayahnya teritorial Islam mendorong untuk memahami sekaligus menguasai perangkat intelektual mereka. Pada masa Umayyah sekitar 638 H, penterjemahan manuskrip kedokteran yang berbahasa Syria kedalam bahasa Arab mulai dilakukan. Langkah ini dilanjutkan oleh Khalid anak Yazid Ibn Walid yang gemar dengan astrologi. Ia meminta Stephen menterjemahkan kebahasa Arab berbagai buku tentang Astronomi yang berbahsa Yunani dan Syria.<sup>7</sup> Kegemarannya ini berlanjut pula pada ilmu kimia yang diminta pula untuk diterjemahkan kegiatan penterjemahan ini terus berlanjut pada masa Khalifah berikutnya walaupun frekuensinya berbeda-beda.

Pada masa Harun Al-Rasyid dan Al-Makmun (khalifah pada masa Abbasiyah) gerakan penterjemahan ini makin hebat dan berbagai disiplin ilmu dari berbagai bangsa telah diterjemahkan. Untuk kegiatan ini khalifah membangun baitul Hikmah salah satu departemennya adalah lembaga penterjemahan yang dipimpin oleh seorang kristen Nestorian bernama Ishak Ibnu Hunayan (809-873). Sampai akhir abad ke IX hampir semua karya-karya yang diketahui dari masa Helenistik telah tersedia bagi ilmuan-ilmuan Muslim.

Selain karena aktivitas belajar tulis baca, adanya gerakan penterjemahan berdampak makin ramainya kegiatan ilmiah dan muncul kebutuhan baru yaitu bahan yang praktis untuk menulis kitab-kitab ataupun menyalin menuskrip-menuskrip itu. Menggunakan daun papyrus tidak efektif dan sukar merawatnya. Pada abad ke VII beberapa tawanan berkebangsaan Cina di pekerjakan untuk membangun dan memproduksi kertas.<sup>8</sup> Berdirinya pabrik kertas ini makin mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan perdagangan buku. Pabrik kertas yang pertama didirikan pula di kota Samarkand, selanjutnya didirikan pula di Baghdad dan beberapa kota lainnya.

Pemakaian tenaga asing dalam ahli keterampilan dan ilmupengetahuan teknologi ini dilakukan juga pada abad-abad berikutnya termasuk pada masa kemunduran dan masa kekuasaan Turki Usmani, beberapa personil ahli militer Perancis dipakai dalam

<sup>7</sup> Stanton, *op-cit*, p. 64.

<sup>8</sup> Bayard Dodge, *op-cit*, p. 14.

usaha memodrenisasi angkatan bersenjata Turki Usmani. Demikian juga di akhir abad XIX di Alighar dipakai pula tenaga asing untuk memberikan ilmu pengetahuan.

## 2. Gerakan Tulis Baca di Negeri Muslim

Kesempurnaan ajaran Islam dan nilai universal yang dikandungnya menarik minat dan dorongan bangsa-bangsa yang ada di dalam territorial pemerintahan Islam untuk memeluk agama Islam. Aktivitas pertama masyarakat Muslim baru ini adalah mendalami ajaran Islam. Dengan sendirinya kegiatan pendidikan makin meningkat frekuensinya di seluruh wilayah Islam. Keadaan ini pra kondisi untuk terjadinya *intelektual booming* dan *economic booming* pada abad ke VII s/d abad XIII. Pada abad V, masyarakat Muslim telah benar-banar melewati fase dimana suatu masyarakat Muslim telah mengenal lambang dan bunyi dalam bentuk alphabetis dan menggunakan alat tulis. Semua bentuk pengalaman yang telah dirumuskan dalam teori-teori itu disusun dalam naskah-naskah. Fase ini oleh Ashley disebut revolusi II dalam dunia pendidikan. Revolusi I menurutnya berlangsung ketika masyarakat memeberikan wewenang pengajaran sehingga timbulnya profesi guru. Pendidikan beralih dari rumah ke sekolah. Revolusi ketiga adalah ketika naskah-naskah dipublikasikan secara luas dan besar-besaran. Sedangkan penggunaan produk teknologi-elektronik oleh Ashley disebut sebagai revolusi keempat.<sup>9</sup>

Pada abad ke VII masyarakat Muslim sudah berada pada fase ke III dengan ditemukannya kertas dan teknologi penyalinan serta penjilidan buku menyebabkan suburnya perdagangan buku dan berbarengan dengan itu muncul perpustakaan besar di berbagai tempat.<sup>10</sup>

Gerakan tulis baca ini mempercepat penyebaran bahasa Arab ke daerah Muslim seperti Turki, Afrika, India, Pakistan dan kepulauan Nusantara. Pengenalan huruf Arab menjadi keharusan dalam dunia perdagangan. Tidak berlebihan jika dinyatakan bahwa orang Muslim pertama di wiliyah tersebut adalah para pedagang.

<sup>9</sup> Yusuf Miarso dkk., *Teknologi Komunikasi Pendidikan, Pengertian dan Penerapan di Indonesia*, (Jakarta: Pustekom Depdikbud dan CV Rajawali, 1984), p. 2.

<sup>10</sup> Ahmad Syalabi, *p-cit*, p. George Makdisi, *The Rise of College, op-cit*, p. 46.



Begitu juga raja-raja yang pertama kali masuk Islam adalah Kerajaan Maritim yang bergerak dalam lapangan perdagangan komoditi hasil bumi.

Pengajaran bahasa Arab bersama dengan pengajaran tulis baca tampaknya berlangsung di seluruh daerah Muslim. Pendidikan Islam di India/ Pakistan ternyata berhasil mengembangkan pelajaran tulis baca dengan bahasa Arab dan Persia. Di Indonesia pengembangan tulis baca lebih ditekankan pada kegiatan belajar bahasa Arab, terutama di pondok pesantren. Namun secara bahasa *lingua franca* di wilayah nusantara sejak abad VII adalah bahasa Melayu. Seperti halnya bahasa Arab pra Islam, masyarakat kepulauan Nusantara juga tidak mengenal tulis baca kecuali dalam lingkungan terbatas dan suku-suku tertentu seperti makasar, batak, Jawa.

Di Jawa di kalangan bangsawan dikenal tulisan sansekrit (huruf palawa). Bahasa Melayu yang sudah menjadi bahasa perdagangan mendapatkan kekuatannya setelah bersentuhan dengan budaya Islam. Aksara Arab segera dipakai untuk membuat simbol lambang bunyi bahasa Melayu yang sudah menjadi bahasa pengantar (*lingua franca*) yang menghubungkan semua etnis yang ada di kepulauan Nusantara. Sehingga komunitas baru Islam di tandai dengan bahasa Melayu dengan aksara Arab. Sejak itu bahasa Melayu mendapat perkembangan pesat. Di Pesantren-Pesantren bahasa Melayu juga menjadi alat komunikasi dan media untuk menyalin keterangan para Kyai ataupun menuliskan arti kitab kitab berbahasa Arab yang dibacakan guru atau kyai.

Banyak kosa kata Arab yang memperkaya bahasa Melayu. Diduga makin banyak kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Melayu atau diterjemahkan ke bahasa Melayu, menjadi factor utama yang mempercepat meluasnya ajaran Islam dikalangan masyarakat kepulauan nusantara. Penulisan bahasa Melayu dengan aksara Arab sekaligus mempermudah pengenalan bahasa Arab atau membaca al-Qur'an dikalangan masyarakat Nusantara. Hal ini dibuktikan makin banyaknya kalangan yang mengerti bahasa Arab baik dikalangan Pesantren maupun para pedagang.

Pada dekade selanjutnya ternyata bahasa Melayu yang menjadi besar dan kaya dengan kosa kata Arab dan pengguna aksara Arab sangat besar pengaruhnya dalam mempersatukan bangsa dan

membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Ada tiga Faktor penting yang mempengaruhi integritas nasional pada waktu itu adalah: Pertama, agama Islam yang di anut mayoritas bangsa Indonesia: Kedua, agama Islam tidak hanya mengajari berjamaah tetapi juga menanamkan gerakan anti penjajah; Ketiga, mengutip Bouequet bahwa ummat islam menjadikan bahasa Melayu sebagai senjata pembangkit kejiwaan yang sangat ampuh dalam melahirkan aspirasi perjuangan nasionalnya.<sup>11</sup>

## B. Muatan Islami Pada Kebudayaan

Dua puluh tiga tahun setelah Rasul menerima wahyu pertama Islam telah menyebar menjangkau seluruh jazirah Arabia. Seterusnya dua puluh tahun setelah nabi Muhammad wafat wilayah Islam telah meliputi Palestina, Mesir, Irak, Persia. Luas daerah teritorial Islam pada masa itu sudah mengalahkan adi kuasa Byzantium.

Masa Pemerintahan Raja-Raja Bani Umaiyah Daerah Teritorial Islam meluas Daerah Andalus, Afrika Utara ke Timur Sampai Ke Perbatasan Cina. Begitu pula Bani Abbas yang menggantikan Dinasti Umaiyah, dunia Islam mencapai puncak kejayaan politik, ekonomi dan ilmu pengetahuan. Priode Klasik priode pertengahan dan priode Modern. Priode klasik disebut sebagai masa kejayaan dan periode pertengahan selanjutnya periode modern dilukiskan sebagai masa kebangkitan kembali.

Penulis Barat umumnya menyatakan Islam berkembang dengan cepat karena keefektifan militer dan kegeniusan administratif sehingga mampu membangun imperium militer yang memiliki keutuhan politis. Penulis Barat juga menyatakan bahwa kegemerlapan kota Baghdad Kota Fatimiyah Kairo bukan berasal dari Arab tetapi dari budaya material Irak dan Mesir yang sudah berabad-abad usiannya.

Montgomery Watt menyatakan Sir Hamilton Gibb tampak orang pertama yang menyatakan bahwa sumbangan Arab yang mendasar dan menentukan bagi budaya imperium mereka adalah sumbangan intelektual. Pernyataan ini sebagai demikian penting dan juga mendalam. Watt kemudian menyoroti hal itu dengan membandingkan Arab dengan Romawi yang juga memiliki militer dan kemampuan administrative untuk

<sup>11</sup> Ahmad Masyur Suryanegara, *Menemukan Sejarah wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1995, p. 112.



mendirikan kekaisarannya. Watt menyatakan kebudayaan intelektual didominasi Yunani. Hal ini terjadi sebaliknya pada Arab tradisi intelektual yang tadinya bahasa Yunani. Syriac dan Persia berangsur hilang dan bahasa Arab menjadi wahana linguistic kehidupan intelektual kemaharajaan yang luas itu. Bila dicermati kesimpulan itu maka tampaklah kekuatan itu sebenarnya pada bahasa Arab sebagai bahasa Islam. Tanpa bahasa Arab Islam tidak akan pernah besar. Kesimpulan ini mungkin akan lebih jelas jika dihubungkan dengan al-Qur'an yang berbahasa Arab tanpa pengenalan bahasa Arab maka nilai yang dikandung al-Qur'an tidak mungkin akan memberikan kontribusi yang besar bagi kebudayaan.

Namun bila dicermati secara lebih mendasar dengan melihat bangsa Arab itu sendiri. Ketika diperkenalkan Islam sebahagian besar adalah suku nomaden yang menetap di kota hanya dalam jumlah kecil. Bagi kaum paganis (Arab pra Islam) mengucapkan syair adalah perbuatan mulia, mengarang dan menghafal syair adalah suatu kebanggaan. Syair dengan nilai kesusastraan yang tinggi dan indah, berisikan puji-pujian untuk berhala-berhala mereka, kerap kali juga berisi gambaran kehidupan yang keras, pengembaraan, kepahlawanan suku dalam pertempuran dengan suku yang lain dan dalam mempertahankan kehidupan di tengah-tengah tanah tandus yang hampir tak pantas didiami.<sup>12</sup> Sangat digandrungi dan penyairnya dihormati. Syair juga selalu diperlombakan pada waktu tertentu.<sup>13</sup> Bagi Arab pra Islam mempelajari dan menghafal syair memiliki kedudukan penting sebagai transmisi nilai-nilai kebudayaan dan keyakinan paganis serta pandangan hidup. Untuk itu mereka mengirim anak-anak mereka ke pedesaan. Di desa anak-anak tersebut berkenalan dan dapat menyerap bahasa Arab yang masih murni, menghayati kehidupan yang menyatu dengan kekerasan alam sekaligus keakraban dengan alam benda-benda yang menjadi bahagian hidup. Disana sikap Kepahlawanan, keberanian, kebencian dan sekaligus kebebasan jiwa Arab terbentuk. Belum Ada Kemajuan ilmu pengetahuan padahal mereka sejak lama berbahasa Arab.

Setelah Islam diperkenalkan secara terbuka Rasul membacakan ayat al-Qur'an yang juga dalam bahasa Arab yang ketinggian sastra yang tidak ada bandingnya.<sup>14</sup> Kaum Muslimin mendengar penuh perhatian

<sup>12</sup> Michael Stanton, *Higher Learning in Islam, The classical Period AD 700-1300*, (Rowman & Little Field Publisher Inc., 1990), p. 1.

<sup>13</sup> Quraisy Shihab, *Membumikan al-Quran*, (bandung: Mizan, 1995), p. 80

<sup>14</sup> Quraisy Shihab, *Ibid.*, p. 349.

dan membaca, mengulang serta menghafal ayat-ayat itu dengan khusuk. Kini kebanggaan menghafal syair telah digantikan menjadi kebanggaan kedamaian, kebahagiaan, kekhusukan menghafal dan mensenandungkan ayat al-Qur'an. Suatu catatan menyatakan Umar bin Khattab sekali waktu terkesima mendengar alunan lirik dan kedalaman makna ayat al-Qur'an yang sedang dihafal dan dilafalkan oleh saudara perempuannya. Seketika terjadi konversi pada diri Umar bin Khattab dan segera menyatakan dirinya beriman. Stanton berkomentar: "Jika puisi mendominasi pendidikan bangsa Arab pra Islam selanjutnya al-Qur'an menentukan arah pendidikan dunia Arab yang baru" (Kaum muslimin).<sup>15</sup>

Pada periode Madinah kebudayaan membaca dan menghafal serta membahas al-Quran makin berkembang dan makin mempercepat sosialisasi nilai ajaran Islam dalam masyarakat di semanajung Arabia. Nilai itu merubah jiwa dan pandangan Arab seratus delapan puluh derajat. Arab Muslim menjadi ihsan yang beriman, mengutamakan ilmu pengetahuan serta kecintaan untuk memperolehnya, menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran serta menjunjung tinggi keihsanan. Keimanan yang kokoh menjadi mereka bangsa yang merdeka bebas dari mitos kebendaan dan pensakralan symbol maupun pengkultusan. Mereka muncul menjadi bangsa yang dinamis terbuka pada perubahan menuju kebaikan. Mereka menyadari nilai Islam yang universal memerlukan pengaplikasian, merekapun sadar, harus ada perubahan radikal karena budaya mereka tidak cukup mampu untuk menampung nilai universalitas Islam itu. Terutama Islam menekankan pengembangan nilai kebenaran mutlak dan kewajiban penalaran kritis empiris sehingga keimanan dalam Islam sangat terkait dengan keilmuan. Keimanan dan keilmuan menjadi landasan utama pengamalan agama untuk diabadikan sebesar-besarnya bagi kebahagiaan semuanya. Dorongan mencari ilmu dimana saja walau di negeri yang jauh seperti ke Cina dan dorongan menuntut ilmu tanpa batas waktu (no limit to study) serta pernyataan tentang keimanan dan keilmuan faktor utama peningkatan dan kemajuan kehidupan yang terdapat dalam al-Qur'an serta hadis-thadist Rasul<sup>16</sup> menjadi sumber motivasi yang tidak pernah

<sup>15</sup> Michael Stanton, *op-cit*, p. 1.

<sup>16</sup> Dalam al-Qur'an cukup banyak ayat yang mendorong aktivitas keilmuan dan penguasaan serta pengembangannya. Diantaranya seperti diungkapkan ayat-ayat pada: QS.2:31-32, QS.39:9, QS. 29:42, QS. 96:1-5 dan banyak ayat lain yang mendorong agar berpikir serta melakukan penelitian yang eksplorasi alam. Begitu pula hadist rasul yang mendorong aktivitas keilmuan serta menerangkan keutamaan ilmu dan ganjaran yang diperoleh dari kegiatan keilmuan itu.



kering untuk melakukan pencaharian dan memperkokoh keimanan dan meningkatkan kesejahteraan hidup secara individual, sosial, dan universal. justru Itulah ketika bangsa Arab bertemu dengan budaya Persia, Mesir, Yunani, India Dan China mereka menemukan apa yang dirasakan dapat memenuhi hasrat dan tuntutan ayat ini.

Penerjemahan besaran-besaran seluruh hazanah ilmu pengetahuan bangsa-bangsa dikumpulkan melalui berbagai ekspedisi dan dengan jalan membeli (tukar dengan barang dagangan) menjadi suatu kegemaran. Bahkan khalifah Harun Ar-Rasyid pernah mengganti upeti dari Rumawi dengan sejumlah buku-buku yang bagi orang Romawi dipandang tidak punya arti apa-apa. Dengan tekun ilmuan Islam mempelajari terjemahan buku tersebut. Hasil pemahamannya dikembangkan dan didiskusikan diberbagai majlis ilmu.

Dengan ilmu pengetahuan itu Arab Islam menemukan alat memahami dan memaknai nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ayat al-Quran, sehingga lebih luas dan mendalam. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah di terjemahkan dan diberi bermuatan Islami itu ilmu yang tadinya mandul, di tangan kaum Muslimin menjadi dinamis dan bermanfaat dan mampu menstimulasi kegiatan intelektual dan pengembangan ilmu pengetahuan menjadi bermanfaat untuk ke bahagiaan hidup manusia semuanya. Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab ternyata budaya Arab tidak cukup mampu menampung makna yang di tanggungannya namun dengan usaha penerjemahan ini kekosongan ini dapat terisi. Nilai Islami yang telah terinternalisasi ke dalam lubuk budaya dan kehidupan kaum Muslimin mendapat energi baru hingga menjadi sangat cerdas memakai nilai Islam dalam realitas sosial dan hubungannya dengan budaya bangsa lain. Pada lanjutannya menjadi kekuatan sikap mental dan kemampuan untuk menuansai dan mengelaborasi semua budaya dunia sehingga berguna bagi peradaban dan meningkat kan kemajuan kesejahteraan bagi manusia. Walau bahasa Arab untuk kepentingan politik dan penyelenggraan administrasi negara pada (65/685-86/705) masa khalifah Abdul al-Malik bin Marwan telah dinyatakan sebagai bahasa persatuan dan menjadi bahasa resmi kenegaraan. Namun pada masa penerjemahan di langsungkan barulah terjadi kemajuan peradaban yang cepat. Dengan demikian kemajuan Islam bukan saja karna bahasa Arab sebagai bahasa persatuan tetapi lebih pada proses muatan Islami pada budaya Arab dan pada budaya bangsa tersebut.

Gerakan penerjemahan dan usaha pengimplisitan nilai Islam pada ilmu pengetahuan teknologi menjadi landasan penting kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dan kaum Muslimin dapat mencapai kemajuan yang pesat di segala bidang. Langkah untuk bangkit seperti halnya kebangkitan Eropa juga diawali dengan usaha penerjemahan semua kitab-kitab yang ditulis ulama/ilmuan Muslim baik yang berkiprah di Baghdad maupun di Andalus. Berbagai keterangan dan bahan-bahan menunjukkan terhadap hubungan organisasi antara Renaissance dengan peradaban Islam.<sup>17</sup>

Sebagai bahan perbandingan Jepang dalam upaya mengejar ketertinggalannya dari Barat, melakukan restorasi Meiji dengan menitikberatkan pada program penerjemahan, hal itu terus dilaksanakan sampai dewasa ini sehingga menghantarkan Jepang sebagai negara industri terkemuka di dunia.

Sesuatu trend yang sama dan sebangun tampak juga pada kasus pelaksanaan Khutbah Jum'at sebagai media pendidikan rakyat. Seni pidato yang menjadi kebanggaan budaya Arab pra Islam telah diberikan muatan Islam oleh Rasulullah SAW.

Sementara hal itu tradisi pidato yang sangat digemari Arab telah pula disubsitusikan Rasul menjadi pelaksanaan Khutbah pada setiap hari Jum'at yaitu pada saat menjelang pelaksanaan solat Jum'at. Media ini secara efektif sangat mendukung pematangan ke-Islaman. Kemudian menjadi lebih dinamis dengan makin bertambahnya jumlah Mesjid yang dibangun seiring makin meluasnya daerah Islam. Khutbah dilaksanakan di setiap Mesjid sampai ke pelosok terpencil telah mendapatkan kekuatannya dalam memberikan wawasan ke-Islaman dan menciptakan iklim masyarakat yang secara berkesinambungan memperoleh informasi keagamaan.

Berbagai bidang ilmu yang berkembang turut pula memperkaya dan memperluas wawasan materi yang disampaikan sehingga wawasan keagamaan benar-benar terealisasi untuk bertambah luas dan maju pula. Namun ketika dominasi aliran atau mazhab makin mengkristal, adanya tren meminimalisasi fungsi akal dengan pernyataan pintu ijtihad ditutup maka media khutbah mulai kehilangan kekuatannya, bahkan mengalami

<sup>17</sup> Nurkholish Madjid mengutip pandangan Jhon S. Badeau (et.all.) *The Genius of Arab Civilization, Source of Renaissance* (Cambridge: MIT Press, 1983), Lihat Nurkhalis Madjid, *Islam ke Modernan dan Ke Indonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1989), p. 303.



keterasingan, mazhab memberi ruang yang sempit untuk kajian dan penafsiran serta wawasan baru. Informasi keagamaan melalui media ini makin tidak sesuai dengan kondisi dan kehilangan vitalitasnya sama sekali didaerahnya yang penduduknya non Arab, ketika teks kutbah menjadi sakral karena mesti diucapkan dalam bahasa Arab sedangkan di pihak lain penguasaan bahasa Arab dikalangan masyarakat Muslim tersebut terbatas sama sekali. Dalam kurun waktu yang panjang keadaan itu terus berlangsung.<sup>18</sup>

Tidak adanya keterangan menunjukkan sampai kapan hal itu terus berlangsung di berbagai tempat yang daerahnya tidak menguasai bahasa Arab. Namun secara pasti pada awal abad XX di Indonesia barulah berlangsung upaya pembaharuan disponsori para ulama yang memiliki wawasan yang lebih maju serta adanya gerakan gerakan pembaharuan pemikiran dalam Islam, seperti yang dilancarkan oleh Jam'iyah Mahmudiyah Lithalibil Khairiyah Muhammadiyah, al-Irsyad, Persis dan lain-lainnya. Sejak media khutbah menjadi komunikatif bahkan dibeberapa daerah materi khutbah disampaikan dalam bahasa daerah. Dengan kondisi itu media khutbah menjadi komunikatif dan berguna untuk membangun wawasan masa depan umat termasuk wawasan ilmu pengetahuan teknologi.

### C. Muatan Islami Pada Budaya-budaya lokal

Ketika Islam melebar menjangkau Persia, Mesir, Afrika Utara, Andalus, bahkan dan anak Benua India serta dataran Cina yang bahasanya berbeda dengan bahasa Arab. Para ulama dan pedagang Arab yang berada di kawasan tersebut segera mengupayakan penjelasan dengan bahasa Arab yang di dampingi dengan penjelasan dalam bahasa daerah setempat. Seperti halnya dengan daerah Persia. Sungguhpun untuk kepentingan politik daerah-daerah tersebut pada masa Umayyah pernah di Arabisasikan tetapi kemudian pada masa dinasti Absiyah Islam lebih mengembangkan universitasnya dalam bahasa Persia. Dihidupkan untuk menerima ajaran

<sup>18</sup> Sebagai contoh penyampaian khutbah di Mesjid Babussalam Kab. Langkat berdasarkan penelitian H. Fuad Said ternyata khutbah dalam bahasa Arab yang teksnya disusun oleh Ulama pertama pendiri daerah Babussalam dibaca terus menerus setiap Jum'at tanpa perubahan sedikitpun. Hal itu berlangsung sampai tahun 1965 barulah disampaikan dengan bahasa Indonesia dalam uraian materi khutbahnya. Perbaikan ini terjadi setelah banyak dari keturunan Tuan Guru Basilam tersebut yang mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Agama Islam (IAIN).

universalitasnya Islam secara utuh, hasilnya sebuah budaya dan bahasa yang kokoh mempertahankan sintak dan gramatika Parsi sebagai suatu bahasa Indo-Eropa tetapi dengan kosakata yang didominasi oleh pinjaman dari bahasa Arab serta muatan nilai ideologis yang bersumber dari ajaran Islam. Lebih dari itu bahasa Persi kemudian tampil sebagai alat menyatakan pikiran Islam yang tak kalah pentingnya dari bahasa Arab jika bukan dalam beberapa hal malah lebih penting seperti dalam bidang tasawuf, filsafat, teori-teori pemerintahan dan politik.<sup>19</sup> Proses ini ensensinya menunjukkan Islam sebagai suatu agama yang tidak terikat dengan bahasa, tempat, waktu dan kelompok manusia tertentu. Di pihak lain proses tersebut telah memberikan muatan Islami secara totalitas pada budaya Persia. Pada fase berikutnya bahasa Persia kemudian di pakai sebagai bahasa Islam untuk daerah Iran, Afganistan, Transoxiana, anak benua Indo-Pakistan, dan Turki.

Sedangkan di India karena sangat kental pengaruh Hindu dalam bahasa disana maka kaum Muslimin kemudian membangun bahasa yang lebih terIslamkan yang dikenal sebagai bahasa Urdhu.<sup>20</sup>

Suatu antisiden terjadi di Turki ketika Turki Usmani mundur, kaum mudanya melakukan rasionalisasi budaya mewajibkan seluruhnya dalam bahasa Turki, seluruh nilai Islam dalam budaya itu dicampakkan karna dianggap anti rasional menghambat kemajuan. Negara dinyatakan terpisah dari agama. Sekolah agama di keluarkan dari kurikulum, azan dan shalat harus dalam bahasa Turki. Modernisasi itu ternyata tidak membawa hasil. Nilai universalitas Islam yang semestinya dikembangkan dan dimuatkan pada budaya Turki justru tidak dilakukan. Turki tidak berhasil menyamai apakah lagi melampaui kemajuan Barat walau lebih dahulu melakukan modernisasi dari Jepang.

Akhirnya mulai tahun 1940 terdapat arus balik, Turki mulai kembali memperhatikan pengembangan nilai Islam dalam budayanya. Pada tahun 1949 pendidikan agama kembali dimasukkan kedalam kurikulum sekolah selama dua jam seminggu dan setahun kemudian pendidikan agama dinyatakan bersifat wajib.<sup>21</sup> Antisiden di Turki mempunyai akar yang jauh

<sup>19</sup> Nurkholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1950), p. 359.

<sup>20</sup> Lihat Naquib Al-Attas, *Islam dan Filsafat Sains*, (Bandung: Mizan, 1995), p. 8.

<sup>21</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), p. 157.



sejak Dinasti Abbasiyah runtuh karena perpecahan politik dan perebutan kekuasaan serta salah urus kemudian diakhiri dengan penaklukan mongol dibawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 1258 M. Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan di porak porandakan. Para ulama dan sarjana dihabisi, hazan ilmu pengetahuan dan perbendaharaan berbagai kemajuan intelektual Muslim dibakar dan dibuang ke sungai Tikris. dengan jatuhnya dinasti Abbasiyah maka pusat kekuasaan Islam tidak ada lagi pemerintahan Islam tersebar pada beberapa daerah seperti Spanyol, Afrika Utara, Mesir, Asia Barat dan Asia Tengah.

Meskipun permulaan abad ke XVI M muncul tiga kerajaan Islam menjadi adi kuasa baru: kerajaan Turki Usmani yang berpusat di Istambul, kerajaan Safawi di Persia, dan Mughal di India. Jalan perdagangan rempah dan Sutera dari Timur ke Barat mesti melalui kerajaan kerajaan ini. Tetapi daya peningkatan dalam bidang ekonomi dan politik yang dicapai tidak membawa peningkatan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.<sup>22</sup> Hal ini disebabkan karena pada masa tersebut telah berkembang pemikiran anti rasional, ilmu agama tidak berkembang lagi. Terjadi pensakralan dan sikap taklid, pintu ijtihad dinyatakan tertutup. Pada priode tersebut muncul kerajaan-kerajaan provinsial yang saling berperang memenuhi ambisi politiknya.

Kondisi tersebut mempengaruhi pula dinamika perkembangan Islam di seluruh dunia, juga di Timur Jauh yang sudah berlangsung sejak abad VII. Sehingga kondisi pendidikan Islam masa pembaharuan Turki dalam keadaan tak berdaya sama sekali. Proses memberi muatan nilai Islami di Timur Jauh diselenggarakan para pedagang Muslim dari Arab Selatan. Mereka telah membangun jaringan perdagangan dengan kepulauan Nusantara dan menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat Islam Nusantara. Beberapa orang ulama yang mempunyai jaringan erat dengan Mekah dan kerajaan Islam Mughal di India dengan ulet terus berusaha agar Islam membudaya dikepulauan Nusantara. Mereka menggunakan bahasa dan budaya Melayu sebagai saluran utama bahasa penyiaran Islam. Tidak diketahui secara pasti sejak kapan proses memberi muatan nilai Islami pada budaya lokal di kawasan ini dikembangkan. Besar kemungkinan sudah dilaksanakan sejak pertama perkembangan Islam di daerah ini yaitu pada abad VII dan sampai menjadi agama kepulauan Nusantara pada abad kedua belas. Di abad kesepuluh sekitar 997/1580-1011/1602 pendidikan melalui

<sup>22</sup> Nasution, *Islam Rasional*, (Bandung: Mizan, 1995), p. 104.

majlis ta'lim telah menggunakan bahasa Melayu, demikian juga penulisan buku meskipun judulnya bahasa Arab tetapi uraian nya bahasa Melayu aksara Arab. Pada masa inilah suku kata Arab banyak dimasukan kedalam khazanah bahasa Melayu. Tokoh utama yang memberimuatan Islami pada bahasa Melayu dan budaya lokal ini adalah Nur al-Din al-Raniry. Karya-karya al-Raniry ini memberi sumbangan besar terhadap pengembangan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu pengetahuan.<sup>23</sup>

Disamping berjasa mengembangkan Islam yang tidak terlalu sufistik. Al-raniry terkenal tokoh ulama yang mengadakan rekonsiliasi antara syariat dan hakikat. Berbeda dengan pendahulunya Hamzah Fansuri dan al-Syamsuddin al-Sumatrani yang mengembang sastra Melayu sufistik. Karya-karya kedua ulama pendahulu ini sangat banyak yang bersifat karya tasawuf puitik yang bukan saja sangat besar pengaruhnya pada pengembangan sastra Melayu klasik tetapi bagi penyebaran ajaran tasawuf dalam masyarakat. Dengan demikian keduanya memainkan peranan penting dalam pembentukan praktek keagamaan Muslim Melayu Indonesia pada paruh pertama abad ketujuh belas.<sup>24</sup> Terutama syair-syair dakwah Hamzah Fansuri.<sup>25</sup> Sebagaimana layaknya ajaran tasawuf syair syair tersebut lebih menekankan amalan bathin/rohaniyah yang sangat bersifat individual. Perkembangan ini sangat terkait dengan trend sufistik yang merebak di dunia Islam.

Nuruddin Arraniry dan muridnya Abdul Rauf al-Sinkili (1024/1615-1105/1630) mempunyai pandangan yang sangat berbeda dengan Hamzah. Mereka berdua mempunyai andil yang sangat besar dalam membangun praktek keagamaan yang lebih dinamis dikalangan masyarakat Muslim disumatera dan Malaya (Malaysia) terutama daerah pantai/pesisir. Mereka mampu merekonsiliasi antara Syariat dan tasawuf atau menurut istilah as-Sinkilli antar ilmu zahir dan ilmu bathin. Mereka pun sangat konsen dengan problematika sosial. Upaya membangun visi dan praktek umum terus dilaksanakan dengan menulis berbagai buku terutama ketika al-Raniry diangkat sebagai Syaikh al-Islam di Kesulthanan Aceh. Dengan jabatan itu ia bertanggung jawab atas masalah masalah keagamaan. Catatan Belanda menyatakan pula bahwa dia juga memainkan peranan penting

<sup>23</sup> Azumardi Azra, *jaringan Ulama Timur tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVIII dan XVIII*, (Bandung: Mizan, 1995), p. 188.

<sup>24</sup> Azra, *Ibid.*, p. 166 dan 201.

<sup>25</sup> Lihat V.I. Barginsky, *Tasawuf dan Satra Melayu*, (Jakarta: RUL, 1993), p. 41.



dalam masalah ekonomi politik. Arraniry juga menghidupkan tradisi intelektual Muslim yaitu menulis buku.<sup>26</sup> Al-Raniry adalah orang pertama di Nusantara yang mengambil inisiatif menulis buku pegangan standar mengenai kewajiban agama (fiqh) yang mendasar bagi semua orang.<sup>27</sup> Arraniry juga telah mendorong lebih jauh bahasa Melayu menjadi lingua Franca di wilayah Melayu Indonesia. Bahasa Melayu yang semula menjadi bahasa pengantar dalam kegiatan ekonomi telah berfungsi pula sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Meskipun terdapat beberapa perbedaan antara ar-Raniry dengan muridnya al-Sinkilli terutama dalam cara ar-Raniry yang keras dalam melancarkan pembaharuan namun al-Sinkilli tidak berselisih paham, dengan ajarannya secara umum. Al-Sinkilli juga menerbitkan buku-buku yang lebih melengkapi buku-buku yang ditulis ar-Raniry.<sup>28</sup> Diantara bukunya yang terpenting adalah "*Tarjuman Mustafid*" merupakan karya besar tentang tafsir lengkap al-Quran dalam bahasa Melayu. Karya-karya ini tentunya memberikan energy baru untuk tumbuhnya budaya belajar dan wawasan yang lebih luas dikalangan umat Islam Nusantara.

Islamisasi budaya melalui sastra dan kesenian lokal juga sudah berlangsung di pulau Jawa melalui pendekatan sufistik. Ajaran Islam disubsitusikan melalui kesenian wayang. Ini tampak pada muatan Islami pada tokoh tokoh di dalam cerita Ramayana. Tokoh-tokoh itu dipersepsikan sebagai penjabaran perbagai sifat/aspek jiwa. Tokoh Rawana misalnya melambangkan Nafs al-Amarah (tumpuan dari segala sifat buruk), Kumbakarna misalnya melambangkan Nafs al-Lawwamah (jiwa bertaubat), Sarpakaneka, Nafs al-Safiyah (jiwa suci) dan saudara mereka yang arif Wibasana Nafs al-Mulhimah (jiwa yang berilham) yang lebih tinggi dari semua jiwa tersebut sebelumnya dan menjadi nyata setelah semua aspek jiwa itu sudah dilalui.<sup>29</sup> Begitu pula penyusunan kidung dan gending oleh para wali mupun oleh Sultan Agung Mataram Islam adalah

<sup>26</sup> Lihat Azumardi, *op-cit*, p. 177.

<sup>27</sup> Diantara buku-buku Al-Raniry adalah *Shirath al-Mustaqiim* (tentang Fiqh), *Bustan al-Salathin* (tentang pemerintahan), *Hidayat al-habib fi al-Taghrib wa al-Tartib* (kumpulan hadist-hadist Rasul), *Durrat al-Fara'id bi Syarb al-'aqa'id* terjemahan dan ulasan dari sebagian kitab *Mukhtasyar al-'Aqaid* oleh Najm al-Din al-Nasafi (Tentang Aqidah), *Tibyan fi Ma'rifat al-Adyan* (Tentang perbandingan Agama).

<sup>28</sup> Buku-buku al-Sinkilli antara lain adalah, *Mir'at al-Thullab* (fiqh muamalah), kitab Al-Faradih, *Tarjumanal-Mustafid* (Tafsir al-Quran), *Hadist Arba'in* (Hadist-hadist), *Al-Mawa'izh al-Badi'ah* (Koleksi hadist Qudsi) Al-Sinkilli juga menulis tentang tasawuf.

<sup>29</sup> V.I. Barginsky, *Ibid*. P. 101-102. Lihat juga Seno Sastromijoyo, *Renungan Tentang Wayang Kulit*, (Jakarta: 1964), p. 301.

bagian penting dari upaya memberikan muatan Islami pada budaya lokal. Demikian juga upaya untuk memberikan muatan nilai Islami pada cerita rakyat, serta legenda yang hidup ditengah masyarakatpun banyak pula dilakukan. Sungguhpun banyak kalangan memandang upaya ini sebagai sinkritisasi namun secara umum seluruh masyarakat telah menyatakan dirinya Muslim. Seiring itu upaya pemantapan ajaran Islam terus dilakukan dengan memberikan pengajaran pada majlis ta'lim di Mesjid-Mesjid dan dipengajaran di Pesantren-Pesantren.

Pada masa penjajahan tampaknya para ulama melakukan pendekatan baru dengan membentuk simbol budaya baru yang berguna mengkonsolidasi dan memperkokoh tradisi ke-Islaman pada masyarakat agraris, misalnya acara-acara ceremonial keagamaan dalam bentuk ruwah, muludan, berjanjen, terbangnan, tari tarian dan nyanyian serta lainnya yang disebut oleh Kuntowijoyo sebagai budaya I yang agraris yang pada fase lebih belakangan berbeda dengan budaya II yang lebih bersifat industrialis.<sup>30</sup>

Muatan nilai Islami tidak saja berlangsung melalui bidang bahasa tetapi juga dalam berbagai hasil kesenian seperti seni lukis dan seni tari serta seni suara dan juga model pakaian daerah telah mengalami modifikasi dan dikembangkan dengan memasukkan dan menyesuaikan nilai nilai Islami pada budaya tersebut.

#### **D. Integritas Diniyah-ilmiah dan Amaliah**

Jauh sebelum masa kebangkitan intelektual dalam peradapan Islam abad VII s/d XI dasar dasar yang kuat telah diletakkan pada masa Rasulullah di Mekah maupun di madinah baik dalam proses pembinaan yang dilakukan di Al-Dar (Mekah) maupun juga di Mesjid (madinah). Dasar itulah kemudian menjadi fondasi tumbuhnya masyarakat beriman dan berbudaya belajar. Pada masa kebangkitan intelektual, lembaga pendidikan itu terus berkembang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan zamannya. Lembaga pendidikan yang berperan adalah Al-Dar, Mesjid, Mesjid Khan, Bimaristan, Observatorium, Perpustakaan, Salon Kesusastraan, Tokoh Kitab dan laboratorium serta madrasah. Lembaga itu menjadi sumber lembaga kemajuan, kegemilangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Dari

<sup>30</sup> Kuntowijoyo, "Muhammadiyah sebagai Gerakan Kebudayaan, Tanpa Kebudayaan atau satu lagi alasan Mengapa NU dan Muhammadiyah harus bersatu", dalam *Muhammadiyah dan Pemberdayaan Rakyat*, penyunting Ade Ma'ruf WS, Zulfan Heri, (Yogyakarta: KSL dan LP3M UMY kerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1995), p. 3-5.



tempat itu di tempa sumber daya manusia yang kemudian mengisi jabatan para pemimpin, ulama, hakim/qadhi, imam, ahli hukum Islam dan ilmuwan yang keilmuannya luas mendalam.

Berbagai data menunjukkan bahwa Mesjid, Mesjid Khan, dan Mesjid Jami' serta yang terakhir madrasah lebih terfokus pada pengajaran ilmu keagamaan sedangkan Kairo (600/1203) masa dinasti Fathimiyah memberikan juga pada pelajaran ilmu – ilmu aqliyah termasuk kedokteran.<sup>31</sup>

Secara umum metode kerja ilmiah (logika, dialektika) dan ilmu aqliyah, telah di gunakan sebagai ilmu dan alat bantu memahami dan mendalami ajaran Islam. Sedang disiplin ilmu lainnya meski tidak di jadikan bidang study, telah dipakai menjadi bahan memperluas pembahasan/pendalaman ajaran agama baik tafsir, fiqih dan lainnya. Dengan demikian disiplin ilmu telah masuk ke dalam pembahasan ilmu agama sebagai ilmu bantu untuk pengkajian dan pengembangan ilmu agama tersebut. Pengembangan ilmu termasuk upaya pengimplisitan nilai nilai Islam di langsung dalam kelompok study/majlis ilmu yang berkembang subur detelah gerakan penterjemahan di langsung majlis ilmu baik yang ada di masyarakat, di istana maupun di Bimaristan, observatorium serta di toko-toko buku membahas berbagai disiplin ilmu aqliyah dalam sorotan ilmu naqliyah. Sehingga proses implisitasi dan integrasi berlangsung secara intensif. Ilmu yang telah terverifikasi itu lah yang di terima dan di kembangkan oleh ilmuwan muslim dengan visi nilai yang Islami. Sering pula dari diskusi dan debat itu kemudian melahirkan pandangan dan teori ilmu yang orsinal hasil visi ajaran Islam (yang berbeda dari ilmu asalnya).

Integrasi ini berlangsung cepat, sehingga pada masa itu hampir seluruh ilmu aqliyah telah berkembang pada visi Islam dan melahirkan penemuan dan di siplin ilmu baru. Ilmu pengetahuan yang sebelumnya bersifat *pure sceince* di tangan ilmuwan muslim menjadi *applied sceince*. Bagi ilmuwan Muslim dan masyarakat Islam usaha ini selain untuk keperluan praktis yang berawal dari keinginan mengenal masyarakat non arab, mengetahui perangkat ilmu pengetahuan bangsa yang pernah maju di daerah yang masuk territorial Islam juga mempertajam perangkat intelektual guna mempertahankan iman Islam, dalam menghadapi agama lain yang para pemeluknya sudah terlatih dengan filsafat dan dialektika

<sup>31</sup> Makdisi, "Madrasah" *op-cit*, p. 1130.

yunani.<sup>32</sup> Alasan yang paling mendasar adalah dorongan murni ajaran Islam yang terus menerus memotivasi ummat Islam untuk mengetahui seluk beluk alam semesta dan perintah untuk memanfaatkan dan melestarikan alam tempat hidup manusia itu sebaik baiknya demi kemashlahatan manusia. Seluruh aktifitas keilmuan adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Maha Pencipta.

Integritas iman dan ilmu dalam meningkatkan amal ibadah dan amal shalihah ini menjadi motivasi utama masyarakat Islam dan para ilmunan mengembangkan ilmu pengetahuan, melakukan penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi seperti di bidang pengairan, kedokteran, fisika, anatomi, dan astronomi serta ilmu lainnya. Inilah yang menjadi akar kesuksesan umat Islam pada abad kemajuannya (VII-XII M).

---

<sup>32</sup> Stanton, *op-cit*, p. 122.



## **BAB V**

### **PELAYANAN PENDIDIKAN ISLAM MULTI KULTURAL**



## BAB V

### PELAYANAN PENDIDIKAN ISLAM MULTI KULTURAL

#### A. Penempatan Pendidikan

**B**erbicara tentang pendidikan sesungguhnya membahas inti yang paling utama dalam ajaran Islam. Hampir keseluruhan ayat – ayat Al-Qur'an berisikan nilai – nilai pendidikan. Mulai dari ayat – ayat yang pertama di turunkan telah berisi nilai pendidikan berupa perintah untuk baca tulis. Perintah ini sesungguhnya bermakna bahwa untuk memulai suatu peradaban modern haruslah di mulai dengan gerakan melek huruf dan kemampuan menulis, perintah ini diperkuat dengan ayat yang diturunkan berikutnya dalam petunjuk yang lebih konkrit untuk melakukan pelayanan pendidikan dalam bentuk perintah bangkit dari keterbelakangan, kegelapan, dan ketertutupan dengan melakukan gerakan wajib belajar dengan empat pilar penting, yaitu pembelajaran untuk kehidupan yang bersih, pengagungan asma Allah melalui cipta karsa dan karya yang berkualitas, serta pembebasan manusia dari segala bentuk penyebab kejatuhan kualitas hidup manusia. Pilar keempat, kredibilitas dan kreatifitas tanpa pamrih untuk peradaban yang mulia, harkat martabat kemanusiaan. Keempat pilar ini menjadi landasan kebijakan pendidikan Islam yang dijalankan Rasulullah sejak awal berada di Madinah.

Penempatan pendidikan pada posisi terdepan dalam membangun peradaban manusia ini sebagaimana dinyatakan di atas diawali dengan gerakan *Illletaracy* dan *compulsory education*. Upaya tersebut secara tegas dinyatakan haruslah di bangun atas dasar etos keimanan ketakwaan dan



keilmuan yaitu kesadaran yang berangkat dari paradigma bahwa manusia makhluk yang diciptakan Allah mengemban amanah dan mengelola dan memakmurkan alam semesta untuk memenuhi kebutuhannya guna pengabdian kepada Allah yang maha kuasa. Tanpa dasar itu manusia akan mengalami kejatuhan degradasi dan dehumanisasi.

Demikian besarnya perhatian terhadap pentingnya pendidikan ini dalam pandangan Islam bahkan dinyatakan bahwa pendidikan menjadi hak dan kewajiban azasi, setiap individu wajib dan harus diberi peluang untuk mengikuti dan mendapatkan pendidikan. Karena itu melalui pendidikanlah manusia dapat meningkatkan kualitas keimanan dan keilmuannya yang menjadi modal dasar untuk meningkatnya taraf hidup berbahagia di dunia dan bahagia di akhirat.

Ajaran Islam ini sesungguhnya diturunkan untuk membangun kehidupan manusia yang lebih baik, justru itu pesan moral yang disampaikan bersifat universal tertuju pada semua kalangan tanpa memandang agama, etnis, budaya dan tempat. Bagaimana penyelenggaraan pendidikan agar dapat mencapai sasaran dan memenuhi cita-cita Islam bagi terwujudnya kehidupan yang baik bagi manusia di jagat raya ini tidak saja bagi umat Islam, tetapi juga bagi umat manusia secara keseluruhan. Hal inilah yang akan menjadi dasar kebijakan pendidikan menjadi suatu bentuk pelayanan pendidikan dalam Perspektif Multi Kultural.

Pelayanan pendidikan dalam Islam bermakna proses memanusiakan manusia agar memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi dan perannya sebagai khalifah dan sekaligus *Abdillah*. Fungsidan peran itu bersifat terpadu dan saling melengkapi dan menyempurnakan. Proses memanusiakan manusia itu berlangsung dengan mendidik dan memberdayakan semua potensi yang dimiliki manusia baik potensi jasmaniah, aqliyah maupun ruhaniyah. Potensi yang berupa kemampuan dasar dan kecenderungan murni (*fitrah*) ini dalam pengembangannya berinteraksi dengan lingkungan. Oleh karena itu dalam proses penyelenggaraannya pendidikan harus ditujukan untuk:

1. Memberdayakan potensi yang dimiliki manusia itu secara optimal
2. Memberikan pencerahan agar memahami yang baik dan yang buruk, dapat membedakan serta mengaplikasikan yang baik untuk kepentingan kehidupan yang baik pula
3. Menumbuhkan kreativitas untuk kemaslahatan hidup
4. Menumbuhkan tanggung jawab dalam tata kehidupan

5. Memotivasi agar dapat memakmurkan dan memanfaatkan alam untuk peningkatan harkat dan martabat hidup dan kehidupan manusia.
6. Menumbuhkan kesadaran keimanan dan pengabdian kepada Allah Swt.

Pencapaian tujuan ini dilangsungkan secara bertahap sesuai dengan perkembangan dan kemampuan individu. Dalam perspektif Islam manusia adalah makhluk yang memiliki keutamaan, kelebihan dan kedudukan yang sangat tinggi dengan catatan apabila ia tahu diri, berilmu. Dan mau menggunakan akalnyanya. Apabila hal itu tidak dikembangkan maka manusia akan mengalami degradasi dan dehumanisasi yang akan mengancam kehidupan manusia secara menyeluruh dan merusak sistem kehidupan di alam semesta ini. Berdasarkan hal itu maka Islam memposisikan pelayanan pendidikan harus dilakukan untuk membebaskan manusia secara keseluruhan. Kebijakan ini merupakan kebijakan pendidikan untuk semua. (*Education for All*).

Islam berkepentingan untuk melakukan pencerahan, pencerdasan, pemberdayaan dan pemberdayaan dan pemberadaban, sebab insan yang demikian itulah yang akan mampu beriman secara benar dan menjalankan keyakinan imannya dan hidup dengan keimanannya bahagia dunia dan akhirat, serta dapat hidup secara wajar dan sehat dalam sistem nilai ke Islaman.

Bentuk pelayanan pendidikan dalam perspektif Islam sangat terbuka dan menempatkan semua orang sama untuk berpartisipasi dan tidak ada paksaan dalam beragama. Adanya perbedaan etnis, kepentingan dan keyakinan tidak menjadi hambatan untuk terjadinya proses pelayanan pendidikan dan proses transformasi nilai kultural, serta untuk kepentingan terjadi *akselerasi* kemajuan peradaban manusia ke arah yang lebih baik dan mulia. Peluang untuk mendapatkan pelayanan pendidikan itu harus dibuka dan disiapkan tanpa batas usia, tempat bahkan dapat pula dalam bentuk lintas batas, ras, dan sebagainya. Sehingga dalam Islam tidak ada pembatasan untuk belajar (*No Limit to Study*). Mengikuti pendidikan menjadi kewajiban yang bersifat *fardhu kifayah*.

Pelayanan pendidikan yang dapat diakses dan diikuti oleh setiap orang ini memerlukan sistem yang dapat mendukung secara penuh keberlangsungannya. Untuk kepentingan ini dalam Islam disediakan suatu sistem pendanaan pendidikan yang gratis, yaitu melalui sistem infak, zakat, sedekah, dan wakaf.



## B. Pelayanan Pendidikan Perspektif Multi Kultural

Pendidikan multi kultural adalah gagasan baru yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan ketika didapati konflik makin merebak di mana-mana. Pendidikan multi-kultural semakin mendapat perhatian. Sesungguhnya gagasan ini berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang interkulturalisme setelah Perang Dunia II. Kesadaran ini selain terkait dengan perkembangan politik internasional menyangkut HAM, kemerdekaan dari kolonialisme, diskriminasi sosial dan juga karena meningkatnya pluralitas di negara-negara Barat sendiri sebagai akibat dari peningkatan migrasi dari negara-negara yang baru merdeka ke Amerika dan Eropa.

Azra menyebutkan secara sederhana pendidikan multikultural dapat didefinisikan untuk tentang keragaman kebudayaan untuk merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan (Azra dalam Baidhawi, 2005. Viii). Pada dasarnya cikal bakal pendidikan multi kultural berkembang dari konsep pendidikan inter-kultural yang hakikatnya merupakan *Cross Cultural Education* untuk mengembangkan nilai-nilai universal yang dapat diterima berbagai kelompok masyarakat yang berbeda. Perkembangan selanjutnya pendidikan multi-kultural kemudian membicarakan masalah toleransi, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, HAM, demokrasi dan pluralitas, kemanusiaan universal, tema-tema tentang perbedaan inter-kultural dan agama. Bagaimanakah pandangan Islam tentang pelayanan pendidikan perspektif multi-kulturalis? Menjawab pertanyaan ini tentu memerlukan pengkajian yang mendalam dan objektif menjangkau nilai dasar ajaran Islam.

Secara historis Islam datang dengan misi yang sangat jelas yaitu memperbaiki prikehidupan manusia, membebaskan dari tirani, belenggu kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, kezaliman, diskriminasi dan ketidakadilan akibat relasi dominasi-subordinasi-superior, menindas-tertindas baik dalam hubungan antar agama, antar etnik ataupun antar budaya. Pada realitasnya ajaran Islam jelas dipersiapkan untuk menjawab persoalan manusia pada masa itu, masa kini dan masa ke depan. Sebagai agama yang berfungsi *Rahmatan LilAlamin*, ajaran Islam bersifat *Wholistic* lintas agama. Lintas kultural dan lintas masa/ zaman. Untuk mewujudkan misi dan fungsi ajaran Islam itu saluran utamanya adalah melalui pendidikan dan pembinaan masyarakat manusia dengan pesan moral:

1. Membentuk cita-cita bersama kesatuan kemanusiaan (*Unity of Human Kind*) dengan membangun visi kesamaan, kesetaraan tanpa

membedakan warna kulit, ras, etnik budaya dan agama. Segala bentuk dominasi ras dan diskriminasi atas nama apapun merupakan kekuatan anti terhadap tauhid karenanya harus ditolak dan dikecam secara bersama sebagai kemusyrikan dan sekaligus kejahatan atas kemanusiaan (HAM). Visi secara tegas dinyatakan dalam al-quran: *"Katakanlah wahai semua penganut agama (dan kebudayaan) bergegaslah menuju dialog dan kalimatun sawa (konversi dan komitmen) antara kami dan kamu (QS. Ali- Imran 3:64).*

2. Pelayanan pendidikan dalam bentuk dialogis menjadi tawaran untuk menjembatani segala bentuk perbedaan. Bila dialog dilakukan dengan secara terbuka, jujur, dan simpatik akan membawa kesepahaman, menepis semua prasangka, stereotip dan celaan sehingga menjadi kalimatun sawa berawal dari pengakuan adanya pluralitas/keragaman, pandangan kesetaraan, dan martabat yang sama, serta saling memahami dan saling menghargai. Sebagaimana disinyalir dalam alquran agar senantiasa mencermati adanya keberbedaan, dan hal itu harus dijembatani dengan adanya hubungan komunikasi saling mengenali sehingga dapat terbangun kesepahaman serta kemaslahatan hidup bersama. Adanya rasa superior harus dihilangkan jauh-jauh. Bahwa kemuliaan hanya ada pada realitas kualitas yang terbaik yaitu orang paling takwa (QS. Al-Hujurat 49:13). Dengan suasana seperti itulah dapat dibangun konversi dan komitmen.
3. Islam juga meletakkan dasar penting dalam mewujudkan misi *rahmatan lil'alam* itu dengan menekankan pada sistem relasi yang manusiawi dalam bentuk amanah kerjasama untuk saling menghormati, saling menjaga perasaan dan kepercayaan, mengembangkan sikap positif (*Husnuzhan*) sebagaimana diarahkan dalam alquran: *"Hai orang-orang yang beriman jauhilah banyak prasangka itu dosa. Janganlah sebahagian menggunjing sebagian yang lain"* (QS Al-Hujarat 49:12). Selanjutnya allah berfirman lagi pada ayat yang lain: *"Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah pada langit, bumi dan gunung-gunung, semuanya enggan memikulnya, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh"*. (QS. Al-Ahzab, 33:72).
4. Mengembangkan prinsip egaliter yang dicanangkan oleh Islam dilaksanakan dalam bentuk *takaful* dan *ta'awun*. Yaitu pengakuan hak-hak manusia untuk hidup layak, dan jaminan kesehatan, pakaian,



makanan, perumahan, dan usaha-usaha sosial yang diperlukan. Islam juga menekankan bahwa hak setiap orang atas jaminan sosial karena sakit, cacat, janda/duda, lansia, pemutusan hubungan kerja, atau miskin dan fakir karena diluar kemauan dan kemampuannya. Allah swt. Berfirman: *"Dan tolong-menolonglah kamu dengan rela saling berkorban(birri) dan dengan memelihara solidaritas dan ikatan sosial (taqwa) dan janganlah kamu tolong-menolonglah dalam berbuat kriminal dan konflik komunal dan bertakwakkalah kepada allah, sesungguhnya Allah maha pedih siksaanya (sanksi sosial)". (Q.S Al-Maidah, 5:2).*

5. Membuka pintu maaf. Dalam konteks membangun masyarakat madani yang harmonis dianjurkan agar pintu maaf selalu terbuka. Firman allah: *"Balasan untuk sesuatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal denganya, tetapi jika seseorang memberi maaf dan melakukan rekonsiliasi balasannya adalah dari Allah. Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kezaliman", (QS. Asy-Syura, 42:40).* Membudayakan kedamaian dan keharmonisan segala sesuatunya haruslah dilakukan dengan prinsip pemeliharaan kedamaian, dengan memperimbangan segala aspek kemaslahatannya. Allah berfirman : *"apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepada kamu maka katakanlah " kedamaian adalah jalan hidupmu" tuhan telah menciptakan atas dirinya kasih sayang. Dan barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan kemudian meminta ampun setelah mengerjakan dan mengadakan perbaikan. Sesungguhnya allah maha pengampun lagi maha penyayang". (QS. Al-an'am 6: 54).*
6. Bersikap lemah lembut dan terbuka dengan sikap lemah lembut berbagai persoalan yang ada dapat dicairkan. firman allah : *"disebabkan rahmat allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. jika kamu bersikap keras dan kasar mereka akan menjauhkan diri dari mu. karena itu maafkan lah mereka dan mohonkan ampunan bagi mereka itu bersyukurlah dengan mereka dalam urusan itu". (QS. Ali imran : 139).*
- a. Kebijakan memperkenankan agama lain melaksanakan pendidikan

Pesan-pesan moral yang dikemukakan di atas sesungguhnya dapat menjadi landasan pelayanan pendidikan perspektif *multi-cultural*. Secara historis hal ini telah dilaksanakan pada masa

Rasul maupun pada masa Khulafaur Rasyidin serta kekuasaan Islam baik masa Ummaiyah, Abbasiyah serta di Andalusia telah mengembangkan kebijakan untuk tetap memperkenankan dan mendorong penganut agama lain untuk terus medalami agamanya dan melindungi program pelaksanaannya, karena mereka dikategorikan sebagai kaum Zimmy. kebijakan ini terus dijalankan sehingga tidak ada satupun lembaga pendidikan keagamaan di wilayah Muslim yang ditutup ataupun dilarang demikian juga rumah ibadah yang juga dipergunakan sebagai tempat pendidikan agama.

Dalam lembaga pendidikan keilmuan seperti Majelis Ilmu menganut agama lain yang memiliki kepakaran keilmuan dapat pula mengikuti pembahasan dan bahkan ada di antaranya yang di undang oleh Khalifah untuk mencurahkan ilmunya dan turut sama dalam pengkajian. Pengkajian di majelis ilmu itu terbukti dapat merajut hubungan yang harmonis dan mendukung percepatan kemajuan. Terbukti pula apabila prinsip bersumber pesan moral ini tidak dijalankan atau tidak berjalan sepenuhnya telah terjadi berbagai konflik sosial internal maupun external sekala kecil ataupun skala besar. Disini memang diperlukan kesadaran dan kemauan yang jujur dan ikhlas dari semua pihak untuk mengamalkan dan membudayakannya.

b. Kebijakan untuk komunikasi dialogis

Kondisi masyarakat yang berada pada wilayah semakin luas seperti yang terjadi pada masa Ummaiyah dan Abbasiyyah tentu akan terhadap dengan banyak masalah yang selalu di barengi dengan konflik, karena itu perlu kebijakan Islam, yang lebih komprehensif tentang perspektif pendidikan multi kulturalis. Baik masa Rasul maupun masa setelahnya suatu kebijakan penting yang terus di pertahan untuk mendukung karakteristik ajaran Islam yang *rahmatan lil alamin* adalah kebijakan untuk ada komunikasi dialogis yang terbuka dalam majelis ilmu dalam pertemuan khusus dialog antar penganut agama. Seperti ditulis oleh Mursi, Rasul secara berkala melakukan dialog dengan pemuka agama Jahudi tentang berbagai masalah kehidupan kebijakan untuk adanya sharing dan diskusi ilmiah ini menjadi perekat yang sangat kuat sehingga masyarakat Zimmi benar-benar merasa terayomi dalam sistem pemerintahan Islam, baik di Timur maupun pada wilayah yuridiksi Ummaiyah di Andalusia (Eropa) yang berkuasa lebih dari 700 tahun.



Prinsip-prinsip dasar tentang persamaan hak dan kewajiban (prinsip egaliter) serta yang mulia adalah manusia yang paling takwa menjadi dasar penting para khalifah untuk menetapkan kebijakan semua warga dibawah pemerintahan Islam sama dan harus berpartisipasi dalam pendidikan.

c. Kebijakan Bahasa Arab Sebagai Bahasa Pengantar dan Bahasa Komunikasi Sosial

Pada masa Ummaiyah ada kebijakan tentang bahasa pengantar adalah bahasa arab. Kebijakan ini mempunyai arti penting bagi pendidikan multikultural. Dengan diberlakukanya bahasa arab sebagai bahasa pengantar maka seluruh warga yang berada di wilayah yuridiksi Islam dapat dengan mudah memahami berbagai ketentuan, peraturan serta nilai ajaran Islam yang universal yang bukan saja bermanfaat bagi Muslim tetapi juga bagi umat manusia seluruhnya. Dipihak lain kemudahan masyarakat Islam untuk memahami berbagai kepentingan dan pola pikir warga non Muslim/ kafir Zimi. Hal lain adalah untuk lebih memperkuat upaya penterjemahan khazanah ilmu pengetahuan kedunia Islam pada masa Abbasiyyah bahasa Arab tetap di pertahankan sebagai bahasa agama dan bahasa utama namun juga diambil kebijakan untuk mengembangkan bahasa Parsi terutama dalam pengkajian dan pendalaman ilmu-ilmu keIslaman bagi non arab.

d. Kebijakan menimba ilmu dari non Muslim.

Sejak masa Rasul kebijakan ini telah dirancang sesuai dengan sabda Rasul untuk menuntut ilmu walaupun kenegeri cina. Kebijakan ini menjadi landasan untuk adanya para pengembara seperti Ibnu Batuta untuk menjelajahi dunia mendapatkan pengetahuan tentang bangsa-bangsa dan wilayah yang ada di dunia ini. Kebijakan ini juga dilakukan dalam versi yang 'ain yaitu dalam membentuk memanfaatkan para ahli non Muslim, yang bermukim di wilayah Muslim sebagai tenaga pengajar atau expert. Kebijakan ini tampak pada kebijakan untuk menempatkan para tawanan yang bisa baca tulis untuk mengajari kaum Muslim hal yang sama juga dalam perlakuan terhadap para expert pabrik kertas, pabrik gelas. Atau mengundang mereka datang ke Majlis Ilmu yang diselenggarakan. Sesuatu yang menarik seperti ditulis Watt kemanapun ekspedisi

militer Muslim berangkat maka ekspedisi itu tetap dilengkapi dengan para ulama, ilmuwan, dokter, ahli hukum.

Pada kasus ini terlihat bahwa kebijakan untuk menimba ilmu tersebut juga diterapkan bersama dengan perluasan wilayah yuridiksi Islam. Hal yang sama juga berlangsung pada kegiatan para saudagar Muslim banyak diantaranya rela menukar dagangan dengan buku atau kitab yang di pandang berguna. Menurut catatan sejarah di antara mereka juga membina perpustakaan pribadi di daerah asalnya penghargaan terhadap ilmu juga berlaku sama terhadap para ilmuwan.

#### e. Tiga Pilar Pendidikan Multi Kultural

Secara umum kebijakan multi kultural dalam Islam dikembangkan atas tiga pilar yaitu, takwin, Takmil, Takhyir. Pilar pertama memadukan kultur yang ada dengan menjadikan budaya itu berbasis Islam sebagai implementasi kebijakan ini dapat ditelusuri pada kebijakan menjadikan budaya menyenandungkan syair menjadi budaya membaca al-Qur'an, keutamaan berpidato dikembangkan dengan khutbah Jum'at dan syiar Islam dalam bentuk tabligh. Pilar kedua mempersatukan budaya yang ada dengan mengimpiliskan nilai Islam seperti budaya berziarah, mencukur anak/cucu, masuk rumah baru, berdoa bagi orang yang sudah wafat, kenduri tahlilan.

Pilar ketiga menolak atau menentang nilai budaya yang bertentangan dengan Islam, seperti budaya sajenan diganti dengan bersedekah, berinfaq dan berwakaf.





## **BAB VI**

### **KONTRUKSI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM LEWAT ASPEK BUDAYA**





## BAB VI

### KONTRUKSI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM LEWAT ASPEK BUDAYA

**D**ari berbagai kebijakan pendidikan Islam bab-bab terdahulu terlihat upaya yang dilaksanakan dalam aktivitas pendidikan melalui dekade ke dekade dari masa Rasul sampai masa akhir daulat Abbasiyah yang disebut dalam periode sejarah Islam sebagai periode kemajuan klasik.

Dalam rentang waktu yang panjang itu diketahui saat dimana dunia Islam mengalami kemajuan dalam bidang budaya. Pada konteks itu terdapat interaktif yang kuat dengan peran pendidikan, yang dalam kesemarakan, ketangguhan kemampuan, kesesuaian, ketahanan, kemandirian dan kemampuan untuk berkembang berkelanjutan sesuai perkembangan lingkungan.

Para ilmuwan sepakat kemajuan dan kemunduran suatu bangsa atau negara banyak ditentukan oleh sistem pendidikan. Pandangan ini juga sejajar dengan ajaran Islam yang menyatakan bahwa keimanan dan keilmuan adalah sokoguru utama peningkatan kemajuan dan derajat suatu bangsa.<sup>1</sup> Pendidikan sebagai suatu sistem terkait dengan wawasan kependidikan (gagasan, konsep/ide ide sentral kependidikan), proses kependidikan (peran guru dan mekanisme belajar mengajar), materi kependidikan (nilai yang dilestarikan) dan institusi kependidikan (pusat

---

<sup>1</sup> Lihat QS. *A-Mujadillah*, ayat. 11.

belajar atau pusat ilmu). Kebijakan pendidikan akan terkait dengan keempat komponen sistem itu.

Diskripsi kebijakan pendidikan Islam lewat aspek budaya pada bab ke dua, ketiga dan keempat dapat dibagi kepada mata pembentukan (571-632M), masa pemantapan (632-661M), masa peralihan (661-750M) dan masa kemajuan (750-800M) yang dibagi kepada fase kemajuan awal (750-800M) fase kemajuan tengah (800-850M) dan fase disentragsasi (1050-1258).

#### A. Kebijakan Pendidikan Pada Masa Pembentukan

Masa pembentukan (571-632) yaitu masa rasul di Mekah dan Madinah. Proses kebijakan pendidikan Islam dilangsungkan dengan pengembangan wawasan kependidikan membangun masyarakat berbudaya belajar. Sosialisasinya berlangsung secara intens di Mekah maupun Madinah Fokus utama menumbuhkan sistem budaya yang menempatkan belajar sebagai kebutuhan pribadi dan masyarakat. Menumbuh suburkan *reading minded* dikalangan komunitas Muslim Mekah dan Madinah dimulai dengan sistem hafal dan ditingkatkan ke penguasaan tulis baca,<sup>2</sup> Membangkitkan kesadaran bahwa belajar untuk memperkuat harkat martabat dan kualitas hidup, kemudian menumbukan kesadaran bahwa belajar tanpa batas waktu, usia, gender, tempat, bidang ilmu ataupun agama.

Pengembangan wawasan ini telah membuahkan kesemarakkan dan intensitas minat belajar yang tinggi dikalangan masyarakat muslim baik ketika di Mekah maupun setelah di Madinah. Ini terlihat dalam pembelajaran yang berlangsung di Al-Dar yang walaupun dibawah tekanan kafir Quraisy Mekah, maupun di Mesjid Madinah yang diikuti berbagai lapisan laki-laki, perempuan bahkan oleh orang dari daerah jauh di luar Madinah. Islam bertambah dengan pesat dari berjumlah  $\pm$  100 orang pada ketika ke Abessinia sampai  $\pm$  10.000 ketika mengerjakan haji wada' (2/632M).

Selanjutnya dalam proses pengembangan kemampuan proses belajar mengajar dalam membangun ide nilai norma dan aturan yang mendasari

<sup>2</sup> Meskipun menulis adalah keterampilan tak populer dan hanya ada beberapa saja yang menguasai keterampilan itu maka Rasul memerintahkan untuk belajar pada non Muslim termasuk kepada tawanan perang Badar yang memiliki kemampuan tersebut. Lihat al-Khurtubuti, *op-cit*, p. 26



sistem budaya dan mengembangkannya dalam suasana terbuka membahas seluruh permasalahan dalam bentuk dialogis, interpretasi dan mendorong kebebasan menalar secara sistematis logis dan transenden (Ijtihad) kebijakan teknis ini sesuai dengan ajaran al-Qur'an yang mendorong umat Islam untuk terus menerus melakukan observasi/penelitian alam mikro maupun makro. Komplikasi kebijakan ini tampak dari proses belajar mengajar dengan cara mulai dari membaca, menghafal, mentashihkan, menerangkan maksud sampai membahas berbagai persoalan dan aplikasi ayat sesuai realitas yang ada.

Kemudian pengembangan pendidikan yang terkait dengan materi kurikulum adalah berupa pewarisan/pelestarian nilai hidup atau sistem sosial budaya dilangsungkan dengan tiga langkah menyempurnakan dengan mengaplikasikan nilai<sup>3</sup> menolak dan mengganti dengan nilai baru<sup>4</sup> memunculkan nilai baru<sup>5</sup> dengan al-Qur'an dan penjelasan Rasul sebagai patokan norma.

Seterusnya dalam kebijakan pengembangan institusi kependidikan berbagai pusat belajar dikembangkan dimulai dengan saluran komunikasi orang perorang (*face to face*) pada tempat khusus (Dar) dan Mesjid. Suffah serta kutab. Proses kebijakan Pendidikan Islam lewat aspek budaya pada masa ini secara menyeluruh dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

<sup>3</sup> Seperti mengimplisitkan nilai Islami pada budaya hafal menjadi budaya hafal al-Qur'an, kegemaran membaca dan mendenandungkan syair menjadi kegemaran membaca al-Qur'an, seni pidato disalurkan melalui khutbah Jum'at dan penerangan Agama, Dar an Nadwah disubstitusikan menjadi Dar al Arqam yang difungsikan sebagai tempat belajar dan mengadakan musyawarah.

<sup>4</sup> Menolak paham fatalism Jahiliyah menggantikannya dengan manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi yang memegang amanah untuk mengelola, memanfaatkan dan menjaga kelestarian alam, serta berkewajiban menegakkan kemashlahatan dan meningkatkan kualitas diri secara terus menerus. Mengganti tassub menjadi ukhwan Islamiyah dan basyariah, diskriminatif kepada persamaan hak dan kewajiban asasi, membasmi perbudakan, mengganti dengan sistem anak angkat (maula) membasmi segala ketidak tanggung jawab umum terhadap masyarakat. Lihat Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation an Intelctual Tradition* ( Chicago: The University of Cicago, 1982), p. 5.

<sup>5</sup> Seperti perintah zakat, perintah shalat, memakmurkan Mesjid, perintahan membaca dan sebagainya.

Tabel 1  
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM  
MASA PEMBENTUKAN

Dimensi	Relasi dengan sistem budaya	Proses keberdayaan	Kualitas
Wawasan	Sistem budaya	Literation, reading minded, belajar tanpa batas, belajar untuk kesempurnaan ibadah & keimanan untuk meningkatkan kualitas hidup	Kesemarakn masyarakat belajar ((learning society
Proses	Sda	Terbuka, dialogis, Mengembangkan Pena-laran dan Memotiasi penelitian	Kemampuan berkembang yang tinggi
Materi	Sistem sosial	kontributip, komplementa tip atau pengimplisitan nilai, dekonstruktif dan konstruktif	Adaptabilitas, penyesuaian, kemandirian tinggi
Institusi	Simbol budaya	komunikasi, dari, keluarga mesjid dan kutab	Bertumbuhan senergi berkelanjutan

Jika diperhatikan secara lebih jauh berbagai proses keberdayaan pada masa pembentukan ini jelas pada priode ini telah dikembangkan wawasan kependidikan Islam dalam hubungan dengan aspek budaya yaitu gagasan *compolsory education* dan *program literacy reform* yang baru dilangsungkan pada abad 17 18 dan 19 di Eropa<sup>6</sup> dan juga telah mengembangkan wawasan masyarakat berbudaya belajar tanpa batas atau *no limit no study* yang baru muncul pada medio 1980-an yang menurut Prof, Noeng Muhadjir wawasan itu setidaknya mengandung optimasi kemampuan, kreasi warna kehidupan dan kesejahteraan manusiawi sebagai makhluk sosial dan makhluk ciptaan Tuhan.<sup>7</sup>

Kemudian kemampuan tenaga kependidikan maupun pendidik diarahkan pada proses belajar yang bersifat terbuka, dialogis serta

<sup>6</sup> Ingemar Fagerlind, *op-cit*, p. 145-147.

<sup>7</sup> Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial, Suatu Teori Pendidikan*, cet. IV, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1993), p. 51-52.



menekankan kebebasan nalar sistematis logis transenden (Ijtihad) serta mendorong melakukan penelitian<sup>8</sup> kebiasaan ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak bersifat *teacher centered* tetapi kombinasi dengan *child center* dan lebih jauh bersifat kontekstual inovatif ciri ini terdapat pada model pendidikan yang berdasarkan teori sumber daya manusia (*human capital*) yang *child centered* dan teori rekonstruksionisme yang menginginkan subyek didik merealisasikan diri secara wajar sehingga ada rekonstruksi sosial<sup>9</sup> yang dipandang relevan dengan kebutuhan perkembangan sosial budaya dewasa ini agaknya sesuai dan bahkan lebih dari yang diharapkan kaum liberal yang menginginkan pendidikan sebagai upaya pembebasan. Sedangkan pada pengembangan materi kependidikan dilangsungkan dalam bentuk pewarisan nilai dengan cara memberi kontribusi atau mengimplisitkan nilai dan menyempurnakan nilai yang ada serta menolak dengan mengganti dengan yang baru. Sampai dalam bentuk menawarkan nilai budaya yang baru sama sekali itu menunjukkan tingkat keberhasilan pendidikan yang ideal dimana pendidikan dalam peran pelestarian budaya cenderung bersifat *cultural heritage* atau sampai pada penyempurnaan nilai budaya. Selanjutnya proses keberhasilan pendidikan Islam pada institusi kependidikan sumber belajar sangat luwes dan berkembang sesuai kebutuhan dan keberadaannya saling melengkapi atau ada sinergi yang kuat. Dilihat dari perkembangannya pendidikan Islam pada masa pembentukan ini telah melampaui jauh revolusi pertama dalam perkembangan dunia pendidikan. Menurut Ashley revolusi I dalam dunia pendidikan berlangsung ketika masyarakat memberi wewenang kepada seseorang pendidik, tumbuhnya profesi guru itu pendidikan menjadi beralih dari rumah ke sekolah.<sup>10</sup>

Telaah ini menunjukkan pendidikan Islam pada masa ini menunjukkan keberhasilan yang tinggi baik kesemarakannya maupun kemampuan serta daya adaptasi dan perubahan yang tinggi.

<sup>8</sup> Ijtihad suatu mekanisme penting dalam pemberdayaan semua aspek budaya. Dengan Ijtihad semua nilai esensial dan universal Islam dapat dikembangkan, lihat Muhammad Iqbal, *op-cit*, p. 8. Lihat Harun Nasution, *op-cit*, p. 49. Fazlur Rahman, *op-cit*, p. 19-20. Marshal G. Hudgson, *The Venture of Islam III*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1974), p. 274-275.

<sup>9</sup> Imam Barnadib, *Dasar-Dasar Kependidikan, Memahami Makna dan Prespektif Beberapa Teori Pendidikan*, (Jakarta: Chalia-Indonesia, 1996), p. 36,45.

<sup>10</sup> Yusuf Miarso, *dkk., op-cit*, p.2.

Capaian pada masa pembentukan itu selanjutnya diteruskan pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada proses pengembangan wawasan kependidikan kegiatan tulis baca dilengkapi dengan pembukuan al-Quran dalam satu kitab yang di sebut Mushaf yang kemudian di sebarkan secara luas ke seluruh mesjid ibu kota daerah untuk kemudian disalin seutuhnya agar tersebar lebih luas keserata daerah. Pada tahap ini suatu era belajar dengan reperensi tertulis mulai. Pentashihan bacaan dan hafalan menjadi dua sumber, hafalan guru dan teks yang saling dapat diverifikasikan.

Sedangkan pengembangan keberdayaan proses belajar diorganisasikan Ijtihad Jama'i semacam konsorsium ahli. Namun pada materi yang diwariskan cenderung bersifat pelestarian nilai yang telah terbentuk. Tampak ada semacam penurunan dari kondisi sebelumnya yang lebih kreatif. Kelembagaan pendidikan sebagai media terus dikembangkan secara kuantitatif sesuai dengan makin meluasnya daerah Islam.

### **B. Kebijakan Pendidikan Masa Peralihan**

Pada masa peralihan (661-750) proses keberdayaan pendidikan Islam terutama dalam pengembangan budaya belajar kegiatan belajar masyarakat dilandasi dengan penempatan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar dan bahasa resmi kebijakan ini berdampak positif namun warga Arab dan non Arab Muslim menjadi suatu bahasa dalam mempelajari Islam. Pada priode ini para sahabat yang menjadi guru cenderung untuk menyampaikan hafalannya tentang ayat maupun hadist Rasul serta interpretasi berdasarkan yang diungkapkan adalah tujuan al-Quran secara keseluruhan. Kecenderungan tafsir dengan pendekatan bil ma'tsur dan bil lughat serta pengembangan syariah berdasarkan hadis atau prilaku Rasul ataupun ketetapan Rasul. Materi pengajaran terfokus pada bahan ajar yang telah terimplisitkan nilainya atau telah menjadi bahagian budaya Islam masa sebelumnya. Kegiatan Ijtihad berlangsung terbatas pada ayat ayat hukum ibadah dan berdasarkan pengalaman menyeluruh tentang al-Quran jadi tidak mengutip ayat per ayat kecuali yang terkait langsung.<sup>11</sup> Disebabkan setiap ulama memiliki pandangan dan pengalaman yang berbeda maka sahabat yang paling dekat adalah yang paling ternama. Saat ini telah terjadi gerak mobilitas penuntut ilmu dari satu daerah ke daerah lain. Kecenderungan materi dan orientasi pengajaran serta kebutuhan

---

<sup>11</sup> Fazlur Rahman, *op-cit*, p. 27.



masyarakat akan penjelasan langsung Rasul menyebabkan tuntutan untuk pengkodifikasian hadits meningkat. Transformasi nilai dalam bentuk ini mendapatkan momentumnya setelah hadits dapat dibukukan.

Untuk mempermudah mempelajari dan menangkis serangan dan non Muslim terhadap ajaran Islam ulama menyusun disiplin ilmu Naqliyah seperti Tafsir, Fiqih, Aqidah, Hadits dan bahasa Arab sebagai alat mempelajari langsung ajaran Islam ke sumber utamanya. Namun adanya orientasi yang sempit telah menumbuhkan sikap defensif pada non-Muslim dan konfrontatif pada setiap perbedaan paham seperti tampak terhadap paham Khawarij, Syi'ah (Alawiyin) yang belatar paham qadariyah. Kecendrungan ulama malah mengembangkan paham fatalis seperti tergambar pada sikap umum menerima pandangan Murjiah dengan berdalih kemashlahatan. Hal ini merubah keberdayaan pendidikan Islam yang sebelumnya menumbuhkan kesadaran kritis. Kondisi umum keberdayaan pendidikan Islam masa ini dapat dilihat pada table II di bawah ini.

TABEL II  
PROSES KEBERDAYAAN PENDIDIKAN ISLAM  
MASA PERALIHAN (661-750)

Dimensi	Hub. Dengan budaya	Proses keberdayaan	kualitas
Wawasan	Sistem budaya	Pengembangan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, kondifikasi hadits	Kesemaran aktivitas pendidikan pengembangan penuntut ilmu
Proses	Sda	Definisi, monologis, berdasar pengalaman pribadi dan makna bahasa serta riwayat	Kemampuan berkembang terbatas
Materi	Sistem sosial	Transformasi nilai bersifat pewarisan nilai yang ada	Adaptabilitas rendah
Institusi	Symbol budaya	Kualitas bertambah sesuai perkembangan wilayah	Berkembang statis

Dari proses keberdayaan ini terlihat bahwa pada masa peralihan ini kesemaran berkembang eksklusif kemampuan terbatas atau terpusat pada guru (*teacher centered*). Begitu pula pada pewaris budaya bersifat cultural heritage. Kondisi ini menumbuhkan sikap sektarian dan tidak berkembang. Keberdayaan pendidikan Islam makin kehilangan momentumnya, menjadi verbalis dan sektarian.

### C. Kebijakan Pendidikan Masa Kemajuan Awal

Kondisi berubah pada masa kemajuan awal (750-800) wawasan berkembang optimal, kesadaran belajar bangkit dan semarak, disertai dengan gerakan penterjemahan berbagai warisan intelektual lama (Yunani), Persia, India, Cina) yang mendorong aktivitas belajar meluas. Kondisi ini makin berkembang dengan tumbuhnya industri perbukuan sehingga mudah untuk mendapat manuskrip sebagai bahan serta tersedianya perpustakaan.

Seiring dengan kondisi itu proses belajar mengajar berlangsung secara terbuka dinamis dan member kesempatan setiap individu mengembangkan minat dan penalaran serta melakukan kajian dan percobaan. Banyak ilmuwan yang lahir dengan pengetahuan generalis bernafas Islam. Tanpa kecuali di Mesjid yang terlihat dengan lahirnya aliran Muktazilah (rasionalis).

Pewarisan nilai berlangsung dengan upaya pengimplisitan nilai dan pencerahan serta membangun budaya Islam yang lebih optimal. Pusat belajar berkembang pesat secara kuantitas dan kualitas. Mesjid terus tumbuh diantaranya berkembang menjadi Mesjid Jami', Mesjid Khan dan berbagai majlis ilmu menjamur serta khalaqah berjalan intensif, kegiatan juga berlangsung di Baitul Hikmah Maktabah dan observatorium serta Bimaristan bahkan di pabrik pabrik.

Keberdayaan yang tinggi ini pada (800-850) berubah dengan adanya kecenderungan menjadikan paham Muktazilah sebagai ideologi Negara. Keinginan ini diikuti dengan paksaan pengakuan yang di sebut dengan mihmah. Prof. Zakiah Daradjat memaknai dari terminologi bahasa dengan "masa huru-hura/bencana".<sup>12</sup> Berbeda dengan orientalis menyebutkan sebagai inquisisi.<sup>13</sup> Kebijakan ini telah menimbulkan hilangnya proses diskusi sebagai sarana menjembatani berbagai paham, memprefikasi Ijtihad pribadi dan wadah menyerapkan nilai terhadap nilai bahasa lainnya. Suasana yang konmprontatif ini menyebabkan pemikiran masyarakat terbelah menjadi dua kutub kalangan rasionalis dan tradisionalis yang menguat dengan munculnya aliran Asy'ariyah.

### D. Kebijakan Pendidikan Masa Kemajuan Tengah

Pada masa kemajuan tengah (800-850) keadaan terus berlanjut perkembangan hanya terjadi pada ilmu praktis. Kecurigaan terhadap

<sup>12</sup> Zakiah Daradjat, *Suatu Analisis Perkembangan Pemikiran Pendidikan Islam Masa Abbasiyah*, uraian lepas 27 September 1998, (Jakarta: Wisma Sejahtera, 1998).

<sup>13</sup> W. Montgomery Watt, *op-cit*, p. 69.



ilmu rasional makin menebal walaupun Mutawakil mencabut mihah dan memberi angin pada kaum tradisional. Kondisi terus berlanjut dengan mencuatnya politik kekuasaan kalangan militer sampai bani Buwaihid mengambil alih kekuasaan Khalifah. Buwaihid mengembangkan ajaran Syiah sebagai mazhab negara walaupun tanpa paksaan tetapi kondisi makin mengkristal dan kesenjangan makin parah sampai akhirnya benar-benar berubah ketika Saljuk mengambil alih pucuk pimpinan dan melalui Wazir, Nizam al-Mulk dibangun Madrasah dalam jumlah besar yang mengajar fiqh Syafi'i dan teologi Asyariah. Secara pelan tetapi pasti ilmu Naqliyah terpisah dari ilmu Aqliyah. Ilmu Aqliyah dipandang lebih bernilai untuk kebahagiaan akhirat yang kekal. Kondisi pengajaran makin buruk dengan dikembangkan Ijmak dan diperkecilnya kemungkinan untuk melakukan ijtihad segala sesuatu sudah final oleh para ulama terdahulu.

Keadaan umum kebanyakan pendidikan Islam pada masa kemajuan awal sampai akhir dan masa disintegrasi tersebut seperti tergambar pada table III di bawah ini:

**TABEL III**  
**PROSES KEBERDAYAAN PENDIDIKAN ISLAM**  
**MASA KEMAJUAN (750-1250)**

Dimensi	Proses kebijakan	kualitas
750-800 1. wawasan	Penterjemahan berbagai ilmu yunani, Persia lingkup belajar maluas lintas disiplin & lintas kultural	Kesemaran aktivitas belajar mengajar agama, filsafat dan ilmu pengetahuan
2. proses	Terbuka, dinamis, penelitian dan ijtihad berkembang, diskusi intensif tentang ilmu pengetahuan agama dan filsafat.	Kemampuan progresif
3. materi	Pengimplisitan dan kontribusi nilai terhadap budaya	Adaptasi konstruktif

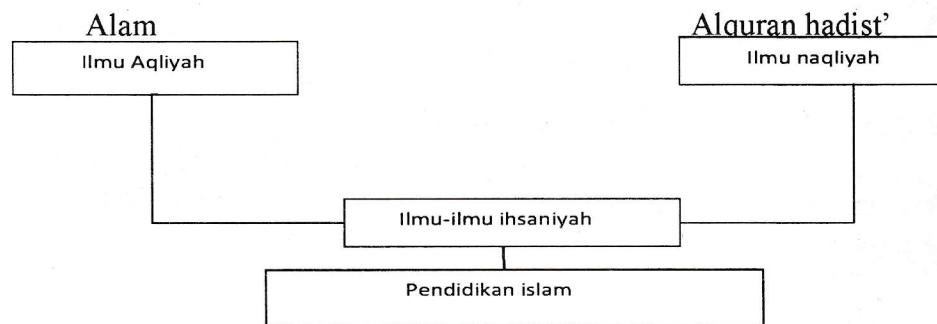
4. lembaga	Meluas kuantitatif dan (kualitatif(mesjid -mesid khan-mesjid jami-baithul hikmah-majelis ilmu-maktabah-bimaristan - observatorium dan pabrik.	Perubahan terpadu
800-1050 1.wawasan	Terfokus kepada suatu paham (mu'tazillah)	Kesemaranan aktivitas bejar menyempit berjalan terpisah
1. proses	Eksklusif itijihad terbatas pada mazhab	Kemampuan terbatas
2. materi	Internalisasi nilai (cultural hetetage)	Adaptasi regressive
3. lembaga	Meluas kuantitatif	Berkembang monoton
1050-1250 1. wawasan	Terpilah antara naqliyah dan aqliyah yang utama ilmu naqliyah	Kesemaranan aktivitas belajar dominan ilmu naqliyah
2. proses	Eksklusif menutup itijihad dan memberlakukan ijma' dan membakukan pendapat ulama sebagai telah final (taqlid)	Kemampuan statis
3. materi	Pendapat mazhab yang telah dibakukan	Adaptasi regresif
4. proses	Madrasah dalam system yang lebih modern	Berkembang kualitas sarana

Dari kecenderungan proses keberdayaan pendidikan Islam sejak masa pembentukan sampai masa terakhir, maka tampak bahwa pendidikan Islam masa kemajuan awal berlangsung dalam suasana kosmopolit. Masyarakat telah menjadi masyarakat intelektual dan peradaban tinggi memasuki era baru. Visi pendidikan tanpa batas berlangsung secara intensif terlihat dari penterjemahan seluruh hazanah ilmu pengetahuan dan filsafat berbagai bangsa. Kegiatan belajar secara kualitas dan kuantitas menunjukkan kemajuan yang tinggi. Proses pengajaran yang terbuka dinamis dan kreatif dengan mengembangkan tafsir, ijtihad dan diskusi serta penelitian bukan saja sebagai produk tetapi sebagai proses dan metodologi pengajaran. Hal ini jauh melampaui harapan ahli pendidikan modern dengan rancangan *metode discovery* dan *inquiry*.



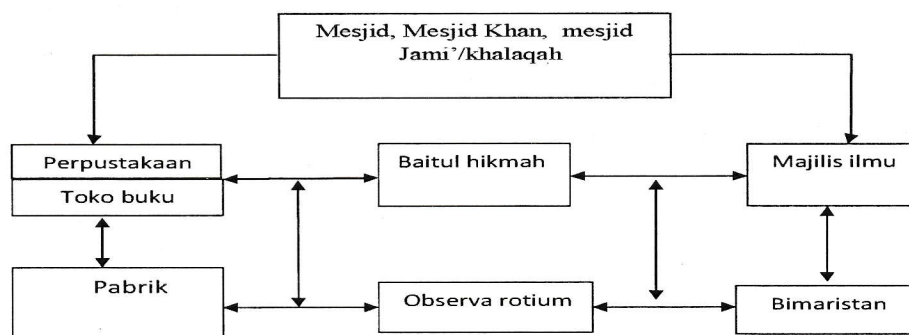
Proses pengembangan bahan dengan transformasi nilai dalam kerangka Islam tampak berjalan efektif dari tiga arah, pertama dengan memberikan kontribusi bagi penyempurnaan ilmu pengetahuan dan filsafat, kedua memanfaatkan untuk menemukan, memperluas, memperkuat dan memodren wawasan dan melahirkan ilmu pengetahuan dan filsafat yang ihsan (lebih segar dan bermanfaat sesuai dengan kodrat kemanusiaan). Ketiga membangun budaya yang sama sekali baru dari kajian inter dan antar disiplin ilmu. Disini tanpa daya adaptasi keberdayaan pendidikan Islam sangat tinggi. Proses mekanisme pembelajaran itu dapat diuraikan pada figure I dibawah ini:

FIGURE I: MEKANISME PENGEMBANGAN MATERI PENDIDIKAN ISLAM



Dari segi kelembagaan keberdayaan pendidikan tampak pada mekanisme kelembagaan pendidikan yang terpadu. Baitul hikmah majelis ilmu sebagai sentral seluruh aktifitas keilmuan. Baitul hikmah menjadi pusat riset dan pengembangan, dilengkapi dengan perpustakaan dan observatorium. Mekanismenya tampak dalam figure berikut:

FIGURE II: MEKANISME KELEMBAGAAN ISLAM MASA KEMAJUAN AWAL



Pada masa Seljuk kalangan Sunni yang telah terlanjur mencurigai intelektualis memapankan pahamnya dan mengutamakan ijmak ulama dan kemudian secara perlahan Itjihad berhenti sendirinya pada masa berikutnya menumbuhkan Taqlid. Masyarakat menjadi jemu, dan pendidikan Islam kehilangan keberdayaannya.

Dari proses keberdayaan tiap masa itu tampak hal-hal yang menjadi inti pendukung kebijakan pendidikan Islam lewat aspek budaya itu adalah sebagai berikut :

1. Terbinanya masyarakat beriman dan berbudi daya belajar yang karakteristik adalah (a) Belajar adalah ibadah dan upaya meningkatkan keimanan, (b) Mengajar dan belajar adalah hak dan kewajiban setiap individu, (c) Memegang konsep belajar tanpa batas (usia, waktu, objek, wilayah, sumber maupun ruang lingkup) dan senantiasa berorientasi kepada kebenaran.
2. Tokoh pendidikan (nabi/ ulama) dalam proses kependidikan bersifat terbuka, bebas, dinamis dan kreatif dan mengembangkan musyawarah dengan komitmen penuh dengan keimanan dan keIslaman. Demikian pula dalam mencari makna esensial dan universal ayat, dorongan meneliti, maupun melakukan ijtihad.
3. Dalam pewarisan dan pengembangan nilai nilai yang bersumber dari kittabullah dan sunah Rasul menjadi sumber utama bagi kontribusi budaya dan rujukan serta paduan nilai budaya lainnya. Sedangkan budaya yang telah tererahkan dikonsentrasikan untuk memoderenkan dan memperkuat wawasan meningkatkan kualitas dan kuantitas amal shaleh, keilmuan dan keimanan.
4. Adanya penguasaan jaringan informasi dan pusat belajar, pusat pengembangan ilmu yang terpadu Masjid dengan halaqah dan majelis taklim disatu pihak dan baitul hikmah-maktabah-bimaristan-majlis ilmu-observatorium-barik dipihak lain.



## **BAB VII**

### **POLARISASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN ISLAM KE MASA DEPAN**

A.

**S**

dar  
ber  
ada  
me  
dar

unt  
ser  
usa  
dik  
aqi  
ser

—  
(In  
Per  
Ke

me  
Ra  
Ra  
Un





## BAB VII

# POLARISASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN ISLAM KE MASA DEPAN

### A. Implementasi Pembaharuan Pendidikan Islam

**S**ejak awal abad ke XVIII telah berlangsung pembaharuan bidang pemikiran dan juga pendidikan Islam. Upaya ini sebagai refleksi dari kesadaran akan kelemahan kejumudan, keterbelakangan dan ketidakberdayaan umat Islam terhadap kemajuan Barat. Usaha pertama justru adalah memecahkan dinding kaca tradisional yang tebal dan telah mapan membelenggu budaya masyarakat Islam sehingga menjadi anti intelektual dan anti perubahan serta terikat pada otoritas keulamaan.

Gerakan pembaharuan itu menjuruskan perhatian pada dorongan untuk membuka pintu ijtihad, kembali kepada Nash dan Sunnah dan semangat untuk mengetahui sunatullah.<sup>1</sup> Sebelum mereka sudah ada juga usaha kearah perbaikan seperti yang dilancarkan oleh Syekh Abdul Wahab, dikenal dengan gerakan Wahabiyah menitik beratkan pada upaya perbaikan aqidah dengan seruan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, menolak semua bentuk bid'ah khufarat yang tumbuh dalam kehidupan ummat.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Upaya pembaharuan ini diperoleh oleh Sayid Ahmad Khan, Sayid Amir Ali (India), Jamaluddin AL Afghani, Nanik Kemal (Turki), Muhammad Abduh (Mesir) Pembaharuan ini mendapat respon yang luas dari berbagai kalangan ummat Islam. Kelompok pembaharuan ini kemudian disebut dengan kelompok Modernis.

<sup>2</sup> Gerakan ini disebut juga Puritanisme atau Purifikasi, hakikat gerakan ini ingin mengkonstruksi spritualitas dan moralitas Islam atas dasar kemurnian awal Islam. Fazlur Rahman menyebutkan gerakan ini dengan rivivalisme atau fundamentalisme, lihat Fazlur Rahman, *Islam and Modrenity, Transformation an Intelectual Tradition*, ( Chicago: The University of Chicago, 1987), p. 136.

Gerakan pembaharuan awal ini (moderisme klasik) memandang perlunya persatuan universal kesatuan umat Islam (Pan Islamisme) dan berkesimpulan bahwa kemunduran umat Islam karena hilangnya semangat penyelidikan ilmiah yang dituntut Al-Quran', justru itu perlu kembali<sup>3</sup> dengan proposisi ini umumnya usaha untuk mengambil alih sebesar-besarnya seluruh pengetahuan dan teknologi barat menjadi corak gerakan pembaharuan masa awal ini.

Tentunya hal ini mendapat tantangan dari sebahagian kalangan umat Islam terutama yang tradisional dan juga kalangan fundamentalis. Kondisi ini memberi warna baru bagi gerakan pembaharuan berikutnya (modrenisme kontemporer).

## B. Beberapa Pola Kebijakan Pembaharuan Pendidikan Islam

Secara umum upaya pembaharuan dalam bidang pendidikan Islam dari aspek budaya menjadi terpola kepada:

- Mengambil secara bulat semua ilmu sains dan pemikiran barat dan mengenyampingkan pendidikan agama (adoptif)
- Membiarkan keduanya terpisah yang kemudian menciptakan dua pola pikir dalam satu individu (dualistik)
- Mencampur kedua unsur dengan proporsi lebih pada pendidikan secular/umum namun masing masing berjalan sendiri-sendiri.<sup>4</sup>
- Mengintegrasikan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum.

Sementara itu dari kalangan tradisionalisme tumbuh pula upaya untuk memperbaiki system pendidikan agama dan memperbanyak tempatnya.

<sup>3</sup> Para moderenisit itu memandang (1) bahwa suburnya perkembangan sains dan semangat ilmiah abad IX-X dikalangan kaum Muslimin adalah buah dari usaha memenuhi tuntutan al-Qur'an agar manusia mengkaji alam semesta hasil karya Tuhan yang telah diciptakan baginya, (2) Pada abad pertengahan yang akhir semangat penyelidikan ilmiah telah merosot dan karena masyarakat Muslim lalu mandek dan merosot, (3) Bahwa Barat telah menggalakkan keajaiban ilmiah yang sebahagian besarnya telah dipinjamkan dari kaum Muslimin dan arena itu mereka memperoleh kemakmuran bahkan menjajah negeri-negeri Muslim sendiri, dan (4) Karena itu jika kaum Muslim mempelajari kembali sains Barat yang telah berkembang akan berarti menemukan kembali perintah Al-Qur'an yang terabaikan, Fazlur Rahman, *Ibid*, p. 50-51

<sup>4</sup> *Ibid*.



### a. Pola Adoptif

Pola pertama bersifat adoptif terlihat di Turki pada masa Kemal Attaturk di Mesir oleh Muhammad Ali Pasya serta Dinasti Pahlevi di Iran. Kemal Attaturk melakukan kebijakan pola adoptif ini dengan cara menutup semua lembaga pendidikan agama dan menggantikan dengan pendidikan sekular model Barat, shalat dan azan diperintah dalam bahasa Turki<sup>5</sup> Ali Pasya di Mesir mulai dengan gerakan penerjemah seluruh sains di Mesir dan pemikiran Barat kedalam bahasa Arab dan membuka sekolah-sekolah Model adopsi ini tampaknya hanya berjalan dengan pemaksaan. Hasilnya juga tidak memuaskan, karena tidak sesuai dengan realita sosial dan tidak bisa menerapkan unsur sains yang dipelajari ditambah adanya mayoritas yang tidak menerima, hal ini menyebabkan kebijakan itu tidak bertahan lama dan segera mengalami perubahan.<sup>6</sup> Sedangkan di Iran dinasti Pahlevi merubah semua sistem madrasah menjadi sistem sekolah dan pengetahuan agama tidak diajarkan di sekolah. Pendidikan agama hanya ada dikalangan keluarga dan di mesjid akhirnya baru berubah setelah adanya revolusi Islam yang dimulai oleh Ayatollah Khomeini.

Di Indonesia pola pertama ini secara terbatas pernah pula diperkenalkan Abdullah Ahmad di Padang dengan Adabiyah Schoolnya namun pada dasarnya pelajaran agama tetap tidak dihilangkan walau muatannya kecil.

<sup>5</sup> Sekularisasi ini dilakukan setelah Mustafa Kemal gagal untuk memasukkan pendidikan pada kurikulum tradisional setelah mengkampanyekannya, 1922-1928.

<sup>6</sup> Di Turki karena pertimbangan politik demokratis pada tahun 1946 pemerintah Turki memutuskan untuk membuka Pendidikan Khusus tenaga keagamaan dan kemudian tahun 1950 dibuka pula Fakultas Teologia. Tampak Turki bergerak menjadi pola kedua. Sementara itu di Mesir atas kritikan Muhammad Abduh ilmu agama dimasukkan di sekolah-sekolah sekuler dan ilmu umum direkomendasikan masuk ke Al-Azhar tampak Mesir beralih ke pola ketiga. Kritikan Abduh terhadap model adopsi Ali Pasya dikutip Fazlur dari Muhammad Abduh, *Al-Amal al-Kamil*, sebagai berikut:

“Keahlian yang diprioritaskan menjadi tidak berarti karena tidak diberikan pendidikan nilai...kondisi moral mereka lebih buruk dari orang-orang buta huruf yang masih bersifat alamiah, mereka mengalami frustrasi mendapati dirinya tidak bias melakukan pekerjaan yang dilakukan ayah dan keluarganya. Dengan demikian ia menggunakan umurnya dengan sepenuhnya menganggur atau hamper setingkat dengan itu. Fazlur Rahman, *Ibid*, p. 70.

### b. Pola Dualistik

Secara umum pola kedua juga berlangsung di Indonesia pada masa penjajahan Belanda sebagaimana juga di India dibawah penjajahan Inggris.

Pola ini menghasilkan generasi yang berpola piker terpisah sehingga tumbuh golongan yang berbudaya ke Barat-baratan yang bersikap apriori terhadap generasi yang berbudaya Islam tradisional demikian pula sebaliknya.

### c. Pola Adaptif

Setelah kemerdekaan bangsa-bangsa Muslim, semua golongan yang ada, akhirnya memilih pola ketiga sebagai upaya pemberdayaan dalam bentuk adaptasi dalam taraf asimilasi dan dalam taraf akomodasi Pola Adaptif yang assimilatif seperti yang berlangsung di Madrasah dan pesantren yang bersifat akomodatif seperti yang berlangsung di sekolah.<sup>7</sup>

Pemikiran yang mendasari pembaharuan pola ketiga ini tampak sangat kuat berorientasi pada gagasan Abduh yang dicoba diterapkan di Mesir. Abduh mempelopori kebijakan memasukkan pelajaran umum ke dalam kurikulum Azhar. Kemudian gagasan ini dikembangkan pula oleh Sayid Ahmad Syahid dengan mendirikan Madrasah Doeband, selanjutnya Sayid Ahmad Khan di India mendirikan MOAC (*Muhammadan Anglo Oriented College*) di Alighar. Kemudian di Indonesia gagasan ini terjadi pada gerakan pendidikan yang dilakukan oleh Jam'iyah Mahmudiyah Lithalibil Khairiyah Tanjung Pura Langkat yang sejak tahun 1898 telah menggerakkan pendidikan Islam dalam bentuk pendidikan madrasah yang menyerupai pendidikan sains. Gagasan pola ketiga ini dipopulerkan oleh Muhammadiyah (1912) diterima secara umum sekitar tahun 1926.

### d. Pola Inovatif

Pola inovatif merupakan gerakan pembaharuan pola ini melakukan usaha penyegaran sistem budaya dengan mempelopori gerakan kembali penyelidikan tentang *Sunnahtullah*, mendorong

<sup>7</sup> Lihat Hasan Lunggung, *Pendidika Islam Menghadapi Abad ke 21*, (Jakarta: Al-Husna, 1984), p. 68.



penggunaan akal. Seperti yang dilakukan Muhammad Abduh untuk mendukung gerakan tajdidnya Abduh menerbitkan majalah *al Urwat al Wusqa* serta tafsir al-Manar, Sayyid Ahmad Khan juga memanfaatkan jaringan informasi dengan menerbitkan majalah *Tahzibul Akhlaq* dan mendirikan sekolah. Melalui penerbitan ini informasi untuk kontribusi budaya lebih mudah tersosialisasikan.

Pada periode berikutnya langkah ini diikuti pula oleh para pembaharu lainnya termasuk di Asia Tenggara seperti penerbitan majalah Al-Munir (1911) atas prakarsa H. Abdullah Ahmad, Al-Akhbar (1913), Al-Islam (1911) diterbitkan SI, Al-Imam (1908) diterbitkan Syekh Taher.<sup>8</sup> Tercatat di Sumatera Timur Jamiyah Mahmudiyah li Thalabil Khairiah menerbitkan majalah Bintang Islam. Kegiatan media informasi ini sangat diutamakan oleh kalangan pembaharu untuk memberdayakan Pendidikan Islam, bahkan Persis menjadikannya sebagai kegiatan utama organisasi walaupun organisasi ini relatif kecil tetapi mempunyai pengaruh yang luas disebabkan publikasi-publikasi yang mereka keluarkan.<sup>9</sup>

#### e. Pola Integrasi

Kebijakan pola integrasi sesungguhnya merupakan kebijakan yang paling awal dan bersifat inherent dengan misi utama ajaran Islam sepenuhnya sebagai refleksi perintah pertama yang disampaikan kepada Rasulullah untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan memadukan nilai yang tersurat dan tersirat, hal duniawiyah harus terpadu dan selaras dengan ukhrawiyah. Segala kegiatan keilmuan tentang grasi sepenuhnya dengan nilai ilahiyah sebagaimana di kemukakan pada ayat 1-5 surat al-Alaq<sup>10</sup>. mengimplementasikan ayat ini Rasul membuat kebijakan yang menjadi landasan kebijakan selanjutnya oleh para penerusnya.

Pada salah satu hadisnya Rasul menyampaikan kebijakan dalam kegiatan pendidikan pengajaran yang lugas dan jelas, bahwa

<sup>8</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1982), p. 47

<sup>9</sup> *Ibid.* p. 37-38.

<sup>10</sup> "Bacalah dengan menyebut nama Allah yang menjadikan segala sesuatu di jagat raya ini. Allah yang menjadikan manusia dari segumpal darah, bacalah Allah Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar menulis dengan pena. Dialah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.

kepentingan hidup di dunia dapat dipenuhi dengan ilmu pengetahuan, kepentingan akhirat juga harus dengan ilmu, jika memenuhi kepentingan keduanya dan akhirat juga dengan ilmu.

Secara kreatif kebijakan integrasi ini di implementasikan dengan kebijakan mengimplisitkan nilai Islam pada khazanah keilmuan berbagai bangsa terutama filsafat, serta kebijakan objektivifikasi nilai-nilai universalitas Islam untuk membangun tata pemerintahan di Madinah.

Kegiatan untuk integrasi ilmu duniyah dan ilmu aghliyah sangat intens berlangsung di berbagai majlis ilmu pada masa kemajuan. Pola integrasi ini mulai ditinggalkan seiring dengan makin menguatnya paham yang mengutamakan *ulumul addiniyah* dan mengenyampingkan *ulumul shaibiyah*, maka kebijakan integrasi mulai ditonjolkan. Kebijakan kearah integrasi mulai tumbuh kembali seiring dengan adanya gerakan perubahan yang dipolopori Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Jamaluddin al-Afghani, dan islah perubahan lainnya. Pola ini makin menguat pada dekade delapan puluhan dengan berkembangnya ide Islamisasi ilmu pengetahuan yang mulai marak setelah Konperensi Pendidikan Islam sedunia I di Mekkah (1977) kemudian II di Islamabad (1980) dan III di Bangladesh (1981) selanjutnya IV di Jakarta (1987).

### C. Kebijakan Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia

Pembaharuan Pendidikan Islam mulai berlangsung pada awal abad XX ketika kesadaran akan keterbelakangan dari bangsa penjajah makin kuat. Untuk mengetahui pembaharuan yang dilangsungkan guna pemberdayaan itu akan dilihat secara historis sistimatis.

#### a. Kebijakan pendidikan Islam Indonesia memperdayakan peradaban

Kebijakan Pembaharuan pendidikan dari aspek budaya memulai dari upaya kebijakan memperbaharui kurikulum dan model lembaga pendidikan yang dilakukan Abdullah Ahmad di Padang Sumatra Barat tahun 1904. Beliau mendirikan Adabiyah School, yang memberikan pengetahuan umum dengan sedikit pelajaran agama. Usaha ini mendapat tantangan terlebih lagi setelah kepala sekolah nya diangkat seorang berkebangsaan Belanda.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Adabiyah School kemudian menjadi Hollandsch Malaische School Adabiyah, pelajaran agama akhirnya kurang diperhatikan, sehingga sekolah ini tidak diterima karena dipandang mengadopsi Barat. Ia sendiri oleh kalangan tertentu disebut bukan sebagai modernisator melainkan seorang Holandisator. Lihat Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah*, (Jakarta: LP3ES, 1985), p. 42.



Selanjutnya beberapa tokoh mulai memperkenalkan model klasikal di Maktab dan memasukkan tambahan Madrasah dengan pelajaran umum. Bentuk ini kemudian disebut dengan madrasah dengan pelajaran umum tetapi pelajaran agama lebih banyak. Madrasah baru berkembang dan diterima masyarakat sekitar tahun 1916. Karena menunjukkan lebih menonjol ciri keagamaannya tetapi juga refleksi kesadaran untuk mengejar ketinggalan dan upaya membebaskan diri dari kaum penjajah (Belanda). Dengan motif yang sama sebelumnya 1913 Al Irsyad mendirikan Madrasah.<sup>12</sup> Setahun lebih awal di Sumatra Utara berdiri Madrasah Maslurah.<sup>13</sup> Selanjutnya berdiri Madrasah lainnya seperti Sumatra Tawalib (1918)<sup>14</sup> tahun 1937 berdiri Madrasah Pendidikan Guru oleh Rahmah<sup>15</sup> Zainuddin Labai tahun 1915 mendirikan Diniah School dan 1 November 1923 ia mendirikan Madrasah Diniah Puteri.<sup>16</sup>

Bentuk adaptif (pola ketiga ini) lebih meluas dengan munculnya Muhammadiyah (1912) sebagai organisasi yang sepenuhnya bergerak dalam bidang sosial budaya dan pendidikan. Kehadiran Muhammadiyah dapat disebut babak baru dalam implementasi pemberdayaan pendidikan Islam ditandai dengan beralihnya peranan individual dan hubungan personal dan kekeluargaan kepada hubungan pengurus dengan anggota. Tampaknya kehadiran organisasi bukan saja gejala baru tetapi sebagai akomodasi aspirasi yang tak terwakili

<sup>12</sup> Dengan penjenjangan (1).Awaliyah (3 tahun), Ibtidaiyah (4 tahun), Tazhiziyah (2 tahun), Muallimin (4 tahun), tahassus (2 tahun). Muhamud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Mutiara, 1979), p. 309.

<sup>13</sup> Selain Maslurah 1 Desember 1912 didirikan pula Madrasah Azizah dan Madrasah Li Banat tahun 1923. Madrasah-madrasah ini didukung dengan dana wakaf dari kerajaan Langkat. Mamud Yunus, *Ibid*, p. 289-299.

<sup>14</sup> Madrasah tawaib dipimpin Haji Rasul memiliki cabang dibeberapa daerah termasuk Surau Parabek. Pada 21 Januari 1928 mengadakan pertemuan cabang dalam pertemuan itu direncanakan mendirikan Pendidikan guru. Dalam pertemuan itu hadir tokoh cendekiawan dan ulama seperti Syech Muhammad Jamil Jambek, Syech Ibrahim Musa, Haji Jalaluddin Thaib, Haji Abdul Syakur, Abdul Aziz Sultan dan Dr. Ahmad Shaleh, ide ini kemudian direalisasikan oleh Rahmah tahun 1935. Lihat Deliar Noer, *Geraka Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1995), p. 59.

<sup>15</sup> Madrasah untuk guru pria Al Kuliyah al-Muallimin al-Islamiyah dan untuk wanita Al-Kuliyah al-Muslimat al-Islamiyah. Lihat Deliar Noer, *Ibid*, p. 62.

<sup>16</sup> Madrasah Diniah menggunakan sistem ke-edukasi. Madrasah ini mendapat sambutan baik. Sampai tahun 1922 saja ada 15 Madrasah yang sama di seluruh Minang Kabau ( Sumatera Barat), *Ibid*, p. 62.

pada pemerintah penjajahan. Gejala yang sama terlihat di India dengan berdirinya MOAC dan Nahdathul Wathan. Muhammadiyah mendirikan berbagai sekolah mulai tingkat TK sampai ke Universitas dan membuka pula berbagai jenis sekolah kejuruan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang didirikan di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya juga mendirikan lembaga pendidikan Agama model pesantren untuk kaderisasi ulama. Secara kuantitatif telah memberikan pemberdayaan yang besar bagi Pendidikan Islam di Indonesia. Muhammadiyah juga menentang Tarekat yang di anggap berlebih-lebihan.

Selanjutnya setelah kelahiran Muhammadiyah berdiri pula organisasi lainnya seperti NU(1926), Persis(1915), Al-Washliyah(1928), Al-Ittihadiyah(1930), Perti, Persyarikatan Ulama(PUI)(1911), Al-Irsyad, dan lagi organisasi sosial pendidikan keagamaan lainnya serta berbagai yayasan Pendidikan baik yang berapliasi pada organisasi atau pun yang berdiri sendiri.

Umumnya organisasi dan yayasan itu mengembangkan Madrasah dengan di tambah pelajaran umum sedangkan Muhammadiyah mengembangkan Sekolah di tambah pendidikan agama Islam.<sup>17</sup> Yang agak berbeda adalah NU (yang tradisional) pada awalnya mengembangkan Pesantren kemudian memasukkan Madrasah dalam sistem Pesantren (1919) dan kemudian memberikan Pelajaran umum di dalamnya perubahan itu terjadi secara gradual dimulai pada tahun 1939 dan baru merata setelah pasca kemerdekaan.<sup>18</sup> Selanjutnya NU juga kemudian mendirikan sekolah dan Perguruan Tinggi di dalam kompleks Pesantren.

Pasca kemerdekaan organisasi dan yayasan itu terus melanjutkan aktivitasnya beberapa diantaranya beralih menjadi partai politik seperti NU, sedangkan Muhammadiyah tetap konsisten

<sup>17</sup> Upaya memasukkan pelajaran umum pada pendidikan agama ini telah mulai dilakukan di Sumatera Barat pada awal abad XX oleh Abdullah Ahmad yang mendirikan Adabiyah School (1907). Ide ini menurut Stenbrink mencontoh Taher Jalaluddin di Singapura dan seklaah Gubernemen yang dilihat di Padang, Steenbrink, *op-cit*, p. 39-39. Pada tahun 1911 di Sumatera Timur (Tanjung Pura) telah berdiri Madrasah yang juga memasukkan pengetahuan umum dengan nama Madrasah Mashlurah. Lihat Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Mutiara, 1979), p. 307.

<sup>18</sup> K.A. Steenbrink, *op-cit*, p. 72.



dengan gerakannya semula sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dan pendidikan.

Selanjutnya upaya pembinaan Pendidikan Islam diselenggarakan dibawah koordinasi Departemen Agama. Berbagai kebijakan untuk pemberdayaan Pendidikan Islam diarahkan dan diseragamkan. Terutama dalam sistem penjenjangan dan kurikulum serta *civil effect* ijazah yang dipersamakan dengan ijazah sekolah-sekolah di lingkungan Depdikbud. Departemen Agama juga melakukan pembinaan kelembagaan Pendidikan Islam mulai dari membuka Madrasah Diniyah yang ditujukan untuk memenuhi kekurangan jam pelajaran agama di sekolah umum dan Madrasah tingkat dasar (Madrasah Ibtidaiyah Negeri), tingkat menengah (Madrasah Tsanawiyah Negeri), tingkat atas (Madrasah Aliyah Negeri) dan IAIN. Selanjutnya seluruh lembaga pendidikan Islam yang ada diarahkan untuk mengikuti pola yang dibakukan itu. Sementara untuk Pengajaran Agama di sekolah umum dilakukan kesepakatan bersama dengan Departemen Pendidikan.<sup>19</sup> Departemen Agama mengangkat guru agama Negeri untuk sekolah dan Madrasah Negeri. Guru agama Negeri ini juga diperbantukan ke sekolah dan Madrasah swasta. Beberapa dari organisasi/ yayasan menolak dan mengangkat sendiri guru sesuai kriteria yang ditetapkan mereka. Rekrutmen tenaga guru agama negeri ini dari tamatan PGA (Pendidikan Guru Agama dan IAIN, PTAIS serta PTN dan PTS).

Departemen agama juga mendorong beberapa perbaikan seperti mengeluarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan untuk memberikan pelajaran agama di sekolah sekolah mulai dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi dan membentuk MP3A (Majelis Pertimbangan Pendidikan & Pengajaran agama pada 25 september 1952).<sup>20</sup> Pada tahun 1975 dikeluarkan SKB 3 Menteri (Menteri agama, Pendidikan dan kebudayaan, dan Dalam Negeri) untuk memberikan status yang sama kepada Madrasah dan sekolah dalam *civil effect* dan juga penjenjangan dengan demikian seorang

<sup>19</sup> SKB Menteri PPK dan Menteri Agama RI, tanggal 16 Juni 1951. Lihat Zakiah Daradjat, *MP3A Dalam Prespektif Sejarah*, (Jakarta: Work Paper Seminar Peran MP3A dalam Pendidikan Nasional, 1998), p. 6.

<sup>20</sup> Ketua KH. Imam Zarkasyi sebagai anggota tokoh dan ulama dari berbagai organisasi Islam. Tugas utama memberikan pertimbangan kepada Menteri tentang pendidikan, Zakiah Daradjat, *Ibid*, p. 2.

siswa Madrasah dapat saja berpindah ke sekolah demikian juga sebaliknya.

Dengan SKB 3 menteri ini muatan Madrasah sama dengan sekolah dalam pelajaran ilmu pengetahuan umum.<sup>21</sup> Pihak departemen juga mendorong agar Madrasah Diniah yang khusus memberikan pelajaran agama terus berkembang. Untuk Diniah ini diberikan bantuan penyelenggaraan dan disusun pula pedoman garis besar pengajarannya dan jenjangnya serta lama belajarnya.<sup>22</sup> Meski terus berjalan namun perhatian terhadap Diniah agak menurun bahkan sejak akhir 80-an perhatian lebih pada TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) untuk pemberantasan buta aksara Al-Qur'an.

Menyadari adanya kesenjangan dalam pendidikan agama terutama kelangkaan ulama Depag telah membuka program Madrasah Aliyah Khusus (MAPK) sebagai usaha mengintegrasikan MAN jurusan Agama yang kurang diminati. Pihak swasta juga mengupayakan penambahan pengajaran agama<sup>23</sup> dengan menambah waktu belajar pada sore hari terutama di sekolah umum. Sedang untuk Madrasah beberapa yayasan mengikuti peserta didik pada sekolah yang mereka kelola terutama bidang study eksakta atau membuka pelajaran tambahan. Dewasa ini dikembangkan pula sekolah berasrama (*boarding system*).

Sedangkan bidang study agama di perguruan tinggi menurut Syalabi diberikan satu semester. PTS yang dikelola oleh yayasan dan organisasi Islam menambahkan diberi setiap semester. Untuk ada kesamaan dalam penterjemahan Al-Qur'an, Departemen Agama mengeluarkan pula penterjemahan dan tafsir Al-Qur'an standar, dan buku paket pelajaran Agama Islam sesuai dengan kurikulum yang dibakukan. Untuk buku acuan atas inisiatif Depdikbud bekerjasama dengan Depag telah membentuk team penyusun

<sup>21</sup> Zakiah Daradjat, *Ibid*, p. 6.

<sup>22</sup> Diniah awaliyah untuk jenjang dasar masa belajar empat tahun. Diniah Wustha lama belajar dua tahun dan Diniah Aliyah 2 tahun. Madrasah Diniah ini diprogramkan untuk mengisi kekurangan jam belajar agama di sekolah umum (SD, SMP, SMU).

<sup>23</sup> Bidang studi agama di sekolah umum diberikan hanya dua jam pelajaran tiap minggu. Sedangkan di Madrasah di samping bidang study ilmu umum diberikan pula disiplin ilmu agama sehingga bidang study menjadi sangat banyak sedangkan target kurikulum untuk bidang study umum harus sama dengan capaian sekolah.



materi bidang study Agama menurut disiplin Ilmu (Islam dalam disiplin Ilmu). Selanjutnya sebagai acuan dalam penterjemahan al-Qur'an dalam bahasa Indonesia Departemen Agama telah pula team pentashihan cetakan al-Qur'an dan Tafsir serta terjemahannya. Dalam penyusunan Tafsir ini beberapa ulama Indonesia telah pula menyusun Tafsir al-Qur'an.

Pengajian di Mesjid dan majlis taklim terus berlangsung dan menunjukkan kesemarakannya bahkan diselenggarakan oleh segenap lapisan baik di desa, kota maupun di Instansi pemerintahan dan swasta. Demikian juga kegiatan Tabligh. Kegiatan ini dikelola masyarakat bersama ulama dan juga oleh organisasi sosial keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan yayasan-yayasan. Penerbitan majalah, jurnal, buku-buku agama baik terjemahan maupun tentang pemikiran agama, masalah sosial, ekonmi, kependidikan, ilmu pengetahuan teknologi, filsafat. Beberapa majalah memuat pula soal jawab masalah agama. Di antara majalah/jurnal itu ada sanggup bertahan dalam waktu yang panjang dan memiliki oplah yang besar.<sup>24</sup> Era 70-an keatas banyak pula berdiri pusat study keagamaan mirip majlis ilmu pada masa kemajuan Islam klasik (diantaranya seperti LSAF, Paramadina An-Nida, LKIS, Limited Group) dan juga lembaga swadaya masyarakat yang diorganisir oleh aktivis. Juga berbagai kelompok seni budaya dan sanggar mode Islam.

Studi Islam semakin semarak dengan adanya kebijakan untuk mengembangkan ekonomi syariah yang kemudian bukan saja melibatkan lembaga keuangan Islam tetapi juga menumbuhkan pusat kajian Ilmu ekonomi dan pertumbuhan Islam.

Kemajuan dalam bidang iptek dan keberhasilan pembangunan mendorong makin diperlukannya pendekatan keagamaan. Berbagai program pembangunan justru menunjukkan kesuksesan dengan dukungan pendekatan dan komunikasi dengan bahasa agama. Hal ini menyebabkan kajian keagamaan harus melalui reformasi lembaga keilmuan. Berbagai disiplin ilmu pengkajiannya haruslah berbasis Islam. IAIN sebagai PTAIN dipandang tidak memadai

<sup>24</sup> Diantara majalah yang bertahan sampai saat ini sejak tahun 1930 adalah Majalah Tanya jawab soal agama sekarang bernama "Al-Muslimun". Lihat Delian Noer, *op-cit*, p. 104.

untuk menampung kebutuhan itu, oleh karena itu sejak tahun 1988 telah diupayakan kebijakan untuk meningkatkan kualitas tenaga dosen dengan membuka studi purna sarjana (SPS). Program Post Graduante ini berlangsung beberapa angkatan. Disamping kebijakan itu Kementrian Agama juga melakukan kebijakan untuk mengirim dosen-dosen IAIN belajar ke Canada, USA dan beberapa negara lainnya, terutama untuk penguasaan metodologi pengkajian agama. Untuk pengembangan penelitian keagamaan dibuat kebijakan kerjasama dengan kerajaan Belanda dengan membentuk lembaga kerjasama Indonesia Belanda INIS (Indonesian Nederland Islamic Studies).

Kebijakan integrasi ini mendapat momentum penguatan untuk kedua kalinya setelah pertama kali dalam bentuk SKB 3 Menteri yaitu masuknya Madrasah dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 1989, pada UUSPN ini Madrasah diakui sebagai sekolah bercirikan Islam. Masuknya pendidikan Islam sebagai sub sistem pendidikan nasional merupakan suatu langkah maju dalam usaha meretas dikhotomi pendidikan nasional dan diskriminasi terhadap pendidikan agama.

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan Islam terus diupayakan. Kebijakan dilakukan dengan meningkatkan kualitas dosen PTAIN melalui pendidikan pasca sarjana strata 2 dan strata 3 (program magister dan doktor) dengan kualifikasi dosen seperti itu diharapkan output PTAIN akan menghasilkan SDM yang berkualitas yang menjadi sokoguru perbaikan kualitas pendidikan Islam.

Tahun 1998 Indonesia mengalami resesi dalam bidang ekonomi moneter. Resesi ini disebut dengan krisis moneter. Untuk mengatasinya dilakukan reformasi dalam berbagai bidang. Selain melakukan reformasi bidang politik ketatanegaraan, berbagai perbaikan dilakukan. Namun disadari persoalan krisis moneter tidak hanya terbatas pada kerusakan sistem ekonomi keuangan, tetapi juga menyangkut tata kelola pemerintahan. Sistem sentralisasi dipandang sebagai satu faktor lambannya kemajuan. Untuk itu kemudian diadakan kebijakan ekonomi daerah.

Analisis yang lebih mendalam sampai pada kesimpulan masalah utama adalah krisis kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia menempati rangking diatas 150 dari 174 negara, bahkan



pada tahun 2000 menempati ranking 113. Untuk mengatasi hal itu, reformasi bidang pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh. Kebijakan dimulai dengan mengeluarkan UU sistem pendidikan no. 20 Tahun 2003. Undang-undang ini lebih memberikan penekanan pada perbaikan mutu pendidikan nasional, pemberdayaan lembaga pendidikan, jalur, jenis dan fungsi pendidikan agama dikembangkan termasuk pendidikan keagamaan, penaknaan pada peningkatan anggaran pendidikan nasional 20% dana APBN dan APBD.

Undang-undang No.20 tahun 2003 membuka peluang yang lebih besar bagi kiprah pendidikan agama selain pendidikan agama agama menjadi mata pelajaran wajib diberikan disetiap jenis, jenis dan jalur pendidikan. Undang-undang ini juga memberi peluang adanya Madrasah Aliyah Kejuruan setara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Klausul yang menyatakan pendidikan keagamaan juga sebagai sub sistem pendidikan nasional mendorong kementrian agama melakukan testrukturisasi organisasi dan pembinaan lebih intensif pada lembaga pendidikan keagamaan yang eksistensinya diperkuat kengan PP No.55 Tahun 2007. Untuk pengurusannya dikelola oleh seksi PAIS (Pendidikan Agama Islam).

Seiring dengan perkembangan global dan kemajuan pembangunan dan iptek menuntut semakin diperlukan pendekatan keagamaan. Realitas sosial menunjukkan kesuksesan berbagai program pembangunan justru menaikkan kesuksesan, dengan dukungan dan pendekatan dan komunikasi dengan bahasa agama. Keadaan ini menuntut pengkajian Islam haruslah dalam dalam lintas disiplin ilmu. Keberadaan PTAIN dipandang sudah tidak memadai untuk menampung kepentingan itu. Berdasarkan itu maka sejak itu 1988 telah diupayakan kebijakan transformasi. Kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam dari Institut menjadi Universitas. Sebagai langkah pertama kebijakan yang diambil dalam bentuk institut dan selanjutnya beralih status menjadi Universitas. Dewasa ini ada sepuluh IAIN telah beralih status menjadi universitas.





**BAB VIII**

**PENUTUP**



## BAB VIII PENUTUP

**S**ebagai penutup buku ini dirangkumkan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan kebijakan pendidikan Islam pada bab I sampai bab VII, serta beberapa pokok pikiran bagi kebijakan pendidikan ke masa depan.

### A. Kesimpulan

1. Keberdayaan Pendidikan Islam adalah keberhasilan pendidikan Islam dalam menjalankan perannya. Keberdayaan Pendidikan Islam dalam telaah sistematis historis adalah keberhasilan dari kebijakan Pendidikan Islam dalam perannya yang interdependen dengan System budaya, pada kurun waktu tertentu masa yang lalu. Pada buku ini difokuskan pada kesemarakan dan keberhasilan pendidikan Islam pada priode klasik
2. Dari telaah sistematis historis, terhadap kebijakan pendidikan Islam melalui aspek budaya, pada masa Islam klsik menunjukan, ada hubungan yang timbal balik antara kondisi yang dominan dari kebijakan tersebut dengan keberdayaan pendidikan Islam memberdayakan perdaban.
3. Berdasarkan karakteristik perkembangan pendidikan Islam dalam aspek budaya, masa klasik itu, maka fase perkembangan dapat dibagi kepada masa kaffah (571-660), masa entnosesntris (661-750), masa kosmopolitan (754-814), masa fanatisme aliran (814-850), masa politik kekuasaan (850-950), masa dominasi aliran minoritas (950-1050) dan masa dominasi Mazhab mayoritas (1050-1258).



4. Kebijakan pendidikan Islam ternyata menjadi optimal pada kondisi yang kaffah, komopolitan, dan tidak repressif. Selanjutnya keberdayaan pendidikan Islam menjadi tidak optimal pada suasana yang etnosentris dan fanatisme aliran, politik kekuasaan, dominasi mazhab pendidikan Islam menjadi mundur dan tidak berdaya.
5. Hal-hal yang mendukung keberdayaan peran pendidikan Islam pada kondisi yang kaffah, kosmopolitan serta tidak repressif tersebut adalah : kebijakan (a). wawasan belajar seumur hidup tanpa batas dengan pemahaman agama yang kaffah, kemampuan kerja shalihat yang menjunjung persatuan persamaan dan keadilan berdasarkan asas-asas kitabullah dan Sunnah Rasul , (b). proses dan orientasi kependidikan yang terbuka, dinamis dan kreatif, dengan orientasi pemahaman yang humanisme teistik dan tidak repressif, (c). transformasi nilai dalam kerangka Islami dan (d) jaringan kelembagaan yang terpadu dengan konsorsium ilmiah dan pusat penelitian.
6. Kebijakan pemberdayaan pendidikan Islam di Indonesia ke masa depan seyogyanya dapat dikembangkan dalam kondisi yang kaffah dan cosmopolitan. Pemberdayaan peran pendidikan Islam yang telah dilakukan dapat dioptimalkan sehingga hal-hal yang mendukung keberdayaan dapat diwujudkan dengan optimal. Kebijakan wawasan belajar yang masih memisahkan pendidikan Islam sebagai didasarkan agama saja perlu dikembangkan kearah pengertian sebagai pendidikan yang integratif komprehensif. Proses kependidikan yang teistik ataupun yang teistik humanistik harus dikembangkan kepada orientasi yang humanisme teistik. Pengembangan pembelajaran yang ekspositori perlu dikembangkan menjadi model inkuiri. Pengembangan kurikulum yang cenderung dichotomik perlu diarahkan menjadi monochotomik, perlu ada konsorsium ilmu-ilmu ihsaniyah. Selanjutnya kelembagaan pendidikan yang ada perlu meningkatkan kualitas kerjasama dengan pusat-pusat penelitian dan pabrik terutama untuk sekolah kejuruan.

## **B. Beberapa Pandangan ke depan**

1. Bagi keperluan kebijakan pemberdayaan pendidikan Islam kemas depan perlu kebijakan menciptakan suasana pemahaman agama yang kaffah dalam suasana kebersamaan yang tidak repressif dalam semua aspek, mulai lingkup pribadi, sekolah, organisasi dan Negara.

2. Berbagai hal pendukung keberdayaan pendidikan Islam sebagai suatu sistem, hendaknya dapat diupayakan semua pihak dalam usaha memberdayakan kependidikan Islam, baik dalam pemberdayaan visi kependidikan, proses orientasi penyelenggaraan, pengembangan kurikulum maupun kelembagaan.





## INDEKS

- A**
- Abu Bakar Sidik 32, 35  
Adaptif 15, 108, 111  
Adoptif 15, 106, 107  
Andalusia vi, 5, 28, 45, 51, 85  
Asia Kecil 5  
Afrika 3, 5, 28, 36, 43, 49, 50, 62, 64  
69, 71  
Aminah Ahmad 13  
Ameer Ali 6, 128  
Amr bin Ash 28, 34  
Ashley 62, 95  
Abdul Malik 47  
Al Irsyad 111  
Al Washliyah  
Al Ittihadiyah  
Al Imam  
Asi'ariah
- B**
- Baghdad 5, 39, 43, 44, 45, 49, 51,  
53, 61, 64, 68, 71  
Bashrah 28, 43, 45, 51  
Baitul Hikmah 51, 61, 98, 101, 102  
Baca Tulis 27, 60, 79, 86  
Bintang Islam 109  
Buwaihid 99  
Bil Ma'tsur 96  
Bimaristan 52, 54, 55, 71, 75, 98,  
100, 102
- C**
- Cordoba 48, 51  
Cairo 5, 13, 49, 51  
Classical Periode 9, 65, 132  
Cina 3, 5, 27, 28, 29, 36, 38, 61, 64,  
66, 69, 86, 98

## D

Dinasti 32, 37, 39, 43, 45, 47, 64, 69, 70, 71, 75

Dar-Arqam 23, 93

Dar-al Qur'an 36, 47

Dar-al Hadis 132

Dar Kuttub 50

Dinamisme vii

Dualistik 106

Dhuha al-Islam 11

Damaskus 36, 37, 43, 44, 47, 49, 53, 54

Discovery 100

Darun Nadwah

## E

Empowerment 141

Encyclopedia 9, 37, 46, 49, 129, 130, 132

Education vii, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 79, 81, 82, 94

Etnocentris

## F

Fajr al-Islam 11

Fatwa al-Nazar 37

Fanatisme Aliran 122

## G

Gerakan 17, 29, 46, 48, 59, 60, 61, 62, 98, 105

Growth Strategies 98, 105

Geografi 49

George Makdisi 9, 36, 46

Gratis 81

Greek 29

## H

Hamzah Fansuri 72

Hjrah 25, 30, 31

Humanisme Teistik 122

## I

Internalisasi 8

Implisitasi 75

Institusi v, 3, 9, 45, 49, 91, 93, 94, 95, 97, 98

Integratif vii, 122

Inquisisi 98

## J

Jam'iyah Mahmudiyah Lithalibil

Khairiyah 69, 108



## K

Khutbah 68, 69, 87, 93  
Konsorsium 22, 96, 122  
Kosmopolitan 121, 122  
Kaffah 121, 122

## L

Linguistic 65

## M

Mesjid Akademi (Khan) 29  
Mazhab Mayoritas 121  
Minoritas 4, 121  
Maktabah 5, 11, 17, 49, 51, 98, 100, 102  
Mu'tazilah 39, 47  
Madrasah Nizhamiyah 46

## N

Nafs al Amarah 73  
Nafs al Lawwamah 73  
Nafs al Muthmainnah 73  
Nafs al Syafiah 73  
Nafs al Mulhimah 73

## O

Observasi 34, 93  
Observatorium 5, 17, 52, 53, 54, 55, 74, 75, 98, 100, 101, 102

## P

Polarisasi viii, 105  
Patronase 53

## R

Refressif  
Rekonsiliasi 72, 84

## S

Sunnah 34, 39, 105, 108, 122  
Sunni 47, 102  
Syair 24, 65, 66, 72, 87, 93  
Suffah 93  
Syiah 47, 99  
Safari

## T

Taqlid 100, 102  
Takwin 87  
Taklim 17, 102, 115  
Takhyir 87  
Takmil 87

## U

Unity 82  
Ummayyah vii  
Usmani 39, 47, 61, 62, 70, 71

V

Visi 72, 75, 82, 83, 100, 123

W

Wazir 99

Waqaf 9

Y

Yazid 52, 54, 61

Yastrib 25, 31

Z

Zakat 26, 81, 93





## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, *Ilmu dan Peradaban Menurut Islam Dan Kristen*, Bandung: Dipenegoro, 1997
- Ahmad, Kurshid, *Basic Principle Of Islamic Education*, Lahore, 1997
- Ahmad, Sa'ad Mursi, *Tarikh al-Tarbiyah wa al-Ta'lim*, mesir : alam al kutub, 1971
- Ahwani, Ahmad Fuad, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana PTAI/ IAIN, 1984
- Al-Abrasyi, Muhammad Atiyah, *Al-tarbiyah al-islamiyah*, Kairo: Dar al-Qaumiyyah li-Al-Tiba'ah wa al- Nasyr, 1979
- Al-Attas, Syed Naquib dan Syed Sajjad Husain, *Aims and Objectives Islamic Educition*, London, 1990
- , *Islam Dan Filsafat Sains*, Bandung: Mizan , 1995
- Al-Faruqi, Ismail R, *The Cultural Atlas Of Islam*, New York: Macmillan Publishing Compay, 1990
- Al-Faruqi, Ismail R, *Islamizztion Of Knowlage; General Priciple and Work Plan*, Washinton DC, Internasional Institute Of islam Tought 1982
- Al-Haddad, Habbib Ali Thahir, *Sejarah Masukan Islam Ke Timur Jauh*, Jakarta: Lentera, 1995
- Al-Hudary, Beik Al-Syaikh Muhammad, *Kitab Tarikh Al-Tasyri 'al-Islamy*, Cet.IV, Mesir: Al-Sa'adah, 1954

- Al-Khubutly, Aly Husny, *Al-Hadhara al-Arabiya al-Islamiyah, Qariah*: Maktabah Al-khasanji, tt.
- Amin, Ahmad, *Zuhr al-Islam*, juz II, Cet. V, Kairoh: Maktabah al-Nahdahal Misriyah, 1997
- , *Duha al-islam*, Kairo: Maktabah al-Nahda al-Misriyah, 1977
- Amin, Adullah.M, *Falsafah Kalam D I Era Post Mondernisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Ameer Ali, *A short History of the Sarannce*, New Delhi: Kitab Bahava, Fourth Edition, 1994
- Arbi, Sutan Zanati, *Pengantar Kepada Filsafat Pendidikan*, Jakarta: Dipdikbud, Dirjen Dikti, Proyek Pengembangan Tenaga Kependidikan, 1980
- Ashtor, E, *A Social and Economic History The near East in the Middle Ages*, London: Collins St James's Place, 1976
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tenaga dan Kepulauan Nusantara*, Abdillah, S.Ag, M.Pd XVII dan XVII, Bandung: Mizan, 19995
- Baloch, N.A, *Advent of islam In Indonesia*, Islamabad: National Institute of Historical and Cultural Research, 1980.
- Barnadib, Imam, *Dasar-Dasar Kependidikan, Memahami Makna Dan Prespektif Beberapa Teori Pendidikan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993
- Barginsky, V.I, *Tasawuf Dan Sastra Melayu*, Jakarta: RUL, 1993
- Billgrami, Hamid Hasan, *Konsep Universitas Islam*, (terj.) Yogyakarta: Tiara Wacana, 1988
- Bosworth, Edmund Clifford, *The Islamic Dynasties*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1980
- Bulliet, Tichard W, *The Patricians Of Nishafur, A Study in Medieval Islamic Sicial*, Cambridge: Harvard University Press, 1972
- Dahl, Robertt A, *Modern Plitical Analycis*, New Delhi: Printice Hall Of India Private, Limited, 1974
- Daradjat Zakiah, *MP3A dalam Prespektif Sejarah*, Jakarta, Work Paper Seminar Peran MP3A dalam pendidikan Agama, Jakarta: Depertemen Agama RI, 1998



- ....., *Suatu Analisis Perkembangan Pemikiran Pendidikan Islam Masa Abbasyah*, uraian lepas, 27 September 1989, Jakarta: Wisma Sejahtera, 1998
- Dodge, Bayard, *Muslim Education In Medieval Times*, Washington, DC.: The Middle East Institut, 1962
- Esposito, John L, (ed), *Islam In Asia: Religion Polotics and Society*, New York: Oxford University Press, 1987
- Fagerlind, Ingemar, cs, *Education and National Development*, Oxford: Pergamon Press, 1983
- Gazalba, sidi, *Mesjid Sebagai Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pusataka al-Husna, 1992
- Graudy, Roger, *Mencari Agama Pada Abad XXI, Wasiat Filsafat Roger Graudy*, tejemah Prof. DR.H.M. Rasyid, jakarta: Bulan Bintang, 1986
- Hasan, Aminat Ahmad, *Nazaryyah al-Tarbiah Dra. Fakhriati, MA al-Qurani wa Tatbiqatuha*, Kairo: Dar al-Maarif, 1985
- Hasan, Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam al-siyasi wa al-din*, cet Vii, mesir: Maktabah Al-Nahdah, 1976
- Hitti, Philip K, *History Of The Arabs*, London: Macmillan, 1995
- Hisyam, Ibnu, *Al-sirah al-Nabawiyah*, Juz I & II, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah wa Mustafa al-Bab al Halabi wa Auladuh, 1955
- Hudgson, Marshal G., *The Venture Of Islam*, vol., III, Chicato: The University Of Chicato Press, 1974
- Iqbal, Muhammad, *The Reconstruction OF Religions Thought In Islam*, Lahore: Syekh Muhammad Asharf, 1981
- Jalal, Abd al-fatah, *Min al-usul al-Tarbiyah fi al-Islam*, Mesir, 1977.
- Kahf, Monzer, "Wakaf" dalam Jhon L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia Of The Modern Islamic Word*, New York: Oxford University Press, 1995.
- Khaldun, Ibnu, *The Muqqadimah*, Ny: Belligen Fondation, 1958.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Raneka Cipta, 1980.

Kuntowijoyo, "Agama Negara dan Format Sosial, Sejarah Aliensasi dan Oposisi Islam di Indonesia", dalam A.E.Priyono, (ed), *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mirzan, 1993.

-----, "Muslim Kelas Menengah Indonesia, 1915-1950" dalam A.E. Priyono, (ed), *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1993.

-----, "Muhammadiyah Sebagai Gerakan Kebudayaan Tanpa Kebudayaan" dalam Ade Maarif dkk, *Muhammadiyah dan Perkembangan Rakyat*, Yogyakarta: KSL dan LP3SM UMY Kerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1995.

Langgulong, Hasan, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke 21*, Jakarta: al-Husna, 1984.

Lapidus, Ira Marvin, *A History Of Islamic Societies*, Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

-----, *Muslim Cities in The Latter Middle Ages*, Cambridge, Massachusers: Harvard University Press, 1967.

Lombard, Maurice, *The Golden Age of Islam, vol.2*, New York: American Alseirer Publishing Company, INA, 1975.

Ma'arif, Syafii, *Membumikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Madjid, Nurcholish, "Pertimbangan Kemashlahatan Menangkap Makna Dan Ketentuan Keagamaan: Kasus Ijtihad Umar Bin Khattab dalam Nurkhalis Majid, (ed), *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1995.

-----, *Islam Ke Moderenan dan Ke Indonesian*, Bandung: Mizan, 1989.

Makdisi, Geoge, *The Rise of Colleges; Institution of Learning in Islam in The West, Edinburgh*: Edinburth University Press, 1981.

-----, *On The Rise of Humanism in Classical in The Christian West: With Special Reference Scholastic*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1982.

-----, "Madrasah " dalam Bosworth, et. All., (eds), *The Encyclopedia of Islam, vol. V*, New Edition, London: EJ. Brill, 1986.



- Maududi, Abu A'la, *Islamic Law and Constitution* Translated and Edited by Kurshid Ahmad, tp, 1982.
- Miarso, Yusuf, Dkk, *teknologi Komunikasi Pendidikan Pengertian dan Penerapan di Indonesia*, Jakarta: Pustekom Depdikbud dan CV Rajawali, 1984.
- Muhadjir, Neong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- , *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Suatu Teori Pendidikan*, Edisi IV, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992.
- , *Perencanaan dan Kebijakan Pengembangan Sumber daya Manusia*, cet. II, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992.
- Mursi, Muhammad Munir, *Tarbiyat al Islamiyah Usuluha wa Tatawarruha fi al-Bilad al-'Arabiyah*, Kairo: Dar al-Kutub, 1977.
- Nadvi, Syed Habibullah, *Dinamika Islam*, Bandung: Penerbit Risalah, 1986.
- Nakosteen, Mendi, *History of The Islamic Origin of Western Education*, Boulder: University of Colorado Press, 1964.
- , *Kontribusi Islam Atas Dunia Intelektual Barat, Education Deskripsi Analisa Abad Keemasan Islam* (Terjemahan) Joko S. dkk. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Nasr, Seyyed Mossein, *Sceince and Civilization in Islam*, NewYork: A Plume Book From American Library, 1970.
- Nasution, Harun, "Tinjauan Filosofis Tentang Pembentukan Kebudayaan Islam" dalam Abd. Basir Solissa dkk. (Ed), *Al-Qur'an dan Pembinaan Budaya*, Dialog dan Transformasi, Yogyakarta: Lesfi, 1993.
- , *Islam ditinjau dari beberapa Aspek*, Jakarta: UIP, 1985.
- , *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, Bandung: Mizan, 1995.
- , *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam Indonesia, 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1995.

- , "Masa Depan Ummat Islam Tantangan dan Cara Menghadapinya" dalam Dawam Raharjo, *Reformasi Politik*, Jakarta: Intermasa, 1977.
- Piper, C.F, *Beberapa Study Tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950*, cet. I Jakarta: UI Press, 1964.
- Rahman, Fazlur, *Islam and Modrenity: Transformation an Intelectual Tradition*, Chicago: The University of Chicago, 1987.
- , *Islamic Methodology in History*, Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1968.
- Robertson, Ia, *Sociology*, New York: Worth Publisher, Inc. 1981.
- Sabiq, Said, *Fiqh al-Sunnah*, juzii, Beirut: Dar al kitab, al-Arabi, 1974.
- Salam, Solichin, *Muhammadiyah dan Kebangunan Islam di Indonesia*, Jakarta: NV. Mega, 1965.
- Sastrowijoyo, Seno, *Renungan Tentang Wayang Kulit*, Jakarta: tp, 1964.
- Saqbi, Ghulam Nabi, *Modrenization of Muslim Education*, Lahore: Islamic Book Service, tt.
- Sezqin, Fuat, "Dar al Hadist", dalam Bernad Lewis et, all., *The Encyclopedia of Islam*, New Edition vol II, Leiden: EJ, Brill, 1980.
- Shaban, M.A., *Islamic Historry a New Interpretation*, Cambridge: The University Press, 1971.
- Shihab, Quraissy, *Membumikan Al-Qur 'an*, Bandung: Mizan, 1985.
- Siddiqi, Amir Hasan, *Studies in Islamic History*, ahli bahasa HMJ Irawan, Jakarta: Al-Maarif, 1985.
- Siddiqi, Nourrunzzaman, *Menguak Sejarah Muslim*, Yogyakarta: LP2M, 1987.
- , *Tamaddun Muslim*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Solton, H Roger, *an Intrduction to Politics*, London: Longman, Green and co, Ltd, 1960.
- Stanton, Charles Michael, *Higher Learning in Islam, The Classical Priod, A.D 700-1300*, Rowman & Little filed Publisher Inc, 1990.



- Steenbrink, K.A, *Pesantren, Madrasah, Seklah*, Jakarta: LP3ES, 1975.
- Surya Negara, Ahmad Mansur, *Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1995.
- Syalabi, Ahmad, *History of Muslim Education*, Bairut-Libann: Dar al Kashaf Publishing, Printing Distributing House, 1954.
- Taylor, EB, *Primitive Culture*, London: Jhon Murray, 1871.
- Watt, W. Montgomerrey, *The Mayesty The Was Islam*, London: Sidwick A. Jackson, 1971.
- , *Muhammad at Mecc*, London: Oxford University Press, 1979.
- , *Muhammad's Mecca, History in The Qur'an*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1988.
- Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Mutiara, 1970.

*Catatan*





# KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM MEMBERDAYAKAN PERADABAN

**Prof. Dr. H. Fachruddin Azmi, MA.**

**S**ecara umum, Analisis Kebijakan Pendidikan Islam dapat dibatasi sebagai suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditunjukkan untuk menciptakan, menilai secara kritis dan mengkomunikasikan pengetahuan ilmiah berkenaan dengan berbagai kebijakan menyangkut program dan proses pendidikan Islam sepanjang perjalanan historisnya. Dalam menciptakan pengetahuan tentang program dan proses kebijakan pendidikan Islam tersebut, analisis kebijakan pendidikan Islam meneliti sebab, akibat dan kinerja kebijakan dan program tentang pendidikan Islam. Untuk itu, analisis kebijakan menggunakan metodologi, yakni sistem standar, aturan, dan prosedur untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan pendidikan Islam. Pada gilirannya, aktivitas intelektual ini bermuara ke arah penciptaan pengetahuan baru yang pertimbangan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pilihan atas berbagai alternatif kebijakan pendidikan Islam ke masa depan misalnya alternatif kebijakan pendidikan Islam dapat meningkatkan mutu, perluasan akses, pemberdayaan. Masyarakat dan peradaban Muslim dan lain-lain pada tataran ini, analisis kebijakan pendidikan Islam diharapkan mampu menjadi landasan normatif kreatif dan inovatif bagi penyusunan kebijakan-kebijakan baru pendidikan Islam di masa depan.



Diterbitkan Oleh :  
**CV. MANHAJI Medan**

ISBN 978-602-6918-15-4

